PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAPPERIDA
HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bakti untuk Bangsa
HRP
HAFECS
Research & Publication

LAPORAN KAJIAN

Evaluasi Desain Kebijakan Inovasi Daerah Berbasis Ekosistem Kewirausahaan dalam Penguatan UMKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2026

Tim Peneliti:

1. **Dr. Muhammad Rahmatullah, M.Pd.** – Pakar Ekonomi
2. **Rizky Febriyani Putri, M.Pd.** – Pakar Pendidikan dan Kewirausahaan
3. **Ratna Yulinda, M.Pd.** – Pakar Pendidikan dan Kewirausahaan
4. **Farida Hayati, S.Pd.** – Pakar Pendidikan dan Evaluasi Program
5. **Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc.** – Peneliti HRP
6. **Raihani Raziqin, S.Tr.Kom.** – Peneliti HRP

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Evaluasi Desain Kebijakan Inovasi Daerah Berbasis Ekosistem Kewirausahaan dalam Penguatan UMKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penyusun :
1. Dr. Muhammad Rahmatullah, M.Pd. – Pakar Ekonomi
2. Rizky Febriyani Putri, M.Pd. – Pakar Pendidikan dan Kewirausahaan
3. Ratna Yulinda, M.Pd. – Pakar Pendidikan dan Kewirausahaan
4. Farida Hayati, S.Pd. – Pakar Pendidikan dan Evaluasi Program
5. Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc. – Peneliti HRP
6. Raihani Raziqin, S.Tr.Kom. – Peneliti HRP

Barito Kuala, 10 Agustus 2026

Disetujui oleh:

Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc.
Coordinator of HAFECS Research and Publication

Farida Hayati, S.Pd.
Head Division and Researcher

Diketahui oleh:

Dr. Zulfikar Alimuddin
Director of HAFECS Research and Publication

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas terselesaikannya Laporan Akhir Kajian "Evaluasi Desain Kebijakan Inovasi Daerah Berbasis Ekosistem Kewirausahaan dalam Penguatan UMKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan". Kajian ini disusun sebagai bagian dari upaya mendalami sejauh mana desain kebijakan inovasi daerah pada Perspektif Ekonomi, Efisiensi, dan Nilai Tambah telah memperkuat ekosistem kewirausahaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang bersifat penggambaran dan evaluasi atas kinerja masing-masing inovasi, kajian ini secara khusus menerapkan kerangka teori ekosistem kewirausahaan (*entrepreneurial ecosystem*) sebagai lensa analisis untuk menilai kualitas desain kebijakan itu sendiri - apakah kebijakan yang ada telah menjangkau keenam domain pembentuk ekosistem kewirausahaan yang sehat, yakni kebijakan (*policy*), pembiayaan (*finance*), budaya (*culture*), dukungan kelembagaan (*support*), sumber daya manusia (*human capital),* dan pasar (*market*).

Kajian ini memakai data resmi rekap 214 inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rekap terbaru mengelompokkan inovasi ke dalam delapan Asta Cita, yaitu delapan misi Presiden periode 2025-2029 yang ditetapkan menjadi prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dari 214 inovasi itu, kajian mengambil 22 inovasi yang berkaitan dengan ekonomi: 20 inovasi dari Asta Cita 3 (lapangan kerja, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur) ditambah 2 inovasi dari kategori lain yang isinya menyasar pelaku usaha. Dari 22 inovasi tersebut, disaring lagi menjadi 12 inovasi prioritas yang dibahas mendalam. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, serta seluruh pemerintah kelurahan/kecamatan yang telah menjadi penggerak inovasi-inovasi yang dikaji dalam laporan ini. Kami menyadari kajian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya pada ketersediaan data kuantitatif yang belum merata di seluruh inovasi yang dianalisis. Kritik dan masukan konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan kajian serupa di masa mendatang.

Semoga kajian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan desain kebijakan inovasi daerah, khususnya dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan dan daya saing UMKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Barito Kuala, 3 Agustus 2026

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini menilai rancangan kebijakan inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memperkuat UMKM. Ada dua alat ukur yang dipakai. Pertama, Asta Cita, untuk mengecek apakah setiap inovasi sudah ditempatkan pada prioritas nasional yang tepat. Kedua, kerangka ekosistem kewirausahaan dari Isenberg (2010) dan Spigel (2017), untuk menilai apakah rancangan programnya sudah cukup lengkap. Melalui penyaringan dua tahap, yaitu kecocokan tema dengan UMKM dan kelengkapan data, terpilih 12 inovasi prioritas: Inkubator Dopat, Sekolah Koperasi Desa HSS, Klinik UMKM, SADATU, GIAT UMKM GO ON, TERASA BERKAH, Kampung Kuliner, MAU SOP IGA, SILAPIS, Klinik UMKM Daha Barat, PETA DASEL, dan KURELA SEHATI.

Soal penempatan Asta Cita, kajian menemukan tiga hal. Pertama, urutan kategori pada dokumen rekap tidak sama dengan urutan resmi RPJMN 2025-2029. Kategori kewirausahaan dan kategori pembangunan SDM tertukar posisinya, sehingga seluruh penomoran dalam laporan ini sudah diluruskan mengikuti urutan resmi. Kedua, 5 dari 22 inovasi atau 22,7% ternyata salah kategori, karena isi utamanya berada di Asta Cita yang berbeda dari tempatnya dicatat. Kelima inovasi itu adalah SiOPEN HSS dan SI TIMELINE RS BHHB (seharusnya Asta Cita 7), SIMBIOSIS (Asta Cita 4), MAU SOP IGA (Asta Cita 5), dan Sekolah Koperasi Desa HSS (Asta Cita 6). Ketiga, Asta Cita 5 tentang hilirisasi tercatat kosong tanpa satu pun inovasi. Padahal MAU SOP IGA dan Inkubator Dopat justru mengerjakan hal itu. Jadi yang kosong sebenarnya pencatatannya, bukan programnya.

Secara keseluruhan, 22 inovasi tadi menyentuh 6 dari 8 Asta Cita, paling banyak di Asta Cita 3 sebanyak 15 inovasi. Kalau dilihat dari seluruh 214 inovasi, sebarannya sangat timpang. Asta Cita 7 menampung 100 inovasi atau 46,7%, artinya inovasi daerah selama ini banyak berkutat pada digitalisasi administrasi internal. Sementara Asta Cita 3, 5, dan 6 yang menopang kewirausahaan, nilai tambah produk, dan ekonomi desa hanya berisi 20, 0, dan 8 inovasi. Ketimpangan ini sejalan dengan hasil penilaian rancangan: dari nilai penuh 36 poin per domain, domain Dukungan meraih 30 poin sedangkan domain Pembiayaan hanya 11 poin. Pemerintah daerah kuat menyediakan layanan, tetapi lemah menyediakan modal.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa desain kebijakan yang ada secara konsisten kuat pada domain Dukungan (support) melalui layanan pendampingan dan inkubasi, namun secara struktural lemah pada domain Pembiayaan (finance) dan Kebijakan (policy) dalam pengertian insentif fiskal atau aturan keberpihakan bagi UMKM. Inkubator Dopat memperoleh skor komposit evaluasi desain kebijakan tertinggi (4,25 dari skala 5) didukung data kinerja kuantitatif - 39 tenant binaan dengan omzet tahunan Rp 5.086.562.759 dan serapan tenaga kerja 75 orang - sementara KURELA SEHATI berada pada peringkat terendah (2,30) karena masih dalam tahap pembentukan kelembagaan dengan dukungan anggaran terbatas.

Kajian merekomendasikan tiga arah kebijakan utama: (1) penguatan domain pembiayaan melalui kemitraan keberpihakan dengan lembaga perbankan daerah; (2) penyusunan regulasi daerah (Perbup/Perda) yang secara jelas memberi insentif bagi ekosistem kewirausahaan UMKM; dan (3) integrasi data kinerja UMKM lintas-OPD dan kelurahan ke dalam satu instrumen pemantauan tunggal guna mendukung evaluasi desain kebijakan yang berkelanjutan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN **2**
KATA PENGANTAR **3**
RINGKASAN EKSEKUTIF **4**
DAFTAR ISI **6**
DAFTAR TABEL **12**
DAFTAR GAMBAR **15**
BAB I PENDAHULUAN **16**
1.1 Latar Belakang 16
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran 17
1.2.1 Maksud 17
1.2.2 Tujuan 18
1.2.3 Sasaran 18
1.3 Dasar Hukum 19
1.4 Ruang Lingkup 19
1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 19
1.4.2 Ruang Lingkup Lokasi 19
1.4.3 Ruang Lingkup Data 19
1.5 Keluaran dan Manfaat 20
1.5.1 Keluaran 20
1.5.2 Manfaat Teoritis 20
1.5.3 Manfaat Praktis 20
1.6 Sistematika Pembahasan 20
BAB II KAJIAN TEORI **22**
2.1 Inovasi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Inovasi 22
2.2 Ekosistem Kewirausahaan 22
2.3 Evaluasi Desain Kebijakan 24
2.4 Penelitian Terdahulu 24
2.5 Asta Cita sebagai Kerangka Prioritas Pembangunan Nasional 24
2.6 Kerangka Pikir Kajian 26
BAB III METODOLOGI **28**
3.1 Metode dan Pendekatan Kajian 28
3.2 Lokasi dan Fokus Kajian 28
3.3 Jenis dan Sumber Data 28

3.4 Populasi dan Seleksi Inovasi....28
3.4.1 Tahap I: Penyaringan Relevansi Tematik....29
3.4.2 Tahap II: Penyaringan Kelengkapan Data....31
3.5 Teknik Pengumpulan Data....33
3.6 Instrumen dan Indikator Evaluasi....34
3.7 Teknik Analisis Data....34
3.8 Hasil Skoring dan Penetapan Inovasi Prioritas....36

BAB IV PEMBAHASAN....40
4.1 Isu Strategis Penguatan Ekosistem Kewirausahaan UMKM....40
4.2 Gambaran Umum Inovasi Ekonomi Kabupaten HSS....41
4.2.1 Distribusi Tematik dan Sub-Klaster....43
4.2.2 Pembahasan Ringkas Sepuluh Inovasi Kandidat di Luar Fokus UMKM....44
4.2.3 Kesesuaian Inovasi dengan Asta Cita....48
4.3 Profil Inovasi Prioritas....54
4.3.1 Inkubator Dopat....54
4.3.1.1 Identitas Inovasi....55
4.3.1.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat....55
4.3.1.3 Rancang Bangun Inovasi....56
4.3.1.4 Capaian Inovasi....57
4.3.1.5 Kendala dan Tantangan Implementasi....59
4.3.1.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC)....59
4.3.1.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan....60
4.3.2 Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan....60
4.3.2.1 Identitas Inovasi....61
4.3.2.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat....62
4.3.2.3 Rancang Bangun Inovasi....62
4.3.2.4 Capaian Inovasi....63
4.3.2.5 Kendala dan Tantangan Implementasi....65
4.3.2.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC)....65
4.3.2.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan....66
4.3.3 Klinik UMKM....67
4.3.3.1 Identitas Inovasi....68
4.3.3.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat....68
4.3.3.3 Rancang Bangun Inovasi....68

4.3.3.4 Capaian Inovasi 69
4.3.3.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....71
4.3.3.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC).....71
4.3.3.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan.....72
4.3.4 Sadatu 72
4.3.4.1 Identitas Inovasi.....74
4.3.4.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat.....74
4.3.4.3 Rancang Bangun Inovasi 74
4.3.4.4 Capaian Inovasi 75
4.3.4.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....77
4.3.4.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC).....77
4.3.4.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan.....78
4.3.5 Giat UMKM Go On.....78
4.3.5.1 Identitas Inovasi.....80
4.3.5.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat.....80
4.3.5.3 Rancang Bangun Inovasi 80
4.3.5.4 Capaian Inovasi 82
4.3.5.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....83
4.3.5.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC).....83
4.3.5.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan.....84
4.3.6 Terasa Berkah 84
4.3.6.1 Identitas Inovasi.....86
4.3.6.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat.....86
4.3.6.3 Rancang Bangun Inovasi 86
4.3.6.4 Capaian Inovasi 88
4.3.6.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....89
4.3.6.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC).....89
4.3.6.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan.....90
4.3.7 Kampung Kuliner 90
4.3.7.1 Identitas Inovasi.....92
4.3.7.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat.....92
4.3.7.3 Rancang Bangun Inovasi 92
4.3.7.4 Capaian Inovasi 93
4.3.7.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....95
4.3.7.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC).....95

4.3.7.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 96
4.3.8 Mau SOP IGA 96
4.3.8.1 Identitas Inovasi 97
4.3.8.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat 98
4.3.8.3 Rancang Bangun Inovasi 98
4.3.8.4 Capaian Inovasi 99
4.3.8.5 Kendala dan Tantangan Implementasi 101
4.3.8.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC) 101
4.3.8.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 102
4.3.9 Silapis 102
4.3.9.1 Identitas Inovasi 103
4.3.9.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat 104
4.3.9.3 Rancang Bangun Inovasi 104
4.3.9.4 Capaian Inovasi 105
4.3.9.5 Kendala dan Tantangan Implementasi 106
4.3.9.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC) 107
4.3.9.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 108
4.3.10 Kubar 108
4.3.10.1 Identitas Inovasi 109
4.3.10.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat 110
4.3.10.3 Rancang Bangun Inovasi 110
4.3.10.4 Capaian Inovasi 111
4.3.10.5 Kendala dan Tantangan Implementasi 112
4.3.10.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC) 112
4.3.10.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 113
4.3.11 Peta Dasel 114
4.3.11.1 Identitas Inovasi 115
4.3.11.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat 115
4.3.11.3 Rancang Bangun Inovasi 115
4.3.11.4 Capaian Inovasi 116
4.3.11.5 Kendala dan Tantangan Implementasi 118
4.3.11.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC) 118
4.3.11.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 119
4.3.12 Kurela Sehati 120
4.3.12.1 Identitas Inovasi 121

4.3.12.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat.....121
4.3.12.3 Rancang Bangun Inovasi.....121
4.3.12.4 Capaian Inovasi.....122
4.3.12.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....124
4.3.12.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC).....124
4.3.12.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan.....125
4.4 Hasil Monitoring dan Evaluasi Desain Kebijakan.....125
4.4.1 Pemetaan Inovasi ke Enam Domain Ekosistem Kewirausahaan..125
4.4.2 Analisis Domain Kebijakan (Policy).....127
4.4.3 Analisis Domain Pembiayaan (Finance).....128
4.4.4 Analisis Domain Budaya (Culture).....129
4.4.5 Analisis Domain Dukungan (Support).....130
4.4.6 Analisis Domain Sumber Daya Manusia (Human Capital).....131
4.4.7 Analisis Domain Pasar (Market).....132
4.4.8 Analisis Kesenjangan Antar Domain.....133
4.4.9 Analisis SWOT Gabungan.....135
4.4.10 Sintesis Temuan terhadap Indikator Kinerja/Keberhasilan.....136
4.5 Evaluasi Keselarasan Desain Kebijakan.....138
4.5.1 Keselarasan dengan RPJMD 2025-2029.....138
4.5.2 Keselarasan dengan RKPD 2026, RPJPD 2025-2045, RPJMN...139
4.5.3 Konsistensi Regulasi dan Kelembagaan.....141
4.5.4 Kesenjangan Desain dan Implementasi.....143
4.5.5 Skor Evaluasi Desain Kebijakan.....144
4.6 Model Penguatan Ekosistem Kewirausahaan UMKM.....145
4.6.1 Model Penguatan Terintegrasi.....145
4.6.2 Model Alur Optimalisasi Inkubator Dopat.....146
4.6.3 Model Alur Optimalisasi Klinik UMKM.....147
4.6.4 Model Alur Optimalisasi Klinik UMKM Daha Barat.....148
4.6.5 Model Alur Optimalisasi Kampung Kuliner.....148
4.6.6 Model Alur Optimalisasi KURELA SEHATI.....149
4.6.7 Model Alur Optimalisasi GIAT UMKM GO ON.....150
4.6.8 Model Alur Optimalisasi MAU SOP IGA.....150
4.6.9 Skema Kelembagaan Lintas OPD.....151
4.7 Rekomendasi Kebijakan.....152
4.7.1 Rekomendasi Teknis per Inovasi.....152

4.7.2 Rekomendasi Kebijakan Daerah.....152
4.7.2.1 Penguatan Domain Pembiayaan melalui Kemitraan Afirmatif .153
4.7.2.2 Penyusunan Regulasi Insentif Fiskal UMKM 153
4.7.2.3 Integrasi Data Kinerja UMKM Lintas OPD.....153
4.7.3 Rekomendasi Inovasi Baru 153
4.7.4 Peta Jalan Implementasi 154
4.7.5 Skenario Keberlanjutan 154

BAB V PENUTUP.....157
5.1 Capaian Inovasi di Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 157
5.2 Kesimpulan 158
5.3 Saran 159
5.4 Keterbatasan Kajian.....159

DAFTAR PUSTAKA.....160

LAMPIRAN.....161
Lampiran 1. Daftar Lengkap 22 Inovasi Kandidat Berorientasi.....161
Lampiran 2. Daftar Singkatan.....162
Lampiran 3. Catatan Pemutakhiran Data Rekapitulasi Inovasi 162
Lampiran 4. Daftar Istilah dalam Bahasa Sehari-hari.....165

DAFTAR TABEL

Tabel A.1 Populasi 22 Inovasi Kandidat Berorientasi Ekonomi 29
Tabel A.2 Kriteria Penyaringan Tahap I - Relevansi Tematik.....30
Tabel A.3 Kriteria Penyaringan Tahap II - Kelengkapan Data.....31
Tabel A.4 Hasil Penyaringan dan Penetapan Dua Belas Inovasi Prioritas 32
Tabel A.5 Indikator Evaluasi per Domain Ekosistem Kewirausahaan 34
Tabel A.6 Bobot Dimensi Evaluasi Desain Kebijakan 34
Tabel A.7 Skor Mentah Empat Dimensi Evaluatif 35
Tabel A.8 Rincian Kontribusi Tertimbang dan Skor Komposit 35
Tabel A.9 Peringkat Skor Komposit Dua Belas Inovasi Prioritas 37
Tabel A.10 Profil Ringkas 22 Inovasi Kandidat Berorientasi Ekonomi HSS 42
Tabel A.11 Keterkaitan Tidak Langsung Sepuluh Inovasi Kandidat 46
Tabel A.12 Pemetaan Kesesuaian 22 Inovasi Kandidat terhadap Asta Cita.....49
Tabel A.13 Cakupan Asta Cita yang Terbentuk dari Inovasi Daerah.....51
Tabel A.14 Profil Inovasi Inkubator Dopat.....54
Tabel A.15 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 55
Tabel A.16 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 56
Tabel A.17 Capaian Inovasi.....57
Tabel A.18 Capaian Inovasi.....58
Tabel A.19 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 19).....59
Tabel A.20 Profil Inovasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan.....60
Tabel A.21 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 61
Tabel A.22 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 62
Tabel A.23 Capaian Inovasi.....64
Tabel A.24 Capaian Inovasi.....65
Tabel A.25 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 25).....65
Tabel A.26 Profil Inovasi Klinik UMKM.....67
Tabel A.27 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 68
Tabel A.28 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 68
Tabel A.29 Capaian Inovasi.....70
Tabel A.30 Capaian Inovasi.....71
Tabel A.31 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 31).....71
Tabel A.32 Profil Inovasi SADATU.....72
Tabel A.33 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 74
Tabel A.34 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 74

Tabel A.35 Capaian Inovasi 76
Tabel A.36 Capaian Inovasi 76
Tabel A.37 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 37) 77
Tabel A.38 Profil Inovasi GIAT UMKM GO ON 78
Tabel A.39 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 80
Tabel A.40 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 81
Tabel A.41 Capaian Inovasi 82
Tabel A.42 Capaian Inovasi 83
Tabel A.43 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 43) 83
Tabel A.44 Profil Inovasi TERASA BERKAH 84
Tabel A.45 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 86
Tabel A.46 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 87
Tabel A.47 Capaian Inovasi 88
Tabel A.48 Capaian Inovasi 89
Tabel A.49 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 49) 89
Tabel A.50 Profil Inovasi Kampung Kuliner 90
Tabel A.51 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 92
Tabel A.52 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 92
Tabel A.53 Capaian Inovasi 94
Tabel A.54 Capaian Inovasi 94
Tabel A.55 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 55) 95
Tabel A.56 Profil Inovasi MAU SOP IGA 96
Tabel A.57 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 97
Tabel A.58 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 98
Tabel A.59 Capaian Inovasi 99
Tabel A.60 Capaian Inovasi 100
Tabel A.61 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 61) 101
Tabel A.62 Profil Inovasi SILAPIS 102
Tabel A.63 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 103
Tabel A.64 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 104
Tabel A.65 Capaian Inovasi 105
Tabel A.66 Capaian Inovasi 106
Tabel A.67 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 67) 107
Tabel A.68 Profil Inovasi KUBAR 108
Tabel A.69 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 109

Tabel A.70 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 110
Tabel A.71 Capaian Inovasi.....111
Tabel A.72 Capaian Inovasi.....112
Tabel A.73 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 73).....112
Tabel A.74 Profil Inovasi PETA DASEL.....114
Tabel A.75 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 115
Tabel A.76 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 115
Tabel A.77 Capaian Inovasi.....117
Tabel A.78 Capaian Inovasi.....118
Tabel A.79 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 79).....118
Tabel A.80 Profil Inovasi KURELA SEHATI 120
Tabel A.81 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 121
Tabel A.82 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 121
Tabel A.83 Capaian Inovasi.....123
Tabel A.84 Capaian Inovasi.....123
Tabel A.85 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 85).....124
Tabel A.86 Ringkasan Kekuatan dan Kelemahan per Domain.....133
Tabel A.87 Pemetaan Keselarasan dengan Elemen Visi RPJMD 2025-2029 138
Tabel A.88 Status Landasan Regulasi/Kelembagaan Dua Belas Inovasi 141
Tabel A.89 Kesenjangan Desain dan Implementasi 143
Tabel A.90 Skema Peran Kelembagaan Lintas OPD.....151
Tabel A.91 Ringkasan Rekomendasi Teknis per Inovasi 152
Tabel A.92 Peta Jalan Implementasi Tiga Fase 154
Tabel A.93 Skenario Keberlanjutan Implementasi Rekomendasi 155
Tabel A.94 Hasil Rekapitulasi Inovasi Daerah Tahun 2026 di Kabupaten 157
Tabel A.95 Lampiran 1. Daftar Lengkap 22 Inovasi Kandidat Berorientasi 161
Tabel A.96 Lampiran 2. Daftar Singkatan (Singkatan) 162
Tabel A.97 Lampiran 3. Catatan Pemutakhiran Data Rekapitulasi Inovasi 163
Tabel A.98 Lampiran 4. Daftar Istilah dalam Bahasa Sehari-hari (Istilah) 165

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1 Kerangka Enam Domain Ekosistem Kewirausahaan 23
Gambar A.2 Kerangka Pikir Kajian 26
Gambar A.3 Alur Metodologi Penyaringan Dua Tahap 33
Gambar A.4 Peringkat Skor Komposit Evaluasi Desain Kebijakan Dua Belas 37
Gambar A.5 Distribusi 22 Inovasi Kandidat Berdasarkan Sub-Klaster 43
Gambar A.6 Porsi Inovasi Kandidat Berorientasi Ekonomi Berdasarkan 44
Gambar A.7 Ilustrasi Inkubator Dopat 55
Gambar A.8 Ilustrasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan 61
Gambar A.9 Ilustrasi Klinik UMKM 68
Gambar A.10 Ilustrasi SADATU 73
Gambar A.11 Ilustrasi GIAT UMKM GO ON 80
Gambar A.12 Ilustrasi TERASA BERKAH 86
Gambar A.13 Ilustrasi Kampung Kuliner 91
Gambar A.14 Ilustrasi MAU SOP IGA 97
Gambar A.15 Ilustrasi SILAPIS 103
Gambar A.16 Ilustrasi KUBAR 109
Gambar A.17 Ilustrasi PETA DASEL 115
Gambar A.18 Ilustrasi KURELA SEHATI 121
Gambar A.19 Peta Cakupan (Heatmap) Domain Ekosistem Kewirausahaan Dua 126
Gambar A.20 Tingkat Keterisian Domain Ekosistem Kewirausahaan 133
Gambar A.21 Analisis SWOT Gabungan Desain Kebijakan Ekosistem 135
Gambar A.22 Model Ekosistem Kewirausahaan Terpadu UMKM Kabupaten HSS 146
Gambar A.23 Model Alur Optimalisasi Inkubator Dopat 146
Gambar A.24 Model Alur Optimalisasi Klinik UMKM 147
Gambar A.25 Model Alur Optimalisasi Klinik UMKM Daha Barat 148
Gambar A.26 Model Alur Optimalisasi Kampung Kuliner 148
Gambar A.27 Model Alur Optimalisasi KURELA SEHATI 149
Gambar A.28 Model Alur Optimalisasi GIAT UMKM GO ON 150
Gambar A.29 Model Alur Optimalisasi MAU SOP IGA 150
Gambar A.30 Peta Jalan Implementasi Tiga Fase 154

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang secara aktif mendorong lahirnya inovasi daerah sebagai alat percepatan pembangunan. Berdasarkan rekapitulasi terbaru, tercatat 214 inovasi daerah yang telah dikelompokkan ke dalam delapan kategori Asta Cita, dengan sebaran: Asta Cita 1 (ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM) sebanyak 2 inovasi; Asta Cita 2 (pertahanan keamanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta ekonomi kreatif, hijau, dan biru) sebanyak 11 inovasi; Asta Cita 3 (lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur) sebanyak 20 inovasi; Asta Cita 4 (pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender) sebanyak 70 inovasi; Asta Cita 5 (hilirisasi dan industrialisasi) belum terisi; Asta Cita 6 (membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan) sebanyak 8 inovasi; Asta Cita 7 (reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba) sebanyak 100 inovasi; serta Asta Cita 8 (keharmonisan dengan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi antarumat beragama) sebanyak 3 inovasi.

Pindahnya pengelompokan inovasi ke Asta Cita bukan sekadar urusan administrasi. Asta Cita adalah delapan misi Presiden periode 2025-2029 yang menerjemahkan visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, kedelapan misi itu ditetapkan menjadi delapan prioritas nasional. RPJMN kemudian menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis kementerian/lembaga sekaligus RPJMD provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, ketika Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memindahkan basis rekap inovasinya dari lima perspektif menjadi delapan Asta Cita, inovasi daerah tidak lagi berdiri sendiri. Ia menjadi ujung pelaksana dari rantai prioritas pembangunan nasional.

Perubahan ini memunculkan pertanyaan baru yang belum dijawab kajian-kajian sebelumnya: apakah kategori Asta Cita yang melekat pada setiap inovasi benar-benar sesuai dengan isi yang dikerjakannya? Pertanyaan ini penting karena kategori menentukan ke prioritas nasional mana capaian sebuah inovasi dilaporkan, ke mana anggaran diarahkan, dan perangkat daerah mana yang dianggap berkontribusi. Kalau kategorinya keliru, capaian nyata sebuah inovasi terhitung di prioritas yang salah. Sebaliknya, prioritas yang sebenarnya dikerjakan justru terlihat kosong dalam laporan. Hal seperti ini sudah terlihat pada rekap Kabupaten HSS: Asta Cita 5 tentang hilirisasi dan peningkatan nilai tambah tercatat nol inovasi, padahal beberapa inovasi yang sedang berjalan justru mengerjakan agenda itu.

Asta Cita 3 berisi 20 inovasi yang menyentuh urusan ketenagakerjaan, pariwisata, ekonomi kreatif, infrastruktur, dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ditambah 2 inovasi dari kategori lain yang isinya menyasar pelaku usaha, yaitu MAU SOP IGA dan Sekolah Koperasi Desa HSS. UMKM sendiri punya posisi penting dalam ekonomi Kabupaten HSS sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dan penggerak ekonomi rakyat. Namun UMKM tidak bisa tumbuh dan naik kelas hanya karena ada program pembinaan yang berdiri sendiri. Yang menentukan adalah sehat atau tidaknya lingkungan usaha di sekitarnya, yaitu ada tidaknya kebijakan yang mendukung, akses modal, budaya berwirausaha, layanan pendampingan, kualitas sumber daya manusia, dan keterbukaan pasar.

Isenberg (2010) memperkenalkan kerangka ekosistem kewirausahaan (entrepreneurial *ecosystem*) yang menyatakan bahwa pertumbuhan kewirausahaan suatu daerah bergantung pada interaksi enam domain: kebijakan (policy), pembiayaan (finance), budaya (culture), dukungan (supports), sumber daya manusia (human capital), dan pasar (markets). Spigel (2017) memperkuat kerangka ini dengan menekankan bahwa domain-domain tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung (interdependent) - kelemahan pada satu domain dapat menghambat efektivitas domain lainnya, meskipun program pembinaan pada domain tertentu telah berjalan optimal.

Kajian-kajian evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan sebelumnya di Kabupaten HSS umumnya bersifat penggambaran dan evaluasi, menilai kinerja masing-masing inovasi secara individual berdasarkan capaian kuantitatif dan kualitatifnya. Pendekatan tersebut memberikan gambaran capaian program, namun belum secara jelas menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: apakah desain kebijakan inovasi daerah yang ada telah dirancang untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan secara menyeluruh, ataukah masih jalan sendiri-sendiri dan terfragmentasi pada domain-domain tertentu saja?

Atas dasar kesenjangan tersebut, kajian ini disusun untuk mengevaluasi desain kebijakan inovasi daerah Kabupaten HSS yang yang berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan nilai tambah menggunakan kerangka ekosistem kewirausahaan sebagai alat analisis. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi domain mana yang telah didukung secara memadai oleh desain kebijakan yang ada, serta domain mana yang masih memerlukan penguatan agar UMKM Kabupaten HSS dapat tumbuh dalam ekosistem yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran evaluatif yang sistematis mengenai kualitas desain kebijakan inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan

daya saing UMKM. Kajian diarahkan untuk menilai keterhubungan antara program, dukungan kelembagaan, pembiayaan, budaya kewirausahaan, sumber daya manusia, dan akses pasar sebagai satu kesatuan kebijakan daerah.

1.2.2 Tujuan

1. Mengidentifikasi dan memetakan inovasi daerah Kabupaten HSS yang yang berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan nilai tambah dan relevan terhadap penguatan UMKM dan ekosistem kewirausahaan.
2. Mengevaluasi desain kebijakan inovasi daerah tersebut menggunakan kerangka enam domain ekosistem kewirausahaan.
3. Menilai keselarasan desain kebijakan inovasi daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten HSS 2025-2029.
4. Menilai kesesuaian antara klasifikasi Asta Cita yang melekat pada setiap inovasi dengan substansi yang dikerjakannya, serta memetakan Asta Cita mana saja yang secara nyata terbentuk dari inovasi daerah Kabupaten HSS.
5. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan model penguatan ekosistem kewirausahaan UMKM Kabupaten HSS berdasarkan kesenjangan domain yang teridentifikasi.

1.2.3 Sasaran

Sasaran analitis kajian ini adalah tersusunnya jawaban yang terukur atas lima fokus evaluasi berikut:

1. Bagaimana profil dan karakteristik inovasi daerah Kabupaten HSS yang yang berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan nilai tambah dan relevan terhadap penguatan UMKM dan ekosistem kewirausahaan?
2. Bagaimana desain kebijakan inovasi daerah tersebut menjangkau enam domain ekosistem kewirausahaan (kebijakan, pembiayaan, budaya, dukungan, sumber daya manusia, dan pasar)?
3. Sejauh mana desain kebijakan inovasi daerah tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten HSS 2025-2029?
4. Sejauh mana klasifikasi Asta Cita pada setiap inovasi sesuai dengan substansinya, dan Asta Cita apa saja yang secara nyata terbentuk dari inovasi daerah Kabupaten HSS?
5. Domain ekosistem kewirausahaan apa yang mengalami kesenjangan (gap) dalam desain kebijakan yang ada, dan apa rekomendasi penguatannya?

1.3 Dasar Hukum

Pelaksanaan kajian ini mengacu pada landasan kebijakan dan dokumen perencanaan yang tercantum dalam naskah kajian, yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (penetapan delapan Asta Cita sebagai prioritas nasional).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029.
4. Rekap Inovasi Daerah Per Kategori Asta Cita Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Kajian ini dibatasi pada 22 inovasi daerah Kabupaten HSS yang berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan nilai tambah, diambil dari rekap resmi 214 inovasi menurut kategori Asta Cita. Melalui penyaringan dua tahap seperti dijelaskan pada Bab III, terpilih 12 inovasi prioritas yang dibahas mendalam: Inkubator Dopat, Sekolah Koperasi Desa HSS, Klinik UMKM, SADATU, GIAT UMKM GO ON, TERASA BERKAH, Kampung Kuliner, MAU SOP IGA, SILAPIS, Klinik UMKM Daha Barat, PETA DASEL, dan KURELA SEHATI. Sepuluh inovasi sisanya, yang temanya lebih dekat ke ketenagakerjaan formal, pariwisata, infrastruktur, pengadaan, atau keolahragaan, tidak dibahas mendalam. Meskipun begitu, kesepuluhnya tetap dibahas singkat pada Subbab 4.2.2 untuk melihat kaitan tidak langsungnya dengan UMKM.

1.4.2 Ruang Lingkup Lokasi

Lokasi kajian mencakup wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan fokus pada perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan yang menjadi penanggung jawab atau penggerak dua belas inovasi prioritas.

1.4.3 Ruang Lingkup Data

Data kajian meliputi rekapitulasi resmi 214 inovasi daerah menurut kategori Asta Cita, populasi 22 inovasi kandidat yang berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan nilai tambah, serta uraian isi dan data kinerja dua belas inovasi prioritas yang memenuhi kriteria relevansi dan kelengkapan data.

1.5 Keluaran dan Manfaat

1.5.1 Keluaran

Keluaran utama kajian adalah dokumen laporan akhir yang memuat profil inovasi, hasil monitoring dan evaluasi desain kebijakan, pemetaan enam domain ekosistem kewirausahaan, analisis kesenjangan, model penguatan, rekomendasi teknis per inovasi, rekomendasi kebijakan daerah, serta peta jalan implementasi.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan memperkaya kajian penerapan kerangka ekosistem kewirausahaan dalam konteks evaluasi desain kebijakan inovasi daerah di Indonesia, khususnya pada level kabupaten dengan karakteristik ekonomi berbasis UMKM dan sumber daya lokal.

1.5.3 Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah Kabupaten HSS: menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan desain kebijakan inovasi daerah yang berorientasi pada penguatan ekosistem kewirausahaan secara menyeluruh.
- Bagi Bapperida: menjadi rujukan dalam sinkronisasi program lintas-OPD terkait penguatan UMKM dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD).
- Bagi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian serta OPD terkait lainnya: menjadi dasar evaluasi dan pengembangan program pembinaan UMKM yang lebih terintegrasi.
- Bagi akademisi dan peneliti: menjadi rujukan metodologis dalam penerapan kerangka ekosistem kewirausahaan pada evaluasi kebijakan daerah lainnya.

1.6 Sistematika Pembahasan

Laporan ini terdiri atas lima bab. Bab I berisi latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, dasar hukum, ruang lingkup, keluaran, manfaat, dan sistematika. Bab II berisi teori tentang inovasi pemerintah daerah, ekosistem kewirausahaan, evaluasi rancangan kebijakan, Asta Cita sebagai kerangka prioritas nasional, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir kajian. Bab III menjelaskan metode, lokasi, sumber data, cara memilih inovasi, cara mengumpulkan data, alat penilaian, dan hasil penilaiannya. Bab IV berisi seluruh pembahasan, mulai dari gambaran umum inovasi ekonomi, kesesuaian dengan Asta Cita, hasil evaluasi rancangan kebijakan, keselarasan dengan dokumen perencanaan, model penguatan ekosistem, sampai rekomendasi dan peta jalan. Bab V berisi capaian kajian, kesimpulan, saran, dan keterbatasan.

BAB 2
KAJIAN TEORI

EVALUASI DESAIN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
BERBASIS EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGUATAN
UMKM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB II
KAJIAN TEORI

2.1 Inovasi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Inovasi

Inovasi daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik, guna memberikan kemanfaatan bagi daerah dan/atau masyarakat. Inovasi daerah tidak berdiri sebagai program tunggal, melainkan merupakan manifestasi dari desain kebijakan yang dirumuskan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan pembangunan tertentu.

Desain kebijakan (policy design) merujuk pada struktur, instrumen, dan mekanisme yang dipilih pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan (Schneider & Ingram, 1997). Kualitas desain kebijakan tidak semata dinilai dari keberhasilan implementasi program secara individual, melainkan dari sejauh mana desain tersebut koheren, saling melengkapi, dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan agar tujuan kebijakan tercapai secara berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan ekonomi daerah yang menyasar penguatan UMKM, kualitas desain kebijakan idealnya dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut membentuk suatu ekosistem yang mendukung tumbuhnya kewirausahaan, bukan sekadar program bantuan yang terisolasi.

2.2 Ekosistem Kewirausahaan

Konsep ekosistem kewirausahaan dipopulerkan oleh Daniel Isenberg (2010) melalui artikelnya "*How to Start an Entrepreneurial Revolution*" di Harvard Business Review. Isenberg berargumen bahwa kewirausahaan yang tumbuh subur di suatu wilayah bukan hasil dari satu program atau kebijakan tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks dari enam domain yang saling terkait:

- Kebijakan (*Policy*): kepemimpinan, regulasi, dan dukungan kelembagaan pemerintah yang mendorong kewirausahaan, termasuk insentif fiskal dan penyederhanaan birokrasi usaha.
- Pembiayaan (*Finance*): ketersediaan modal, baik melalui perbankan, lembaga keuangan mikro, maupun skema pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha.
- Budaya (*Culture*): norma sosial yang mendukung keberanian mengambil risiko, toleransi terhadap kegagalan usaha, dan kebanggaan atas keberhasilan wirausahawan lokal.

- Dukungan (*Supports*): infrastruktur pendukung non-pemerintah maupun pemerintah, seperti inkubator bisnis, lembaga pendampingan, dan penyedia jasa profesional.
- Sumber Daya Manusia (*Human Capital*): ketersediaan tenaga kerja terampil serta program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang relevan.
- Pasar (*Markets*): akses terhadap jaringan pelanggan, baik pasar lokal maupun digital, serta ketersediaan rantai pasok yang mendukung.

Spigel (2017) memperkuat kerangka ini dengan menekankan sifat interdependensi antar domain - ekosistem kewirausahaan yang sehat tidak dapat dibangun hanya dengan memperkuat satu domain secara terisolasi, karena domain-domain tersebut bersifat saling menopang. Sebagai contoh, program inkubasi bisnis (domain Dukungan) yang kuat tidak akan optimal mendorong pertumbuhan usaha jika tidak diimbangi dengan akses pembiayaan (domain Finance) yang memadai bagi tenant yang telah dibina.

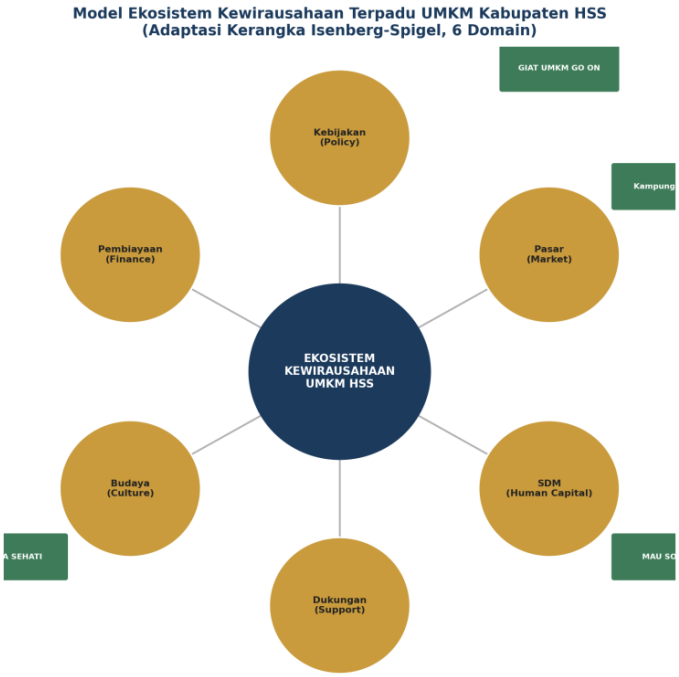

Gambar A.1 Kerangka Enam Domain Ekosistem Kewirausahaan

Kerangka ini dipilih sebagai alat analisis kajian karena kesesuaiannya dengan karakteristik permasalahan UMKM Kabupaten HSS, yang tidak hanya membutuhkan program pembinaan teknis, tetapi juga penguatan pada domain kebijakan dan pembiayaan yang selama ini relatif kurang menjadi fokus program-program yang ada.

2.3 Evaluasi Desain Kebijakan

Evaluasi desain kebijakan dalam kajian ini mengacu pada empat dimensi evaluatif yang diadaptasi dari prinsip evaluasi kebijakan publik (Dunn, 2018) dan disesuaikan dengan konteks ekosistem kewirausahaan:

- Kejelasan Desain Kebijakan (Design Clarity): sejauh mana suatu inovasi memiliki landasan regulasi atau kelembagaan yang jelas dalam pelaksanaannya.
- Cakupan Domain Ekosistem (*Ecosystem* Coverage): jumlah dan kekuatan domain ekosistem kewirausahaan yang tercakup dalam desain inovasi.
- Keterukuran Dampak (Measurability): ketersediaan data kuantitatif yang memungkinkan verifikasi capaian program.
- Keberlanjutan Kelembagaan (Institutional *Sustainability*): kejelasan penanggung jawab dan keberlanjutan anggaran/kelembagaan program.

Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai basis pembobotan dalam skoring komposit inovasi prioritas sebagaimana dijelaskan pada Bab III, dan menjadi rujukan dalam menilai keselarasan desain kebijakan pada Subbab 4.5.

2.4 Penelitian Terdahulu

Kajian evaluasi inovasi daerah Kabupaten HSS sebelumnya - mencakup Perspektif Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Perspektif HAM/Sosial/Politik, serta kajian ekonomi/UMKM berbasis delapan inovasi terpilih - telah memberikan gambaran kinerja individual masing-masing inovasi secara penggambaran dan evaluasi, lengkap dengan skoring komposit berbasis empat dimensi evaluatif dan analisis SWOT. Kajian-kajian tersebut menjadi rujukan metodologis penting, namun belum menempatkan analisis pada kerangka teori ekosistem kewirausahaan yang secara jelas menilai kecukupan cakupan domain dalam desain kebijakan.

Studi penerapan kerangka Isenberg pada level kabupaten/kota di Indonesia - antara lain pada kajian ekosistem kewirausahaan di berbagai daerah berbasis produk unggulan lokal - secara konsisten menemukan pola serupa: domain Dukungan dan Sumber Daya Manusia cenderung menjadi fokus utama program pemerintah daerah, sementara domain Pembiayaan dan Kebijakan (dalam pengertian insentif fiskal keberpihakan) relatif kurang berkembang. Pola ini menjadi salah satu hipotesis awal yang diuji dalam kajian ini terhadap konteks Kabupaten HSS.

2.5 Asta Cita sebagai Kerangka Prioritas Pembangunan Nasional

Asta Cita adalah delapan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yang menerjemahkan visi "Bersama Indonesia Maju,

Menuju Indonesia Emas 2045". Kedelapan misi tersebut ditetapkan sebagai delapan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, sehingga berfungsi sebagai kerangka penyelarasan lintas tingkatan pemerintahan. Rumusan resminya adalah sebagai berikut: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; serta (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Untuk penguatan UMKM, tiga Asta Cita paling berkaitan langsung. Asta Cita 3 adalah rumah utama agenda kewirausahaan, industri kreatif, dan penciptaan lapangan kerja. Asta Cita 5 mengurus hilirisasi dan industrialisasi, yang bagi UMKM daerah berarti mengolah bahan mentah menjadi produk yang harganya lebih tinggi. Asta Cita 6 mengurus pembangunan dari desa, yang di lapangan diwujudkan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pemberdayaan BUMDes. Ketiganya berurutan secara logis: usaha tumbuh (Asta Cita 3), produknya naik nilai (Asta Cita 5), lalu manfaatnya merata sampai desa (Asta Cita 6). Asta Cita 2 ikut bersinggungan lewat ekonomi kreatif dan pangan, sedangkan Asta Cita 4 menyentuh sisi kemampuan orangnya.

Asta Cita dan kerangka ekosistem kewirausahaan berbeda fungsi. Asta Cita menunjukkan ke arah mana pembangunan harus bergerak, dan menjadi dasar pelaporan kinerja berjenjang dari daerah ke pusat. Kerangka ekosistem kewirausahaan menjelaskan mengapa sebuah program berhasil atau gagal menumbuhkan usaha, dengan memeriksa kelengkapan enam domain pendukungnya. Kajian ini memakai keduanya. Asta Cita dipakai untuk mengecek ketepatan kategori dan kaitan inovasi dengan prioritas nasional. Kerangka ekosistem dipakai untuk menilai mutu rancangan programnya. Dengan begitu, kajian tidak berhenti pada pertanyaan "apakah inovasi ini sudah sejalan dengan prioritas nasional", tetapi berlanjut ke "apakah rancangannya cukup lengkap untuk benar-benar mewujudkan prioritas itu".

Pemeriksaan seperti ini punya dasar dalam literatur evaluasi kebijakan. Schneider dan Ingram (1997) menyebut bahwa rancangan kebijakan yang baik harus jelas sasarannya, jelas alat yang dipakai, dan jelas hubungan antara keduanya. Ketidakcocokan antara label kebijakan dan isi yang dikerjakan adalah salah satu bentuk kegagalan rancangan yang paling sering luput diperiksa, karena evaluasi biasanya hanya melihat angka capaian. Dalam konteks Asta Cita, ketidakcocokan itu berbentuk salah kategori. Akibatnya ada dua: kategori yang menampung mendapat capaian yang bukan miliknya, sementara kategori yang sebenarnya dikerjakan terlihat kosong dan berisiko kehilangan perhatian serta anggaran pada periode berikutnya.

2.6 Kerangka Pikir Kajian

Kerangka pikir kajian ini bertolak dari populasi 22 inovasi kandidat yang berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan nilai tambah, yang disaring menjadi dua belas inovasi prioritas melalui kriteria relevansi tematik dan kelengkapan data. Kedua belas inovasi tersebut kemudian dipetakan ke dalam enam domain ekosistem kewirausahaan untuk mengidentifikasi pola cakupan dan kesenjangan domain. Hasil pemetaan tersebut dievaluasi keselarasannya dengan RPJMD Kabupaten HSS 2025-2029, sebelum akhirnya dirumuskan menjadi model penguatan ekosistem dan rekomendasi kebijakan yang bersifat operasional bagi Pemerintah Kabupaten HSS.

Gambar A.2 Kerangka Pikir Kajian

BAB 3
METODOLOGI

EVALUASI DESAIN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
BERBASIS EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGUATAN
UMKM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB III
METODOLOGI

3.1 Metode dan Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan evaluasi dengan dukungan analisis kuantitatif sederhana. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memetakan desain kebijakan inovasi ke dalam enam domain ekosistem kewirausahaan, sementara analisis kuantitatif sederhana digunakan dalam penyusunan skor komposit evaluasi desain kebijakan berdasarkan data yang tersedia dari dokumen resmi inovasi daerah.

3.2 Lokasi dan Fokus Kajian

Kajian dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fokus kajian adalah desain kebijakan inovasi daerah yang yang berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan nilai tambah, dengan pengkajian mendalam terhadap dua belas inovasi prioritas yang secara benar-benar berhubungan dengan penguatan UMKM dan ekosistem kewirausahaan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data utama kajian ini bersumber dari dokumen resmi "Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita" Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang memuat 214 inovasi daerah terkini yang telah dikelompokkan berdasarkan substansi ke dalam delapan kategori Asta Cita. Dokumen ini menggantikan rekapitulasi lima perspektif yang digunakan pada penyusunan awal kajian, sehingga seluruh angka populasi, daftar inovasi, nomenklatur perangkat daerah, dan data capaian pada laporan ini telah dimutakhirkan mengikuti sumber terbaru tersebut. Kajian ini secara khusus menggunakan data pada sheet "Final Data", mencakup kolom nama inovasi, uraian singkat, manfaat/dampak inovasi, SKPD/unit kerja penanggung jawab, serta PIC/narahubung.

3.4 Populasi dan Seleksi Inovasi

Populasi kajian ini adalah 22 inovasi kandidat yang berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan nilai tambah, terdiri atas 20 inovasi pada kategori Asta Cita 3 (lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur) serta 2 inovasi lintas kategori yang dari sisi isinya menyasar pelaku usaha - MAU SOP IGA (Asta Cita 2) dan Sekolah Koperasi Desa HSS (Asta Cita 4) - sebagaimana disajikan pada Tabel 3. 1.

Tabel A.1 Populasi 22 Inovasi Kandidat Berorientasi Ekonomi

No	Nama Inovasi	Sub-Klaster Tematik (Hasil Kajian)
1	SiOPEN HSS	Tata Kelola Pengadaan
2	Gebrak Sehati	Infrastruktur & Utilitas Publik
3	DETAK PJU+	Infrastruktur & Utilitas Publik
4	TERASA BERKAH	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
5	Kampung Kuliner	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
6	Klinik UMKM	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
7	Inkubator Dopat	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
8	SADATU	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
9	SI PANDU WISATA V2.0	Pariwisata
10	SIMBIOSIS	Sektor Lain (Keolahragaan)
11	SIMPAI	Pariwisata
12	HSS TRIP	Pariwisata
13	KURELA SEHATI	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
14	SILAPIS	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
15	Klinik UMKM Daha Barat (KUBAR)	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
16	PETA DASEL	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
17	SI LOWIS	Pariwisata
18	PACARKU	Ketenagakerjaan
19	GIAT UMKM GO ON	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
20	SI TIMELINE RS BHHB	Ketenagakerjaan
21	MAU SOP IGA	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
22	Sekolah Koperasi Desa HSS	UMKM & Kewirausahaan (Inti)

Mengingat tidak seluruh inovasi pada perspektif ini dari sisi isinya relevan terhadap penguatan UMKM dan ekosistem kewirausahaan - beberapa di antaranya lebih dekat dengan isu ketenagakerjaan formal, pariwisata, atau sektor kesehatan - kajian ini menerapkan metodologi penyaringan dua tahap untuk menetapkan inovasi fokus yang dianalisis secara mendalam.

3.4.1 Tahap I: Penyaringan Relevansi Tematik

Tahap pertama menyaring inovasi berdasarkan kriteria relevansi tematik: apakah fokus utama substansi inovasi adalah pembinaan, pendampingan, atau

penguatan langsung pelaku usaha UMKM/kewirausahaan, ataukah termasuk domain lain (ketenagakerjaan formal, pariwisata, kesehatan, atau tidak teridentifikasi).

Tabel A.2 Kriteria Penyaringan Tahap I - Relevansi Tematik

Inovasi	Fokus Utama Substansi	Relevan ?
SiOPEN HSS	Digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Tidak
Gebrak Sehati	Penyediaan sarana sanitasi dan air minum bagi MBR	Tidak
DETAK PJU+	Pengawasan partisipatif penerangan jalan umum	Tidak
TERASA BERKAH	Layanan tera/tera ulang jemput bola bagi pedagang pasar	Ya
Kampung Kuliner	Kawasan ekonomi pedagang kuliner	Ya
Klinik UMKM	Pendampingan langsung pelaku UMKM	Ya
Inkubator Dopat	Inkubasi bisnis pelaku usaha lokal	Ya
SADATU	Basis data dan pemetaan UMKM terpadu	Ya
SI PANDU WISATA V2.0	Sistem pelayanan dan promosi pariwisata	Tidak
SIMBIOSIS	Manajemen data pembinaan olahraga dan prestasi	Tidak
SIMPAI	Sistem informasi pariwisata terintegrasi	Tidak
HSS TRIP	Integrasi jalur wisata tematik	Tidak
KURELA SEHATI	Komunitas pelaku ekonomi kreatif	Ya
SILAPIS	Pelaporan keuangan dan inkubasi bisnis pelaku usaha	Ya
Klinik UMKM Daha Barat (KUBAR)	Pendampingan pelaku UMKM tingkat kecamatan	Ya
PETA DASEL	Pemetaan potensi ekonomi dan UMKM desa	Ya
SI LOWIS	Pelaporan data kunjungan wisata kecamatan	Tidak
PACARKU	Platform pencari kerja tingkat kelurahan	Tidak
GIAT UMKM GO ON	Pendataan dan digitalisasi UMKM kelurahan	Ya
SI TIMELINE RS BHHB	Rekrutmen pegawai daring rumah sakit	Tidak
MAU SOP IGA	Hilirisasi produk perikanan oleh kelompok usaha	Ya
Sekolah Koperasi Desa HSS	Peningkatan kapasitas koperasi desa/kelurahan	Ya

Penyaringan Tahap I meloloskan 12 inovasi yang temanya cocok dengan UMKM: Inkubator Dopat, Sekolah Koperasi Desa HSS, Klinik UMKM, SADATU, GIAT UMKM GO ON, TERASA BERKAH, Kampung Kuliner, MAU SOP IGA, SILAPIS, Klinik UMKM Daha Barat, PETA DASEL, dan KURELA SEHATI. Sepuluh inovasi lainnya tidak dilanjutkan ke pembahasan mendalam karena isi utamanya di luar urusan UMKM dan kewirausahaan, tetapi tetap dibahas singkat pada Subbab 4.2.2. Ada catatan penting di sini. Pada penyusunan awal, SILAPIS dan SIMBIOSIS gugur karena uraian isinya kosong. Pada rekap terbaru uraian keduanya sudah lengkap. Ternyata SILAPIS memang berkaitan dengan UMKM sebagai sistem pelaporan keuangan dan inkubasi bisnis, sehingga masuk daftar prioritas. Sedangkan SIMBIOSIS ternyata sistem pembinaan olahraga, sehingga tetap di luar fokus kajian.

3.4.2 Tahap II: Penyaringan Kelengkapan Data

Tahap kedua memverifikasi kelengkapan data pada dua belas inovasi yang lolos Tahap I, guna memastikan seluruh inovasi fokus memiliki uraian isi dan data dampak yang memadai untuk dianalisis.

Tabel A.3 Kriteria Penyaringan Tahap II - Kelengkapan Data

Inovasi	Uraian Isi	Data Dampak Kuantitatif	Status
Inkubator Dopat	Lengkap	Ada (omzet, keuntungan, serapan kerja)	Lolos
Sekolah Koperasi Desa HSS	Lengkap	Ada (148 KDKMP, akta, NPWP, NIB, RAT)	Lolos
Klinik UMKM	Lengkap	Ada (persentase naik kelas)	Lolos
SADATU	Lengkap	Belum tersedia (sistem baru berjalan)	Lolos
GIAT UMKM GO ON	Lengkap	Tidak lengkap (placeholder jumlah UMKM)	Lolos
TERASA BERKAH	Lengkap	Sebagian (naratif monitoring, tanpa angka)	Lolos
Kampung Kuliner	Lengkap	Sebagian (jumlah pedagang, bukan omzet)	Lolos
MAU SOP IGA	Lengkap	Tidak ada (kualitatif)	Lolos
SILAPIS	Lengkap	Belum tersedia (sistem baru berjalan)	Lolos
Klinik UMKM Daha Barat	Lengkap	Tidak ada (kualitatif)	Lolos
PETA DASEL	Lengkap	Belum tersedia (basis data tahap awal)	Lolos

Inovasi	Uraian Isi	Data Dampak Kuantitatif	Status
KURELA SEHATI	Lengkap	Ada (data pembanding PDRB, bukan capaian program)	Lolos

Seluruh dua belas inovasi hasil Tahap I dinyatakan lolos Tahap II karena memiliki uraian isi yang memadai untuk dikaji, meskipun tingkat kelengkapan data kuantitatifnya bervariasi. Variasi keterukuran dampak ini selanjutnya menjadi salah satu dimensi evaluatif dalam skoring komposit (lihat sub-bab 3.5), sekaligus menjadi salah satu temuan penting kajian terkait kesenjangan keterbukaan data (lihat Subbab 4.4 dan VI).

Tabel A.4 Hasil Penyaringan dan Penetapan Dua Belas Inovasi Prioritas

No	Inovasi	OPD/Kelembagaan Penanggung Jawab
1	Inkubator Dopat	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Sekolah Koperasi Desa HSS	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Klinik UMKM	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	SADATU	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	GIAT UMKM GO ON	Kelurahan Kandangan Utara
6	TERASA BERKAH	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Kampung Kuliner	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	MAU SOP IGA	Kecamatan Daha Selatan
9	SILAPIS	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
10	Klinik UMKM Daha Barat	Kecamatan Daha Barat
11	PETA DASEL	Kecamatan Daha Selatan
12	KURELA SEHATI	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Gambar A.3 Alur Metodologi Penyaringan Dua Tahap

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kompilasi data sekunder. Dokumen yang dikaji mencakup rekapitulasi inovasi daerah, uraian isi setiap inovasi, data dampak kuantitatif yang tersedia, dokumen perencanaan daerah, serta informasi kelembagaan dan regulasi yang relevan. Seluruh data kemudian diverifikasi secara internal melalui pencocokan antardokumen sebelum digunakan dalam proses pemetaan dan skoring.

Selain dokumen inovasi dan rekap kinerja program, kajian ini juga membaca dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku. Dokumen tersebut adalah RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2045 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024), RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025), RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2026, serta RPJMN 2025-2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025). Dokumen-dokumen ini dipakai untuk mengecek apakah arah kebijakan nyambung dari tingkat nasional, jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, sampai agenda tahunan daerah.

Indikator keberhasilan daerah dibaca dalam tiga tingkat. Tingkat pertama adalah hasil langsung inovasi, misalnya berapa pelaku usaha yang didata, dilatih, didampingi, diurus legalitasnya, atau dibantu masuk pasar. Tingkat kedua adalah hasil program, misalnya kenaikan omzet, produktivitas, perluasan pasar, akses modal, usaha yang bertahan, dan tenaga kerja yang terserap. Tingkat ketiga adalah dampak pembangunan daerah, misalnya pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, kenaikan pendapatan per kapita, kenaikan nilai tambah sektor unggulan, dan penguatan kemandirian fiskal. Pemisahan ini perlu supaya capaian program tidak langsung diklaim sebagai penyebab berubahnya angka-angka besar itu tanpa bukti yang memadai.

3.6 Instrumen dan Indikator Evaluasi

Pemetaan cakupan domain ekosistem kewirausahaan pada Subbab 4.4 dilakukan menggunakan indikator observasi sebagaimana disajikan pada Tabel 3. 5. Setiap domain dinilai pada skala kualitatif Tidak Ada - Lemah - Sedang - Kuat berdasarkan keberadaan indikator dalam uraian isi dan manfaat/dampak masing-masing inovasi.

Tabel A.5 Indikator Evaluasi per Domain Ekosistem Kewirausahaan

Domain	Indikator yang Ditelaah
Kebijakan (Policy)	Keberadaan regulasi/SK/kelembagaan formal, kejelasan mandat OPD
Pembiayaan (Finance)	Keterlibatan lembaga perbankan/keuangan, skema akses permodalan
Budaya (Culture)	Pembentukan komunitas/wadah kolaborasi, narasi keberanian usaha
Dukungan (Support)	Layanan pendampingan, konsultasi, inkubasi, fasilitasi sarana
SDM (Human Capital)	Pelatihan, bimtek, magang, atau peningkatan kapasitas pelaku usaha
Pasar (Market)	Akses pemasaran digital/*offline*, data kunjungan/pelanggan/omzet

3.7 Teknik Analisis Data

Skor komposit evaluasi desain kebijakan dihitung menggunakan empat dimensi evaluatif yang telah dijelaskan pada subbab 2.3, dengan bobot sebagaimana disajikan pada Tabel 3. 6. Bobot tertinggi diberikan pada Cakupan Domain Ekosistem (0,30) mengingat kajian ini secara khusus menekankan kelengkapan cakupan domain sebagai indikator utama kualitas desain kebijakan berbasis ekosistem kewirausahaan.

Tabel A.6 Bobot Dimensi Evaluasi Desain Kebijakan

Dimensi Evaluatif	Bobot
Kejelasan Desain Kebijakan (Design Clarity)	0,25
Cakupan Domain Ekosistem (*Ecosystem* Coverage)	0,30
Keterukuran Dampak (Measurability)	0,25
Keberlanjutan Kelembagaan (Institutional *Sustainability*)	0,20
Total	1,00

Tabel 3. 7 menyajikan skor mentah (skala 1-5) setiap dimensi evaluatif untuk kedua belas inovasi prioritas, berdasarkan kajian kualitatif tim kajian atas uraian isi dan data dampak masing-masing inovasi.

Tabel A.7 Skor Mentah Empat Dimensi Evaluatif

Inovasi	Kejelasan Desain	Cakupan Domain	Keterukuran Dampak	Keberlanjutan Kelembagaan
Inkubator Dopat	4	4	5	4
Sekolah Koperasi Desa HSS	4	3	5	5
Klinik UMKM	4	3	4	4
SADATU	4	4	2	4
GIAT UMKM GO ON	4	4	3	2
TERASA BERKAH	4	3	2	4
Kampung Kuliner	3	3	4	2
MAU SOP IGA	4	3	2	3
SILAPIS	3	3	2	3
Klinik UMKM Daha Barat	3	3	2	2
PETA DASEL	4	2	2	2
KURELA SEHATI	2	3	2	2

Tabel A.8 Rincian Kontribusi Tertimbang dan Skor Komposit

Inovasi	Desain (×0,25)	Cakupan (×0,30)	Keterukuran (×0,25)	Keberlanjutan (×0,20)	Total
Inkubator Dopat	1,00	1,20	1,25	0,80	4,25
Sekolah Koperasi Desa HSS	1,00	0,90	1,25	1,00	4,15
Klinik UMKM	1,00	0,90	1,00	0,80	3,70
SADATU	1,00	1,20	0,50	0,80	3,50
GIAT UMKM GO ON	1,00	1,20	0,75	0,40	3,35

Inovasi	Desain (×0,25)	Cakupan (×0,30)	Keterukuran (×0,25)	Keberlanjutan (×0,20)	Total
TERASA BERKAH	1,00	0,90	0,50	0,80	3,20
Kampung Kuliner	0,75	0,90	1,00	0,40	3,05
MAU SOP IGA	1,00	0,90	0,50	0,60	3,00
SILAPIS	0,75	0,90	0,50	0,60	2,75
Klinik UMKM Daha Barat	0,75	0,90	0,50	0,40	2,55
PETA DASEL	1,00	0,60	0,50	0,40	2,50
KURELA SEHATI	0,50	0,90	0,50	0,40	2,30

Rincian perhitungan ini memungkinkan pihak lain - termasuk Bapperida, Dinas Koperasi UKM Perindustrian, maupun DPRD - untuk menelusuri ulang (jejak penelusuran) setiap angka skor komposit yang dihasilkan.

Selain skoring komposit, analisis dilakukan melalui tabel keterpaduan kebijakan. Setiap temuan dibandingkan dengan orientasi RPJMN 2025-2029, arah transformasi dalam RPJPD HSS 2025-2045, visi dan sasaran RPJMD HSS 2025-2029, serta fungsi operasional RKPD 2026 sebagai dokumen tahunan. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan tingkat cakupan antardokumen, melainkan untuk menguji apakah inovasi yang berjalan memiliki jalur kontribusi yang logis: dari kegiatan dan keluaran inovasi, menuju hasil program perangkat daerah, kemudian menuju indikator kinerja daerah.

Pembacaan keterkaitan dengan indikator kinerja daerah, kajian menerapkan prinsip ikut menyumbang, bukan menjadi penyebab tunggal. Suatu inovasi dinyatakan relevan apabila mekanisme kegiatannya secara rasional dapat mendukung indikator tertentu dan tersedia bukti keluaran atau hasil yang searah. Sebaliknya, kajian tidak menyatakan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, atau pendapatan per kapita sepenuhnya disebabkan oleh dua belas inovasi prioritas karena indikator makro dipengaruhi oleh banyak kebijakan, kondisi pasar, investasi, transfer fiskal, serta dinamika ekonomi di luar kendali program.

3.8 Hasil Skoring dan Penetapan Inovasi Prioritas

Berdasarkan pembobotan pada Tabel 3. 6 dan rincian perhitungan pada Tabel 3. 8, diperoleh peringkat skor komposit evaluasi desain kebijakan sebagai berikut.

Tabel A.9 Peringkat Skor Komposit Dua Belas Inovasi Prioritas

Inovasi	Skor Komposit	Peringkat
Inkubator Dopat	4,25	1
Sekolah Koperasi Desa HSS	4,15	2
Klinik UMKM	3,70	3
SADATU	3,50	4
GIAT UMKM GO ON	3,35	5
TERASA BERKAH	3,20	6
Kampung Kuliner	3,05	7
MAU SOP IGA	3,00	8
SILAPIS	2,75	9
Klinik UMKM Daha Barat	2,55	10
PETA DASEL	2,50	11
KURELA SEHATI	2,30	12

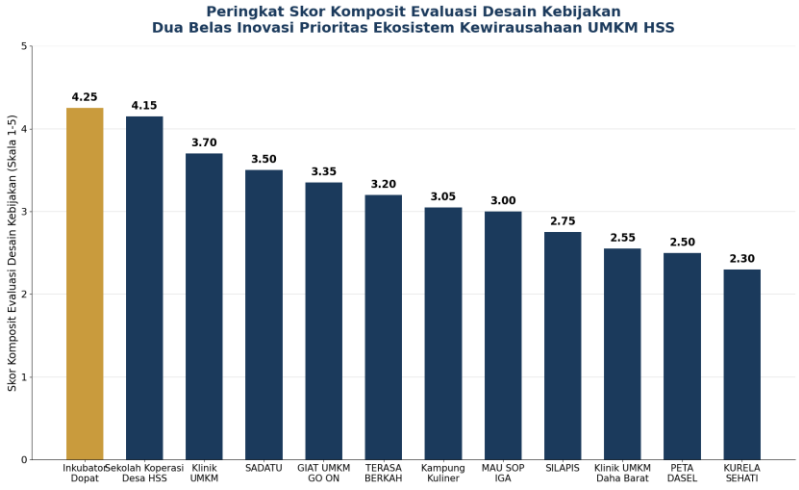

Gambar A.4 Peringkat Skor Komposit Evaluasi Desain Kebijakan Dua Belas

Hasil penilaian menempatkan Inkubator Dopat di peringkat pertama dengan nilai 4,25. Keunggulannya ada pada model kelembagaan inkubasi yang jelas serta data kinerja keuangan dan serapan tenaga kerja yang lengkap. Peringkat kedua adalah Sekolah Koperasi Desa HSS dengan nilai 4,15, unggul pada keterukuran dampak dan keberlanjutan kelembagaan karena melekat pada Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan capaian legalitasnya tercatat rinci. Peringkat ketiga Klinik UMKM dengan nilai 3,70, didukung capaian 113,87% dari target UMKM naik kelas. Di posisi terbawah ada KURELA SEHATI

dengan nilai 2,30, karena masih sebatas membentuk wadah dan dukungan kelembagaan maupun anggarannya masih terbatas, meski perannya kuat pada domain Budaya. Tiga inovasi yang baru masuk daftar prioritas, yaitu SADATU (3,50), TERASA BERKAH (3,20), dan SILAPIS (2,75), punya pola yang mirip: rancangannya sudah jelas, tetapi dampaknya belum bisa diukur karena sistemnya baru berjalan dan capaiannya belum dicatat dalam angka.

BAB 4
PEMBAHASAN

EVALUASI DESAIN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH BERBASIS EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGUATAN UMKM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Isu Strategis Penguatan Ekosistem Kewirausahaan UMKM

Hasil kajian awal menunjukkan bahwa kebijakan inovasi ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menghasilkan beragam program pembinaan, pendampingan, promosi, dan pengembangan produk lokal. Meskipun demikian, program-program tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam satu arsitektur kebijakan ekosistem kewirausahaan. Kekuatan utama berada pada dukungan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha, sedangkan pembiayaan keberpihakan, insentif kebijakan, integrasi data kinerja, dan perluasan akses pasar masih memerlukan penguatan.

Isu strategis kajian karena itu tidak hanya berkaitan dengan jumlah inovasi yang tersedia, tetapi juga menyangkut keterpaduan desain, keterukuran dampak, keberlanjutan kelembagaan, dan hubungan antardomain ekosistem kewirausahaan. Pembahasan pada bab ini mengintegrasikan profil inovasi, hasil pemetaan domain, keselarasan dengan RPJMD, model penguatan, dan rekomendasi implementatif sebagai satu rangkaian evaluasi.

Penguatan UMKM tidak bisa diperlakukan sebagai urusan satu dinas saja. RPJMN 2025-2029 menempatkan pembangunan dalam kerangka strategi nasional, kebijakan umum, program lintas kementerian/lembaga, kebijakan kewilayahan, kerangka aturan, dan kerangka pendanaan. Di daerah, RPJPD HSS 2025-2045 memberi arah jangka panjang, sedangkan RPJMD HSS 2025-2029 menerjemahkannya ke dalam visi SEMANGAT. RKPD 2026 lalu menurunkannya menjadi program tahunan lengkap dengan target, perangkat daerah penanggung jawab, lokasi, dan kebutuhan anggaran. Karena itu, mutu inovasi UMKM dinilai dari kemampuannya menyambungkan tujuan jangka panjang dan menengah dengan tindakan tahunan yang bisa diukur.

Arah RPJPD HSS 2025-2045 menekankan perlunya transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum dan stabilitas, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam konteks kajian ini, transformasi ekonomi berarti bahwa UMKM tidak cukup hanya bertambah jumlahnya, tetapi perlu mengalami peningkatan produktivitas, formalitas, kualitas produk, efisiensi proses, kapasitas inovasi, akses pembiayaan, dan jangkauan pasar. Transformasi tata kelola mengharuskan data pelaku usaha, capaian program, serta pembagian peran antarperangkat daerah disusun secara konsisten agar kebijakan dapat dikendalikan dan dievaluasi dari tahun ke tahun.

Visi RPJMD HSS 2025-2029, yaitu Membangun Desa, Menata Kota, untuk Mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi,

dan Teknologis, menuntut distribusi manfaat pembangunan yang tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan perkotaan. Inovasi pada tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa perlu dihubungkan dalam satu rantai layanan. Pelaku usaha dari wilayah yang relatif jauh dari pusat pelayanan harus tetap memperoleh akses terhadap pendampingan, legalitas, pembiayaan, teknologi, logistik, dan pasar. Oleh karena itu, isu pemerataan locus layanan merupakan bagian penting dari evaluasi desain kebijakan, bukan sekadar persoalan teknis pelaksanaan.

Temuan awal juga memperlihatkan adanya perbedaan antara inovasi yang berorientasi pada kegiatan dan inovasi yang berorientasi pada hasil. Program pelatihan, sosialisasi, pendampingan, pameran, atau penyediaan fasilitas merupakan keluaran yang penting, tetapi belum otomatis menunjukkan keberhasilan penguatan usaha. Keberhasilan baru terlihat apabila keluaran tersebut diikuti oleh perubahan pada omzet, produktivitas, tingkat formalitas, akses pembiayaan, jumlah tenaga kerja, keberlanjutan usaha, pemanfaatan teknologi, dan perluasan pasar. Perbedaan ini menjadi dasar mengapa kajian menempatkan keterukuran dampak sebagai salah satu dimensi utama skoring.

Persoalan berikutnya adalah fragmentasi data. Setiap inovasi cenderung memiliki format pendataan, periode pelaporan, dan definisi penerima manfaat yang berbeda. Tanpa nomor identitas usaha atau basis data tunggal, satu pelaku UMKM dapat tercatat sebagai penerima manfaat pada beberapa program tanpa diketahui tahapan perkembangan usahanya. Fragmentasi tersebut menyulitkan pemerintah daerah untuk menjawab pertanyaan yang lebih substantif: berapa UMKM yang benar-benar naik kelas, berapa yang bertahan setelah pendampingan, berapa yang memperoleh pembiayaan, dan berapa yang berhasil memperluas pasar.

Berdasarkan kerangka tersebut, isu strategis penguatan ekosistem kewirausahaan HSS dapat dirumuskan sebagai kebutuhan untuk mengubah pendekatan program yang sepotong-sepotong menjadi lintasan pengembangan usaha yang utuh. Pelaku usaha idealnya bergerak dari tahap pendataan dan identifikasi kebutuhan, menuju pelatihan, legalisasi, peningkatan mutu produk, pembiayaan, pemasaran, pengadaan, perluasan jejaring, dan evaluasi keberlanjutan. Kedua belas inovasi prioritas telah mengisi sebagian lintasan tersebut, tetapi hubungan antarinovasi belum sepenuhnya dirancang sebagai satu sistem layanan yang saling meneruskan.

4.2 Gambaran Umum Inovasi Ekonomi Kabupaten HSS

Asta Cita 3, yaitu lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur, berisi 20 dari total 214 inovasi daerah Kabupaten HSS atau 9,3%. Ditambah dua inovasi dari kategori lain yang isinya menyasar pelaku usaha (MAU SOP IGA dan Sekolah Koperasi Desa HSS), jumlah inovasi yang

dikaji menjadi 22 atau 10,3% dari seluruh inovasi daerah. Porsi ini kecil dibandingkan Asta Cita 7 tentang reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang berisi 100 inovasi, atau Asta Cita 4 tentang pembangunan SDM yang berisi 70 inovasi. Meski begitu, porsi kecil ini justru sangat strategis karena berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi rakyat dan UMKM. Ada satu catatan penting lagi: Asta Cita 5 tentang hilirisasi dan industrialisasi belum punya satu pun inovasi terdaftar, padahal kategori itu justru berhubungan erat dengan agenda menaikkan nilai tambah produk UMKM.

Tabel A.10 Profil Ringkas 22 Inovasi Kandidat Berorientasi Ekonomi HSS

Inovasi	OPD/Kelembagaan	Sub-Klaster
SiOPEN HSS	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Tata Kelola Pengadaan
Gebrak Sehati	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Infrastruktur & Utilitas Publik
DETAK PJU+	Dinas Perhubungan	Infrastruktur & Utilitas Publik
TERASA BERKAH	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
Kampung Kuliner	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
Klinik UMKM	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
Inkubator Dopat	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
SADATU	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
SI PANDU WISATA V2.0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pariwisata
SIMBIOSIS	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Sektor Lain (Keolahragaan)
SIMPAI	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pariwisata
HSS TRIP	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pariwisata
KURELA SEHATI	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
SILAPIS	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	UMKM & Kewirausahaan (Inti)

Inovasi	OPD/Kelembagaan	Sub-Klaster
Klinik UMKM Daha Barat (KUBAR)	Kecamatan Daha Barat	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
PETA DASEL	Kecamatan Daha Selatan	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
SI LOWIS	Kecamatan Loksado	Pariwisata
PACARKU	Kelurahan Kandangan Utara	Ketenagakerjaan
GIAT UMKM GO ON	Kelurahan Kandangan Utara	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
SI TIMELINE RS BHHB	RSUD Brigjend H. Hasan Basry	Ketenagakerjaan
MAU SOP IGA	Kecamatan Daha Selatan	UMKM & Kewirausahaan (Inti)
Sekolah Koperasi Desa HSS	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UMKM & Kewirausahaan (Inti)

4.2.1 Distribusi Tematik dan Sub-Klaster

Seperti terlihat pada Gambar 4. 1, dari 22 inovasi, 12 inovasi atau 54,5% masuk sub-klaster UMKM dan Kewirausahaan Inti. Kelompok inilah yang menjadi fokus pembahasan mendalam kajian ini. Sisanya: 4 inovasi (18,2%) di sub-klaster Pariwisata, 2 inovasi (9,1%) di Ketenagakerjaan, 2 inovasi (9,1%) di Infrastruktur dan Utilitas Publik, 1 inovasi (4,5%) di Tata Kelola Pengadaan, dan 1 inovasi (4,5%) di sektor keolahragaan. Dibandingkan pemetaan awal kajian, porsi sub-klaster UMKM Inti naik dari 43,8% menjadi 54,5%. Kenaikan ini terjadi karena ada inovasi baru pada rekap terkini (SADATU, PETA DASEL, TERASA BERKAH, dan Sekolah Koperasi Desa HSS) dan karena uraian isi SILAPIS kini sudah lengkap.

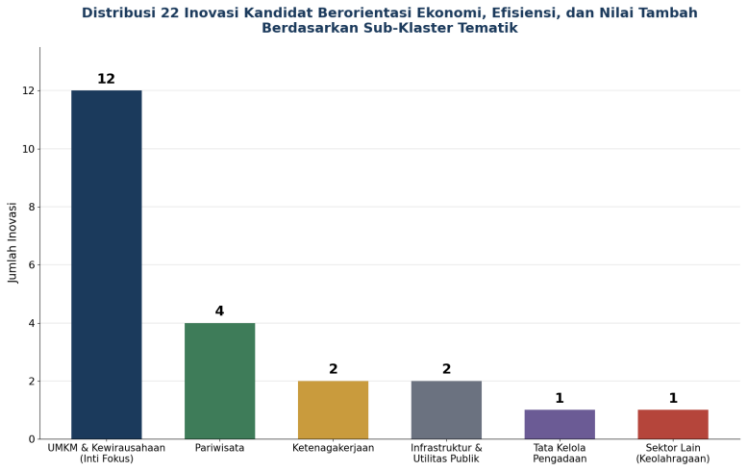

Gambar A.5 Distribusi 22 Inovasi Kandidat Berdasarkan Sub-Klaster

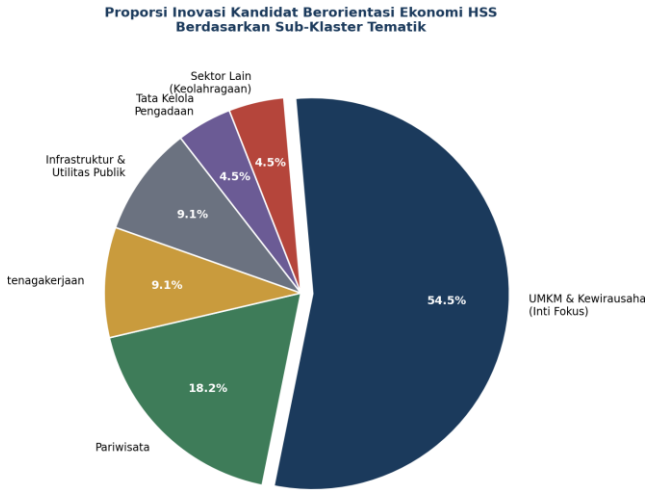

Gambar A.6 Porsi Inovasi Kandidat Berorientasi Ekonomi Berdasarkan

Komposisi ini menunjukkan bahwa pengelompokan inovasi berdasarkan kategori Asta Cita 3 bersifat inklusif - mencakup isu ketenagakerjaan, pariwisata, dan infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tidak langsung, namun tidak seluruhnya menyasar penguatan UMKM secara spesifik. Sebaliknya, sejumlah inovasi yang justru sangat relevan terhadap UMKM terklasifikasi pada kategori Asta Cita lain, yakni MAU SOP IGA (Asta Cita 2) dan Sekolah Koperasi Desa HSS (Asta Cita 4). Kondisi ini menegaskan pentingnya metodologi penyaringan lintas kategori sebagaimana dijelaskan pada Bab III untuk memastikan analisis mendalam kajian ini benar-benar difokuskan pada inovasi yang relevan terhadap ekosistem kewirausahaan UMKM.

4.2.2 Pembahasan Ringkas Sepuluh Inovasi Kandidat di Luar Fokus UMKM

Sub-bab ini membahas singkat sepuluh inovasi yang tidak lolos penyaringan Tahap I, supaya gambaran seluruh 22 inovasi lengkap. Pembahasan ini perlu karena tidak lolosnya sebuah inovasi dari kriteria kecocokan tema bukan berarti inovasi itu tidak berguna bagi ekonomi daerah. Sebagian besar justru bersinggungan dengan ekosistem kewirausahaan secara tidak langsung, misalnya lewat penyediaan pasar bagi produk UMKM, penyiapan tenaga kerja, penyediaan infrastruktur dasar usaha, atau pembukaan akses belanja pemerintah. Dengan begitu, seluruh 22 inovasi terbahas dalam laporan ini: 12 inovasi prioritas dibahas mendalam mulai Subbab 4.3, sedangkan sepuluh inovasi berikut dibahas pada sisi kaitan strategisnya.

a. Sub-Klaster Pariwisata (empat inovasi). SI PANDU WISATA V2.0 adalah platform pelayanan dan promosi pariwisata yang di dalamnya sudah ada Direktori Ekonomi Kreatif dan UMKM lokal, informasi penginapan, pemesanan tiket digital, dan jasa pemandu wisata. Isi utamanya memang pariwisata, tetapi adanya direktori UMKM membuatnya paling siap disambungkan dengan basis data

SADATU. SIMPAI menyajikan informasi seluruh destinasi dan jasa wisata dalam satu aplikasi, mulai dari joki bamboo rafting, ojek kawasan Loksado, penginapan, sampai pemandu. Jasa-jasa itu di lapangan dijalankan oleh usaha mikro warga setempat. HSS TRIP menghubungkan destinasi unggulan, desa wisata, event budaya, dan ekonomi kreatif dalam satu jalur wisata bertema, dengan tujuan memperpanjang lama tinggal wisatawan sehingga manfaat ekonominya lebih merata ke UMKM lokal. SI LOWIS dari Kecamatan Loksado membuat pelaporan data kunjungan wisata jadi cepat dan *real-time* untuk memenuhi permintaan data kementerian dan pihak lain. Keempatnya punya pola sama: kuat di promosi dan basis data, tetapi belum satu pun punya mekanisme kurasi produk, standar mutu, atau kerja sama dagang yang mengikat antara pengelola destinasi dan pelaku UMKM binaan.

b. Sub-Klaster Ketenagakerjaan (dua inovasi). PACARKU adalah platform berbasis web yang mempertemukan pencari kerja dengan penyedia kerja lokal, termasuk usaha kecil dan UMKM yang selama ini sulit menjangkau calon pekerja. Inovasi ini dikelola unit yang sama dengan GIAT UMKM GO ON, sehingga sangat mungkin digabung menjadi satu layanan ekonomi kelurahan: UMKM yang sudah naik kelas lewat GIAT UMKM GO ON bisa langsung memasang kebutuhan tenaga kerja di PACARKU. SI TIMELINE RS BHHB mendigitalkan rekrutmen pegawai RSUD Brigjend H. Hasan Basry, dari pengumuman lowongan sampai pengumuman hasil seleksi. Sampai 2026 sudah dimanfaatkan 1.794 orang. Isinya adalah tata kelola kepegawaian internal, jadi kaitannya dengan UMKM memang jauh. Namun pencatatan capaiannya termasuk yang paling rapi di antara seluruh inovasi, sehingga bisa dijadikan contoh bagi inovasi lain yang datanya masih kosong.

c. Sub-Klaster Infrastruktur dan Utilitas Publik (dua inovasi). Gebrak Sehati menyediakan sarana sanitasi satu jamban untuk satu keluarga bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan pendekatan yang menumbuhkan rasa memiliki warga atas fasilitas yang dibangun. Hasilnya berupa naiknya persentase rumah tangga yang punya akses air minum melalui SPAM dan akses pengolahan air limbah rumah tangga. DETAK PJU+ melibatkan aparat desa dan kelurahan dalam mengawasi penerangan jalan umum lewat grup pelaporan. Kerja samanya dikuatkan dengan Nota Kesepahaman antara Dinas dan kecamatan, lalu Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah desa dan kelurahan. Inovasi ini juga menghemat biaya lewat meterisasi PJU, tanpa perlu investasi smart PJU yang ditaksir Rp20-30 miliar. Keduanya menyentuh syarat dasar lingkungan usaha. Sanitasi dan air bersih adalah syarat wajib bagi usaha pengolahan pangan rumahan yang ingin mengurus sertifikasi P-IRT dan halal. Penerangan jalan menentukan keamanan dan jam buka kawasan ekonomi malam seperti Kampung Kuliner. Cara DETAK PJU+ mengikat kerja sama lewat MoU dan PKS berjenjang juga layak ditiru inovasi UMKM tingkat kecamatan dan kelurahan, yang selama ini justru lemah di domain Kebijakan.

d. Sub-Klaster Tata Kelola Pengadaan (satu inovasi). SiOPEN HSS adalah lokapasar pengadaan daerah yang dibangun mengikuti arahan LKPP, untuk menggantikan transaksi pengadaan bernilai kecil yang dulu masih manual dan tidak tercatat. Lewat sistem ini, Pejabat Pembuat Komitmen bisa bertransaksi sampai Rp10 juta secara langsung, sistemnya berjalan di server lokal, dan seluruh dokumen pengadaan terbit otomatis. Isinya memang tata kelola pengadaan. Tetapi sebenarnya inilah simpul pasar paling strategis yang belum tersambung ke agenda UMKM. Belanja pemerintah daerah adalah pasar yang pasti bagi produk lokal. Kalau UMKM yang sudah diurus legalitasnya oleh Klinik UMKM bisa ikut menjadi penyedia di SiOPEN HSS, mengurus badan hukum tidak lagi sekadar memenuhi administrasi, melainkan benar-benar membuka pintu pasar. Sistem ini juga dirancang untuk memastikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak pengadaan.

e. Sub-Klaster Keolahragaan (satu inovasi). SIMBIOSIS menggabungkan data atlet, pelatih, wasit, sarana prasarana, event, dan capaian prestasi dalam satu platform untuk mendukung pembinaan olahraga berbasis data, termasuk persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pada penyusunan awal kajian, inovasi ini tercatat "tidak teridentifikasi" karena uraian isinya belum ada. Rekap terbaru sudah melengkapinya, sehingga posisinya kini jelas berada di luar urusan UMKM. Kaitannya dengan ekonomi bersifat tidak langsung, yaitu lewat event olahraga yang bisa menggerakkan usaha kuliner, penginapan, dan cenderamata di sekitar lokasi kegiatan.

Tabel A.11 Keterkaitan Tidak Langsung Sepuluh Inovasi Kandidat

Inovasi	**Sub-Klaster**	**Domain Ekosistem yang Bersinggungan**	**Potensi Keterkaitan dengan Agenda UMKM**
SI PANDU WISATA V2.0	Pariwisata	Pasar	Direktori Ekonomi Kreatif dan UMKM dapat disambungkan dengan basis data SADATU
SIMPAI	Pariwisata	Pasar	Layanan jasa wisata (rafting, ojek kawasan, penginapan, pemandu) dijalankan usaha mikro lokal

Inovasi	**Sub-Klaster**	**Domain Ekosistem yang Bersinggungan**	**Potensi Keterkaitan dengan Agenda UMKM**
HSS TRIP	Pariwisata	Pasar, Budaya	Jalur wisata tematik memperpanjang lama tinggal dan memeratakan manfaat ekonomi ke UMKM
SI LOWIS	Pariwisata	Pasar	Data kunjungan *real-time* dapat menjadi dasar proyeksi permintaan bagi UMKM kawasan Loksado
PACARKU	Ketenagakerjaan	SDM, Pasar	Kanal pemenuhan tenaga kerja bagi UMKM binaan GIAT UMKM GO ON di kelurahan yang sama
SI TIMELINE RS BHHB	Ketenagakerjaan	SDM	Rujukan praktik pencatatan penerima manfaat (1.794 orang) bagi inovasi yang lemah data
Gebrak Sehati	Infrastruktur & Utilitas Publik	Dukungan	Sanitasi dan air bersih merupakan prasyarat sertifikasi P-IRT dan halal usaha pangan rumahan
DETAK PJU+	Infrastruktur & Utilitas Publik	Kebijakan, Dukungan	Menopang keamanan kawasan ekonomi malam; model MoU/PKS berjenjang layak direplikasi inovasi UMKM
SiOPEN HSS	Tata Kelola Pengadaan	Pasar, Kebijakan	Belanja pemerintah sebagai pasar terjamin bagi UMKM yang telah diformalkan Klinik UMKM
SIMBIOSIS	Sektor Lain (Keolahragaan)	Budaya	Event olahraga berpotensi menggerakkan usaha kuliner, akomodasi, dan cenderamata

Tabel 4. 2 memperlihatkan sesuatu yang menarik. Domain yang paling sering disentuh oleh inovasi non-prioritas justru domain Pasar, yaitu domain yang pada 12 inovasi prioritas hanya meraih 20 dari 36 poin. Temuan ini memperkuat satu hal: kesenjangan ekosistem UMKM di Kabupaten HSS tidak selalu harus dijawab dengan program baru, tetapi bisa dijawab dengan menyambungkan program yang sudah berjalan. Ada tiga sambungan yang paling menjanjikan. Pertama, menghubungkan direktori UMKM pada SI PANDU WISATA V2.0 dan HSS TRIP dengan basis data SADATU, supaya promosi produk punya satu sumber data. Kedua, membuka jalur bagi UMKM binaan Klinik UMKM untuk menjadi penyedia di SiOPEN HSS, supaya usaha yang sudah berbadan hukum benar-benar mendapat pasar dari belanja pemerintah. Ketiga, menggabungkan layanan GIAT UMKM GO ON dengan PACARKU di Kelurahan Kandangan Utara menjadi satu pintu layanan ekonomi warga. Ketiganya tidak butuh anggaran program baru yang besar karena sistemnya sudah ada dan dikelola perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.2.3 Kesesuaian Inovasi dengan Asta Cita

Sub-bab ini menjawab tujuan keempat kajian: apakah kategori Asta Cita pada setiap inovasi sudah sesuai dengan isi yang dikerjakannya, dan Asta Cita apa saja yang nyatanya terbentuk dari inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Caranya dengan membandingkan tiga hal: rumusan resmi delapan Asta Cita pada Subbab 2.5, kategori yang tercatat di dokumen rekap, dan uraian isi serta manfaat masing-masing inovasi. Hasilnya dibagi tiga: Sesuai bila isi utama inovasi memang berada di kategori tempatnya dicatat; Sesuai dengan Irisan bila kategorinya tepat tetapi inovasi itu juga cukup kuat menopang Asta Cita lain; dan Perlu Reklasifikasi bila isi utamanya sebenarnya ada di Asta Cita yang berbeda.

Sebelum masuk ke hasil pemetaan, ada satu hal mendasar pada dokumen sumber yang perlu dicatat. Urutan kategori pada dokumen rekap tidak sama dengan urutan resmi Asta Cita. Kategori pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan ditempatkan di urutan ketiga, sedangkan kategori lapangan kerja, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur ditempatkan di urutan keempat. Menurut rumusan resmi RPJMN 2025-2029, urutannya justru kebalikan: kewirausahaan adalah Asta Cita 3 dan pembangunan SDM adalah Asta Cita 4. Seluruh penomoran dalam laporan ini sudah diluruskan mengikuti rumusan resmi. Koreksi ini bukan soal tulisan semata, karena nomor Asta Cita dipakai sebagai kode pelaporan kinerja dari daerah ke pusat. Kalau nomornya tidak sesuai, capaian inovasi daerah bisa terbaca di prioritas nasional yang keliru.

Tabel A.12 Pemetaan Kesesuaian 22 Inovasi Kandidat terhadap Asta Cita

Inovasi	Asta Cita pada Rekapitulasi	Asta Cita Sebenarnya (Hasil Kajian)	Status Kesesuaian
SiOPEN HSS	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 7 - Reformasi birokrasi & pencegahan korupsi	Perlu Reklasifikasi
Gebrak Sehati	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Pengembangan infrastruktur dasar	Sesuai
DETAK PJU+	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Pengembangan infrastruktur	Sesuai
TERASA BERKAH	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Perlindungan pelaku usaha & konsumen	Sesuai
Kampung Kuliner	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Kewirausahaan; irisan AC 2 (ekonomi kreatif)	Sesuai dengan Irisan
Klinik UMKM	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Kewirausahaan & formalisasi usaha	Sesuai
Inkubator Dopat	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Kewirausahaan; irisan kuat AC 5 (nilai tambah produk lokal)	Sesuai dengan Irisan
SADATU	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Tata kelola data UMKM	Sesuai
SI PANDU WISATA V2.0	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Industri kreatif & pariwisata; irisan AC 2	Sesuai dengan Irisan
SIMBIOSIS	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 4 - Prestasi olahraga & pembinaan SDM	Perlu Reklasifikasi
SIMPAI	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Industri kreatif & pariwisata	Sesuai

Inovasi	Asta Cita pada Rekapitulasi	Asta Cita Sebenarnya (Hasil Kajian)	Status Kesesuaian
HSS TRIP	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Industri kreatif & pariwisata; irisan AC 2	Sesuai dengan Irisan
KURE LA SEHA TI	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 2 - Ekonomi kreatif; irisan AC 3	Sesuai dengan Irisan
SILAPI S	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Inkubasi bisnis & tata kelola keuangan usaha	Sesuai
Klinik UMK M Daha Barat	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Kewirausahaan; irisan AC 6 (pemberdayaan wilayah)	Sesuai dengan Irisan
PETA DASE L	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 6 - Membangun dari desa; irisan AC 3	Sesuai dengan Irisan
SI LOWIS	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Tata kelola data pariwisata	Sesuai
PACA RKU	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Lapangan kerja berkualitas	Sesuai
GIAT UMK M GO ON	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 3 - Kewirausahaan; irisan AC 6	Sesuai dengan Irisan
SI TIMEL INE RS BHHB	AC 3 - Kewirausahaan & infrastruktur	AC 7 - Reformasi birokrasi & SPBE	Perlu Reklasifikasi
MAU SOP IGA	AC 2 - Kemandirian & swasembada	AC 5 - Hilirisasi & nilai tambah; irisan AC 2	Perlu Reklasifikasi

Inovasi	Asta Cita pada Rekapitulasi	Asta Cita Sebenarnya (Hasil Kajian)	Status Kesesuaian
Sekolah Koperasi Desa HSS	AC 4 - Pembangunan SDM	AC 6 - Membangun dari desa (Kopdes Merah Putih); irisan AC 3	Perlu Reklasifikasi

Dari 22 inovasi, 10 berstatus Sesuai, 7 Sesuai dengan Irisan, dan 5 Perlu Reklasifikasi. Angka terakhir setara 22,7%, cukup besar untuk memengaruhi keakuratan laporan kinerja. Kelimanya adalah SiOPEN HSS dan SI TIMELINE RS BHHB, yang isinya reformasi birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga lebih tepat di Asta Cita 7; SIMBIOSIS, yang merupakan sistem pembinaan olahraga sehingga lebih tepat di Asta Cita 4; MAU SOP IGA, yang intinya mengolah ikan gabus menjadi ekstrak albumin sehingga lebih tepat di Asta Cita 5; serta Sekolah Koperasi Desa HSS, yang merupakan turunan langsung Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga lebih tepat di Asta Cita 6.

Perpindahan kategori MAU SOP IGA punya dampak paling besar. Pada dokumen rekap, Asta Cita 5 tentang hilirisasi dan industrialisasi tercatat tidak punya satu pun inovasi. Padahal MAU SOP IGA persis mengerjakan hal itu, yaitu mengubah ikan gabus dari komoditas konsumsi segar menjadi ekstrak albumin yang harganya jauh lebih tinggi. Inkubator Dopat pun bekerja dengan logika yang sama melalui pengolahan dodol dan ketupat Kandangan. Artinya, Kabupaten HSS sebenarnya sudah mengerjakan Asta Cita 5, hanya saja capaiannya tidak terbaca karena tercatat di kategori lain. Jadi kosongnya Asta Cita 5 pada dokumen rekap lebih tepat dibaca sebagai kosongnya pencatatan, bukan kosongnya program.

Tabel A.13 Cakupan Asta Cita yang Terbentuk dari Inovasi Daerah

Asta Cita	Rumusan Ringkas	Jumlah dalam Rekapitulasi (214 Inovasi)	Kontribusi Substantif 22 Inovasi Kandidat	Status Cakupan
AC 1	Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	2 inovasi	Tidak ada	Sangat Minim

Asta Cita	Rumusan Ringkas	Jumlah dalam Rekapitulasi (214 Inovasi)	Kontribusi Substantif 22 Inovasi Kandidat	Status Cakupan
AC 2	Pertahanan keamanan, swasembada pangan/energi/air, ekonomi kreatif, hijau, biru	11 inovasi	1 inovasi (KURELA SEHATI)	Minim
AC 3	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur	20 inovasi	15 inovasi	Kuat - fokus utama kajian
AC 4	Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, gender	70 inovasi	1 inovasi (SIMBIOSIS)	Kuat secara umum, minim pada irisan ekonomi
AC 5	Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri	0 inovasi	1 inovasi (MAU SOP IGA) + irisan Inkubator Dopat	Kosong pada pencatatan, terisi pada praktik
AC 6	Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	8 inovasi	2 inovasi (PETA DASEL, Sekolah Koperasi Desa HSS) + 2 irisan	Sedang

Asta Cita	Rumusan Ringkas	Jumlah dalam Rekapitulasi (214 Inovasi)	Kontribusi Substantif 22 Inovasi Kandidat	Status Cakupan
AC 7	Reformasi politik, hukum, birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba	100 inovasi	2 inovasi (SiOPEN HSS, SI TIMELINE RS BHHB)	Sangat kuat - dominan dalam populasi inovasi
AC 8	Keharmonisan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi antarumat beragama	3 inovasi	Tidak ada	Sangat Minim

Tabel 4. 4 menjawab pertanyaan Asta Cita apa saja yang terbentuk dari inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dilihat dari isinya, 22 inovasi menyentuh 6 dari 8 Asta Cita, yaitu Asta Cita 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dengan jumlah terbanyak di Asta Cita 3 sebanyak 15 inovasi. Dua Asta Cita tidak tersentuh sama sekali, yaitu Asta Cita 1 tentang ideologi dan HAM serta Asta Cita 8 tentang lingkungan dan budaya. Hal ini wajar karena keduanya memang di luar urusan ekonomi. Namun pada seluruh 214 inovasi pun, kedua Asta Cita itu hanya punya 2 dan 3 inovasi. Jadi jumlahnya memang sedikit secara menyeluruh, bukan karena kajian ini membatasi fokus.

Sebaran pada Tabel 4. 4 memperlihatkan ketimpangan yang tajam. Asta Cita 7 menampung 100 dari 214 inovasi atau 46,7%. Artinya, inovasi daerah Kabupaten HSS sejauh ini didominasi digitalisasi tata kelola dan pelayanan administrasi di dalam pemerintahan sendiri. Sebaliknya, Asta Cita 3 yang menjadi rumah agenda kewirausahaan hanya berisi 20 inovasi atau 9,3%, sedangkan Asta Cita 5 dan 6 yang menopang nilai tambah produk dan ekonomi desa hanya berisi 0 dan 8 inovasi. Ketimpangan ini cocok dengan temuan pada Subbab 4.4: pemerintah daerah kuat pada domain Dukungan yang sifatnya pelayanan, tetapi lemah pada domain Pembiayaan yang menuntut penyediaan modal. Pola yang terlihat pada satuan program ternyata juga terlihat pada keseluruhan portofolio inovasi daerah.

Dari temuan tersebut, ada tiga langkah perbaikan. Pertama, memindahkan kategori lima inovasi yang disebut pada Tabel 4. 3, sekaligus meluruskan urutan penomoran kategori pada dokumen rekap agar sesuai rumusan resmi RPJMN 2025-2029. Kedua, menetapkan MAU SOP IGA dan Inkubator Dopat sebagai inovasi perintis Asta Cita 5, supaya agenda hilirisasi produk lokal punya penanda program

yang jelas dan bisa dikembangkan pada periode berikutnya. Ketiga, mendorong lahirnya inovasi baru di Asta Cita 5 dan 6 melalui arahan tema saat penyusunan RKPD. Kedua Asta Cita itu adalah jalur paling langsung untuk menaikkan nilai tambah UMKM dan memeratakan ekonomi desa, yang keduanya menjadi sasaran RPJMD Kabupaten HSS 2025-2029.

4.3 Profil Inovasi Prioritas

Sub-bab ini menyajikan profil kedua belas inovasi prioritas hasil penyaringan Bab III. Profil disusun mengikuti format baku profil inovasi daerah, meliputi identitas instansi inovator, manfaat, keunggulan, konstruksi pengembangan, cara penggunaan, spesifikasi teknis, biaya, kendala, dan masukan terhadap produk. Urutan penyajian mengikuti peringkat skor komposit evaluasi rancangan kebijakan pada Tabel 3. 9.

4.3.1 Inkubator Dopat

Tabel A.14 Profil Inovasi Inkubator Dopat

1	**Nama Inovasi**	Inkubator Dopat (Dodol dan Ketupat Kandangan)
2	**Identitas Instansi Inovator**	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Bagi pelaku usaha: memperoleh pendampingan inkubasi bisnis berbasis produk khas daerah, mulai dari pengembangan produk, pengemasan, sampai pemasaran. 2. Bagi pemerintah daerah: tersedia data kinerja usaha binaan yang terukur sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan. 3. Bagi masyarakat: terbukanya lapangan kerja dan menguatnya identitas ekonomi lokal melalui produk dodol dan ketupat Kandangan. 4. Capaian: 39 tenant binaan dengan omzet tahunan Rp 5.086.562.759, keuntungan tahunan Rp 2.406.831.750, biaya produksi Rp 2.821.138.100, dan serapan tenaga kerja 75 orang. Rasio keuntungan terhadap omzet 47,3%.
4	**Keunggulan Inovasi**	Satu-satunya inovasi dengan data kinerja keuangan dan serapan tenaga kerja yang lengkap. Memperoleh skor komposit tertinggi (4,25) dari dua belas inovasi prioritas, dengan kekuatan pada domain Dukungan dan SDM.
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Kelembagaan inkubator bisnis berbasis produk unggulan daerah
6	**Cara Penggunaan Produk**	1. Pelaku usaha mendaftar sebagai tenant binaan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 2. Tenant mengikuti proses inkubasi meliputi pengembangan produk, perbaikan kemasan, dan penguatan manajemen usaha. 3. Tenant memperoleh pendampingan berkelanjutan serta fasilitasi promosi produk. 4. Dinas mencatat capaian omzet, keuntungan, biaya produksi, dan serapan tenaga kerja setiap tenant secara berkala.

7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi daerah lainnya (pemberdayaan ekonomi) Asta Cita: AC 3 - kewirausahaan, beririsan AC 5 - nilai tambah Sasaran: pelaku usaha produk olahan khas Kandangan Pendekatan: inkubasi bisnis berkelanjutan Output: 39 tenant binaan aktif dengan kinerja terdokumentasi Indikator keberhasilan: omzet, keuntungan, dan serapan tenaga kerja tenant
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.
9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Dokumen inovasi belum menjelaskan skema pembiayaan yang disediakan bagi tenant, sehingga tenant yang siap berekspansi belum memiliki jalur permodalan yang jelas.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Perluasan kemitraan pembiayaan tenant melalui segmentasi tenant pemula, tenant bertumbuh, dan tenant siap ekspansi, serta replikasi model inkubasi ke produk lokal lain seperti hasil olahan perikanan.

Gambar A.7 Ilustrasi Inkubator Dopat

4.3.1.1 Identitas Inovasi

Tabel A.15 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	Inkubator Dopat (Dodol dan Ketupat Kandangan)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap; identitas visual mengacu pada Gambar 4.3 Ilustrasi Inkubator Dopat.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	AC 3 - kewirausahaan, beririsan AC 5 - nilai tambah

4.3.1.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Memberikan pendampingan inkubasi bisnis berbasis produk khas daerah, mulai dari pengembangan produk, pengemasan, hingga

pemasaran, sehingga tenant tumbuh menjadi usaha yang mapan dan terukur kinerjanya.

Sasaran Penerima Manfaat: Pelaku usaha produk olahan khas Kandangan (dodol dan ketupat) yang terdaftar sebagai tenant binaan.

4.3.1.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Pendaftaran tenant binaan produk olahan khas Kandangan.
- Tenaga pendamping inkubasi dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Data capaian omzet, keuntungan, biaya produksi, dan serapan tenaga kerja tenant.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.16 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM	Mengelola pendaftaran tenant dan mencatat capaian kinerja usaha.
Tenant binaan	Mengikuti proses inkubasi dan menerapkan hasil pendampingan pada usahanya.
Pendamping inkubasi	Memberikan pendampingan pengembangan produk, kemasan, dan manajemen usaha.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Pelaku usaha mendaftar sebagai tenant binaan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Langkah 2: Tenant mengikuti proses inkubasi meliputi pengembangan produk, perbaikan kemasan, dan penguatan manajemen usaha.
- Langkah 3: Tenant memperoleh pendampingan berkelanjutan serta fasilitasi promosi produk.
- Langkah 4: Dinas mencatat capaian omzet, keuntungan, biaya produksi, dan serapan tenaga kerja setiap tenant secara berkala.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Tenant disegmentasi menurut tahap pertumbuhan (pemula, bertumbuh, siap ekspansi) untuk mengarahkan jalur pembiayaan yang sesuai.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Pencatatan kinerja tenant (omzet, keuntungan, biaya produksi, serapan tenaga kerja) sudah berjalan dan menjadi keunggulan utama inovasi ini; belum ada skema pembiayaan formal yang menghubungkan tenant siap ekspansi dengan lembaga keuangan.

e. Keluaran (Output)

39 tenant binaan aktif dengan kinerja terdokumentasi: omzet tahunan Rp5.086.562.759, keuntungan tahunan Rp2.406.831.750, biaya produksi Rp2.821.138.100, serapan tenaga kerja 75 orang, dan rasio keuntungan terhadap omzet 47,3%.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Tenant naik kelas dari usaha rumahan menjadi usaha dengan manajemen dan pengemasan yang lebih baik (jangka pendek); ekspansi usaha dan replikasi model inkubasi ke produk lokal lain seperti hasil olahan perikanan (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Dokumen inovasi belum menjelaskan skema pembiayaan yang disediakan bagi tenant, sehingga tenant yang siap berekspansi belum memiliki jalur permodalan yang jelas.

4.3.1.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.17 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Kolom status pada rekap SKPD belum diisi/tercatat "Belum Ada" oleh instansi pengampu sehingga kesiapan indikator ini belum dapat dinilai dari dokumen rekap.

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Ketersediaan dan Peran SDM	Ada Indikasi Awal	Tenaga pendamping inkubasi teridentifikasi aktif dari capaian 39 tenant binaan, namun dokumen SK/penugasan formal belum tercantum dalam rekap.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran program inkubasi belum tercantum dalam rekap SKPD.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Pencatatan kinerja tenant (omzet, keuntungan, biaya produksi) menjadi alat kerja utama yang sudah terbukti berjalan.
Bimtek Inovasi	Belum Ada Bukti	Frekuensi bimtek pendampingan bagi tenant belum tercatat dalam rekap.
Integrasi dalam RKPD	Belum Ada Bukti	Keterangan program dalam RKPD belum teridentifikasi pada dokumen rekap yang tersedia.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Ada" pada rekap SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), meski inovasi ini memperoleh skor komposit tertinggi (4,25) dari dua belas inovasi prioritas pada evaluasi desain kajian ini sendiri.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.18 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah tenant binaan aktif	Meningkat tiap tahun	39 tenant	Data kinerja tenant sudah terdokumentasi lengkap.
Omzet tahunan tenant	Meningkat dari *baseline*	Rp5.086.562.759	Capaian riil terdokumentasi.
Serapan tenaga kerja	Meningkat dari *baseline*	75 orang	Indikator dampak ekonomi langsung.
Skor komposit evaluasi desain kebijakan (skala 0-5)	Skor ≥ 4,0	4,25 (peringkat 1 dari 12)	Skor tertinggi pada evaluasi desain kajian ini.
Tenant dengan akses pembiayaan formal	Tersedia jalur bertingkat	Belum tersedia	Kesenjangan utama yang perlu ditutup.

4.3.1.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Meskipun memperoleh skor evaluasi desain kebijakan tertinggi dan data kinerja paling lengkap, status data dukung IGA yang masih "Belum Ada" menunjukkan kesenjangan antara kualitas substansi program dan kelengkapan dokumen administratif yang dipersyaratkan penilaian inovasi daerah.

4.3.1.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan Inkubator Dopat (Dodol dan Ketupat Kandangan) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.19 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 19)

1. Masalah yang Diselesaikan	Pelaku usaha produk olahan khas Kandangan (dodol, ketupat) belum memiliki pendampingan inkubasi bisnis yang terstruktur untuk naik kelas.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Pelaku usaha produk olahan khas Kandangan yang terdaftar sebagai tenant binaan.
3. Titik Masuk	Pendaftaran sebagai tenant binaan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
4. Langkah-Langkah Kunci	Pengembangan produk dan kemasan → penguatan manajemen usaha → pendampingan berkelanjutan → pencatatan kinerja berkala.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Tenant merasakan langsung kenaikan omzet dan keuntungan usaha yang terdokumentasi, bukan sekadar janji pembinaan; pelaku usaha merasa lebih percaya diri memasarkan produk karena kemasan dan manajemen sudah dibenahi bersama pendamping.
6. Efek Terukur	39 tenant binaan dengan omzet Rp5.086.562.759, keuntungan Rp2.406.831.750, dan serapan tenaga kerja 75 orang pada capaian terkini.
7. Manfaat yang Lebih Luas	Menguatnya identitas ekonomi lokal melalui produk dodol dan ketupat Kandangan, serta terbukanya lapangan kerja baru.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Ekosistem inkubasi bisnis produk unggulan daerah yang direplikasi ke komoditas lokal lain, dengan tenant yang mampu naik kelas hingga siap ekspansi dan mengakses pembiayaan formal.

Asumsi Kunci	Tenant konsisten mengikuti proses inkubasi hingga tuntas; pendamping tersedia berkelanjutan; pasar produk olahan khas Kandangan terus tumbuh.
Pemangku Kepentingan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tenant binaan, lembaga keuangan mitra (untuk pengembangan skema pembiayaan), Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan (replikasi ke komoditas lain).

4.3.1.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): melengkapi dokumen data dukung IGA (regulasi, SDM, anggaran) sejalan dengan kualitas substansi program yang sudah terbukti unggul.
- Jangka menengah (6–18 bulan): membangun skema pembiayaan berjenjang (tenant pemula, bertumbuh, siap ekspansi) melalui kemitraan lembaga keuangan, serta merintis replikasi model inkubasi ke produk olahan perikanan.
- Keterhubungan model: menjadi rujukan praktik terbaik inkubasi bisnis bagi Klinik UMKM dan SILAPIS dalam model penguatan ekosistem kewirausahaan UMKM.

4.3.2 Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan

Tabel A.20 Profil Inovasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan

1	**Nama Inovasi**	Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan
2	**Identitas Instansi Inovator**	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Bagi koperasi desa: meningkatnya kompetensi pengurus, pengawas, dan pengelola usaha dalam manajemen, legalitas, digitalisasi, dan pengawasan. 2. Bagi pemerintah daerah: terpenuhinya dukungan atas Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 3. Capaian: terbentuk 148 KDKMP dengan 148 akta dan 148 NPWP selesai, 147 KDKMP memiliki rekening, 142 KDKMP telah menerbitkan NIB, dan 15 KDKMP telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk tahun buku 2025.
4	**Keunggulan Inovasi**	Melekat pada Program Strategis Nasional sehingga dasar kelembagaan dan keberlanjutannya paling kuat. Skor komposit 4,15 (peringkat kedua) dengan nilai tertinggi pada keterukuran dampak dan keberlanjutan kelembagaan.
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Pelatihan dan bimbingan teknis berjenjang bagi koperasi desa

6	**Cara Penggunaan Produk**	1. Dinas mendata calon anggota, anggota, dan pengurus koperasi desa/kelurahan. 2. Peserta mengikuti bimbingan teknis manajemen koperasi, legalitas, digitalisasi, dan pengawasan. 3. Pengurus terpilih mengikuti magang untuk pendalaman pengelolaan usaha koperasi. 4. Dinas memantau kelengkapan administrasi KDKMP mulai dari akta, NPWP, rekening, NIB, hingga pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.
7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan pemberdayaan Asta Cita: AC 6 - membangun dari desa, beririsan AC 3 Sasaran: 148 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten HSS Pendekatan: bimbingan teknis dan magang Output: legalitas koperasi desa lengkap dan pengurus terlatih Indikator keberhasilan: jumlah KDKMP berbadan hukum, ber-NIB, dan melaksanakan RAT
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.
9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Satu desa (Pakan Dalam, Kecamatan Daha Utara) belum memiliki rekening karena perpindahan domisili bendahara dan pergantian pengurus. Enam desa belum menerbitkan NIB. Baru 15 dari 148 KDKMP yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Pendampingan pascalegalitas agar seluruh KDKMP mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, serta penyambungan unit usaha koperasi desa dengan UMKM binaan Klinik UMKM agar koperasi memiliki basis usaha yang nyata.

Gambar A.8 Ilustrasi Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan

4.3.2.1 Identitas Inovasi

Tabel A.21 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.

SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	AC 6 - membangun dari desa, beririsan AC 3

4.3.2.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Meningkatkan kompetensi pengurus, pengawas, dan pengelola usaha KDKMP dalam manajemen, legalitas, digitalisasi, dan pengawasan, sekaligus memenuhi dukungan daerah atas Program Strategis Nasional.

Sasaran Penerima Manfaat: 148 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mencakup calon anggota, anggota, dan pengurus.

4.3.2.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Data calon anggota, anggota, dan pengurus koperasi desa/kelurahan.
- Modul bimbingan teknis manajemen koperasi, legalitas, digitalisasi, dan pengawasan.
- Program magang bagi pengurus terpilih.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.22 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM	Mendata peserta, menyelenggarakan bimtek, dan memantau kelengkapan administrasi KDKMP.
Pengurus dan pengawas KDKMP	Mengikuti bimtek dan magang, serta menjalankan administrasi koperasi.
Pemerintah desa/kelurahan	Mendukung pembentukan dan operasional KDKMP di wilayahnya.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Dinas mendata calon anggota, anggota, dan pengurus koperasi desa/kelurahan.
- Langkah 2: Peserta mengikuti bimbingan teknis manajemen koperasi, legalitas, digitalisasi, dan pengawasan.
- Langkah 3: Pengurus terpilih mengikuti magang untuk pendalaman pengelolaan usaha koperasi.

- Langkah 4: Dinas memantau kelengkapan administrasi KDKMP mulai dari akta, NPWP, rekening, NIB, hingga pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Pendampingan pascalegalitas agar seluruh KDKMP mampu melaksanakan RAT secara mandiri.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Bimtek berjenjang dan magang menjadi mekanisme utama peningkatan kapasitas; pemantauan administrasi (akta, NPWP, rekening, NIB, RAT) sudah berjalan namun capaiannya masih rendah pada aspek RAT.

e. Keluaran (Output)

148 KDKMP terbentuk; sebagian besar sudah memiliki legalitas dasar, namun baru 15 dari 148 KDKMP yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, satu desa (Pakan Dalam, Kecamatan Daha Utara) belum memiliki rekening, dan enam desa belum menerbitkan NIB.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Legalitas dan kapasitas pengurus koperasi desa terbentuk (jangka pendek); KDKMP menjadi lembaga ekonomi desa yang aktif menjalankan usaha dan tata kelola sesuai RAT secara mandiri (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Satu desa belum memiliki rekening karena perpindahan domisili bendahara dan pergantian pengurus. Enam desa belum menerbitkan NIB. Baru 15 dari 148 KDKMP yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, menunjukkan kesenjangan besar antara legalitas dan keberfungsian tata kelola.

4.3.2.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.23 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Kolom status pada rekap SKPD belum diisi/tercatat "Belum Ada" oleh instansi pengampu sehingga kesiapan indikator ini belum dapat dinilai dari dokumen rekap.
Ketersediaan dan Peran SDM	Ada Indikasi Awal	Pengurus dan pengawas 148 KDKMP teridentifikasi sebagai SDM pengelola, namun dokumen SK/penugasan formal belum tercantum dalam rekap.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran bimtek dan magang belum tercantum dalam rekap SKPD.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Modul bimtek manajemen, legalitas, dan digitalisasi menjadi alat kerja utama yang sudah terbukti dipakai.
Bimtek Inovasi	Ada Indikasi Awal	Bimtek dan magang berjenjang sudah dilaksanakan, namun frekuensi pastinya belum dirinci dalam dokumen kajian.
Integrasi dalam RKPD	Belum Ada Bukti	Keterkaitan formal dengan RKPD belum dikutip, meski program ini melekat pada Program Strategis Nasional Koperasi Merah Putih.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Ada" pada rekap SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), meski program ini melekat pada Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan memperoleh skor komposit 4,15 (peringkat kedua dari 12 inovasi).

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.24 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	**Target**	**Realisasi**	**Keterangan**
Jumlah KDKMP terbentuk	148 KDKMP	148 KDKMP	Capaian pembentukan sudah lengkap.
KDKMP dengan rekening lengkap	148 KDKMP	147 dari 148 KDKMP	1 desa (Pakan Dalam) belum memiliki rekening.
KDKMP dengan NIB	148 KDKMB	142 dari 148 KDKMP	6 desa belum menerbitkan NIB.
KDKMP melaksanakan RAT	148 KDKMP	15 dari 148 KDKMP	Kesenjangan terbesar; baru sekitar 10% yang aktif menjalankan RAT.
Skor komposit evaluasi desain kebijakan (skala 0-5)	Skor ≥ 4,0	4,15 (peringkat 2 dari 12)	Nilai tertinggi pada keterukuran dampak dan keberlanjutan kelembagaan.

4.3.2.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Kesenjangan antara jumlah KDKMP yang terbentuk secara legal (148) dengan yang benar-benar aktif menjalankan tata kelola RAT (15) menjadi tantangan utama; status data dukung IGA yang "Belum Ada" turut menambah risiko keberlanjutan program tidak terpantau secara formal.

4.3.2.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.25 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 25)

1. Masalah yang Diselesaikan	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang baru terbentuk belum memiliki kompetensi manajemen, legalitas, dan tata kelola yang memadai untuk beroperasi mandiri.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Pengurus, pengawas, dan anggota 148 KDKMP se-Kabupaten HSS.
3. Titik Masuk	Pendataan calon anggota, anggota, dan pengurus koperasi desa/kelurahan.

4. Langkah-Langkah Kunci	Bimtek manajemen, legalitas, digitalisasi → magang pengurus terpilih → pemantauan administrasi (akta, NPWP, rekening, NIB, RAT).
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Pengurus koperasi desa merasa lebih siap mengelola administrasi karena mendapat bimbingan langsung dan kesempatan magang, bukan hanya pelatihan satu arah; namun sebagian besar pengurus mungkin masih merasa belum percaya diri menyelenggarakan RAT secara mandiri, tecermin dari rendahnya angka pelaksanaan RAT.
6. Efek Terukur	148 KDKMP terbentuk, 147 memiliki rekening, 142 memiliki NIB, namun baru 15 yang melaksanakan RAT.
7. Manfaat yang Lebih Luas	Dukungan nyata daerah terhadap Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta basis kelembagaan ekonomi desa yang lebih kuat.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Koperasi desa yang mandiri, aktif menjalankan usaha nyata, dan terhubung dengan UMKM binaan lain sehingga menjadi motor ekonomi desa berkelanjutan.
Asumsi Kunci	Pengurus dan anggota bersedia menindaklanjuti bimtek dengan konsisten; pendampingan pascalegalitas tersedia; desa memiliki kapasitas administrasi minimal untuk menjalankan RAT.
Pemangku Kepentingan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pemerintah desa/kelurahan, pengurus dan anggota KDKMP, Kementerian Koperasi (Program Strategis Nasional).

4.3.2.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): menuntaskan pembukaan rekening di Desa Pakan Dalam dan penerbitan NIB pada enam desa yang tersisa, serta melengkapi data dukung IGA.
- Jangka menengah (6–18 bulan): memberikan pendampingan pascalegalitas intensif agar KDKMP mampu melaksanakan RAT secara mandiri, ditargetkan meningkat signifikan dari 15 KDKMP saat ini.
- Keterhubungan model: menyambungkan unit usaha KDKMP dengan UMKM binaan Klinik UMKM agar koperasi desa memiliki basis usaha yang nyata dan berkelanjutan.

4.3.3 Klinik UMKM

Tabel A.26 Profil Inovasi Klinik UMKM

1	**Nama Inovasi**	Klinik UMKM
2	**Identitas Instansi Inovator**	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Bagi pelaku UMKM: memperoleh layanan pendampingan, konsultasi, dan fasilitasi gratis meliputi perizinan, sertifikasi halal, digitalisasi, dan akses permodalan. 2. Bagi pemerintah daerah: meningkatnya jumlah usaha yang berpindah dari informal ke formal. 3. Capaian: persentase usaha yang bertransformasi dari informal ke formal (naik kelas) mencapai 113,87% dari target binaan atau setara 1.354 usaha.
4	**Keunggulan Inovasi**	Layanan resmi perangkat daerah dengan target kinerja yang terukur dan capaian melampaui target. Skor komposit 3,70 (peringkat ketiga).
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Pusat layanan pendampingan terpadu bagi pelaku UMKM
6	**Cara Penggunaan Produk**	1. Pelaku UMKM datang ke Klinik UMKM atau dijangkau melalui pembinaan lapangan. 2. Petugas mengidentifikasi kebutuhan usaha, baik perizinan, sertifikasi, digitalisasi, maupun permodalan. 3. Pelaku usaha memperoleh konsultasi dan fasilitasi sesuai kebutuhannya. 4. Dinas mencatat status naik kelas usaha binaan sebagai indikator kinerja.
7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi pelayanan publik Asta Cita: AC 3 - kewirausahaan dan formalisasi usaha Sasaran: pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah se-Kabupaten HSS Pendekatan: layanan konsultasi dan fasilitasi gratis Output: 1.354 usaha naik kelas Indikator keberhasilan: persentase usaha yang bertransformasi ke formal
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.
9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Belum ditemukan aturan keberpihakan yang menjelaskan manfaat lanjutan yang otomatis diperoleh usaha setelah berbadan hukum, sehingga legalisasi berisiko dipahami hanya sebagai pemenuhan administrasi.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Penyusunan aturan insentif bagi UMKM naik kelas, misalnya prioritas pembinaan lanjutan dan pembukaan jalur menjadi penyedia pada SiOPEN HSS, serta integrasi data binaan dengan SADATU dan program tingkat kelurahan.

Gambar A.9 Ilustrasi Klinik UMKM

4.3.3.1 Identitas Inovasi

Tabel A.27 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	Klinik UMKM
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	AC 3 - kewirausahaan dan formalisasi usaha

4.3.3.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Memberikan layanan pendampingan, konsultasi, dan fasilitasi gratis meliputi perizinan, sertifikasi halal, digitalisasi, dan akses permodalan, sehingga usaha informal bertransformasi menjadi formal.

Sasaran Penerima Manfaat: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.3.3.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Loket layanan Klinik UMKM dan tim pembinaan lapangan.
- Materi konsultasi perizinan, sertifikasi halal, digitalisasi, dan permodalan.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.28 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	**Peran Utama**
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM	Menyediakan layanan konsultasi dan mencatat status naik kelas usaha binaan.

Aktor	Peran Utama
Pelaku UMKM	Mendatangi klinik atau dijangkau lewat pembinaan lapangan untuk memperoleh fasilitasi.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Pelaku UMKM datang ke Klinik UMKM atau dijangkau melalui pembinaan lapangan.
- Langkah 2: Petugas mengidentifikasi kebutuhan usaha, baik perizinan, sertifikasi, digitalisasi, maupun permodalan.
- Langkah 3: Pelaku usaha memperoleh konsultasi dan fasilitasi sesuai kebutuhannya.
- Langkah 4: Dinas mencatat status naik kelas usaha binaan sebagai indikator kinerja.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Usaha yang telah berbadan hukum memperoleh manfaat lanjutan otomatis (prioritas pembinaan, akses SiOPEN HSS).

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Layanan konsultasi tatap muka dan pembinaan lapangan sudah berjalan dengan capaian melampaui target; belum terhubung secara sistem dengan SADATU sebagai basis data tunggal UMKM.

e. Keluaran (Output)

1.354 usaha naik kelas (bertransformasi dari informal ke formal), melampaui target kinerja yang ditetapkan.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Usaha memperoleh legalitas dan akses layanan formal (jangka pendek); usaha yang naik kelas memperoleh manfaat lanjutan nyata seperti akses pembiayaan dan peluang menjadi penyedia pemerintah (jangka menengah-panjang, bergantung pada penyusunan aturan insentif).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Belum ditemukan aturan keberpihakan yang menjelaskan manfaat lanjutan yang otomatis diperoleh usaha setelah berbadan hukum, sehingga legalisasi berisiko dipahami hanya sebagai pemenuhan administrasi tanpa insentif konkret.

4.3.3.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.29 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Kolom status pada rekap SKPD belum diisi/tercatat "Belum Ada" oleh instansi pengampu sehingga kesiapan indikator ini belum dapat dinilai dari dokumen rekap.
Ketersediaan dan Peran SDM	Ada Indikasi Awal	Petugas layanan dan tim pembinaan lapangan teridentifikasi aktif dari capaian 1.354 usaha naik kelas, namun dokumen SK formal belum tercantum.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran layanan konsultasi gratis belum tercantum dalam rekap SKPD.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Layanan konsultasi tatap muka dan pembinaan lapangan menjadi alat kerja utama yang terbukti efektif.
Bimtek Inovasi	Belum Ada Bukti	Frekuensi bimtek petugas layanan belum tercatat dalam rekap.
Integrasi dalam RKPD	Belum Ada Bukti	Keterangan program dalam RKPD belum teridentifikasi pada dokumen rekap yang tersedia.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Ada" pada rekap SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), meski capaian 1.354 usaha naik kelas melampaui target dan memperoleh skor komposit 3,70 (peringkat ketiga dari 12 inovasi).

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.30 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	**Target**	**Realisasi**	**Keterangan**
Usaha naik kelas (informal ke formal)	Sesuai target tahunan	1.354 usaha (melampaui target)	Capaian riil terdokumentasi dan melampaui target.
Skor komposit evaluasi desain kebijakan (skala 0-5)	Skor ≥ 3,5	3,70 (peringkat 3 dari 12)	Layanan resmi dengan target kinerja terukur.
Aturan insentif bagi usaha naik kelas	Tersedia dan berlaku	Belum tersedia	Kesenjangan utama yang perlu ditutup.
Integrasi data dengan SADATU	Terintegrasi penuh	Belum terintegrasi	Peluang penguatan tata kelola data lintas inovasi.

4.3.3.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Status data dukung IGA yang "Belum Ada" kontras dengan capaian substantif yang melampaui target (1.354 usaha naik kelas), menunjukkan kesenjangan administratif yang perlu segera ditutup agar kinerja nyata program ini terbaca dalam penilaian inovasi daerah.

4.3.3.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan Klinik UMKM disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.31 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 31)

1. Masalah yang Diselesaikan	Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah beroperasi secara informal tanpa akses perizinan, sertifikasi, digitalisasi, dan permodalan yang memadai.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah se-Kabupaten HSS.
3. Titik Masuk	Kedatangan ke Klinik UMKM atau kontak lewat pembinaan lapangan.
4. Langkah-Langkah Kunci	Identifikasi kebutuhan usaha → konsultasi dan fasilitasi (perizinan/sertifikasi/digitalisasi/permodalan) → pencatatan status naik kelas.

5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Pelaku usaha merasa terbantu karena layanan bersifat gratis dan langsung menjawab kebutuhan spesifik usahanya, bukan pelatihan generik; usaha yang berhasil naik kelas merasa lebih percaya diri dan diakui secara formal, meski sebagian mungkin masih bertanya-tanya manfaat konkret apa yang didapat setelah berbadan hukum.
6. Efek Terukur	1.354 usaha naik kelas dari informal ke formal, melampaui target kinerja yang ditetapkan.
7. Manfaat yang Lebih Luas	Meningkatnya jumlah usaha formal yang dapat diakses datanya untuk kebijakan pemberdayaan ekonomi daerah secara lebih tepat sasaran.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Ekosistem UMKM Kabupaten HSS yang mayoritas berbadan hukum, memiliki akses permodalan formal, dan menjadi penyedia dalam pengadaan pemerintah daerah.
Asumsi Kunci	Pelaku usaha bersedia menindaklanjuti proses formalisasi hingga tuntas; insentif lanjutan bagi usaha naik kelas benar-benar disusun dan diterapkan.
Pemangku Kepentingan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM, SADATU (basis data), Layanan Pengadaan Secara Elektronik/SiOPEN HSS (peluang pasar lanjutan).

4.3.3.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): melengkapi data dukung IGA agar sejalan dengan capaian substantif yang sudah melampaui target.
- Jangka menengah (6–18 bulan): menyusun aturan insentif bagi UMKM naik kelas (prioritas pembinaan lanjutan, jalur menjadi penyedia SiOPEN HSS) dan mengintegrasikan data binaan dengan SADATU.
- Keterhubungan model: menjadi simpul layanan formalisasi usaha yang terhubung dengan Inkubator Dopat, SADATU, dan KUBAR dalam model penguatan ekosistem kewirausahaan UMKM.

4.3.4 Sadatu

Tabel A.32 Profil Inovasi SADATU

1	**Nama Inovasi**	SADATU (Sistem Akselerasi Data Akurat Terpadu UMKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
2	**Identitas Instansi Inovator**	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Terwujudnya basis data UMKM daerah yang valid dan selalu diperbarui sebagai satu-satunya sumber data resmi. 2. Mempercepat penyaluran bantuan modal, sertifikasi halal dan P-IRT, pembinaan, serta pelatihan agar tepat sasaran. 3. Mempermudah promosi produk lokal, akses pembiayaan, dan perluasan pasar bagi usaha mikro. 4. Meningkatkan efisiensi perencanaan kebijakan ekonomi daerah berbasis data geospasial dan sektoral.
4	**Keunggulan Inovasi**	Cakupan domain ekosistem paling luas di antara inovasi berbasis data, menyentuh domain Kebijakan, Dukungan, Pembiayaan, dan Pasar sekaligus. Skor komposit 3,50 (peringkat keempat).
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Platform digital terpadu pendataan dan pemetaan UMKM
6	**Cara Penggunaan Produk**	1. Petugas mendata profil pelaku usaha, jenis produk, legalitas, potensi usaha, dan kebutuhan pendampingan. 2. Data diunggah dan diperbarui pada sistem secara berkala. 3. Perangkat daerah menggunakan data untuk menentukan sasaran bantuan, pelatihan, dan sertifikasi. 4. Data dipakai sebagai dasar perencanaan program pengembangan ekonomi daerah.
7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi tata kelola pemerintahan daerah Asta Cita: AC 3 - tata kelola data UMKM Sasaran: seluruh pelaku UMKM Kabupaten HSS Pendekatan: pendataan digital terpadu berbasis geospasial Output: basis data UMKM terintegrasi Indikator keberhasilan: cakupan dan kemutakhiran data UMKM
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.
9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Sistem masih pada tahap awal implementasi sehingga capaian kuantitatif berupa jumlah UMKM terdata dan tingkat kemutakhiran data belum tersedia.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Penetapan SADATU sebagai basis data rujukan tunggal UMKM daerah melalui keputusan kepala daerah, serta penyambungan data dengan GIAT UMKM GO ON, PETA DASEL, dan direktori UMKM pada SI PANDU WISATA V2.0.

Gambar A.10 Ilustrasi SADATU

4.3.4.1 Identitas Inovasi

Tabel A.33 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	SADATU (Sistem Akselerasi Data Akurat Terpadu UMKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025; sistem masih pada tahap awal implementasi.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	AC 3 - tata kelola data UMKM

4.3.4.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Mewujudkan basis data UMKM daerah yang valid dan selalu diperbarui sebagai satu-satunya sumber data resmi, guna mempercepat penyaluran bantuan modal, sertifikasi, pembinaan, dan pelatihan yang tepat sasaran.

Sasaran Penerima Manfaat: Seluruh pelaku UMKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai subjek pendataan.

4.3.4.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Profil pelaku usaha: jenis produk, legalitas, potensi usaha, kebutuhan pendampingan.
- Platform digital pendataan dan pemetaan berbasis geospasial.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.34 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	**Peran Utama**
Petugas pendataan	Mendata profil, legalitas, dan kebutuhan pendampingan pelaku usaha.
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM	Mengelola pembaruan data dan penyediaan akses bagi perangkat daerah lain.
Perangkat daerah pengguna data	Memakai data SADATU untuk menentukan sasaran bantuan, pelatihan, dan sertifikasi.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Petugas mendata profil pelaku usaha, jenis produk, legalitas, potensi usaha, dan kebutuhan pendampingan.

- Langkah 2: Data diunggah dan diperbarui pada sistem secara berkala.
- Langkah 3: Perangkat daerah menggunakan data untuk menentukan sasaran bantuan, pelatihan, dan sertifikasi.
- Langkah 4: Data dipakai sebagai dasar perencanaan program pengembangan ekonomi daerah.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) SADATU ditetapkan sebagai basis data rujukan tunggal melalui keputusan kepala daerah dan disambungkan dengan GIAT UMKM GO ON, PETA DASEL, dan direktori UMKM pada SI PANDU WISATA V2.0.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Platform digital pendataan geospasial menjadi alat kerja utama; sistem masih pada tahap awal implementasi sehingga interoperabilitas dengan basis data UMKM lain (GIAT UMKM GO ON, PETA DASEL) belum terwujud.

e. Keluaran (Output)

Basis data UMKM terintegrasi yang mencakup profil, legalitas, dan potensi usaha.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Data UMKM yang lebih akurat untuk penyaluran bantuan (jangka pendek); SADATU menjadi rujukan tunggal data UMKM daerah yang terhubung dengan seluruh sistem UMKM lain (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Sistem masih pada tahap awal implementasi sehingga capaian kuantitatif berupa jumlah UMKM terdata dan tingkat kemutakhiran data belum tersedia.

4.3.4.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.35 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Kolom status pada rekap SKPD belum diisi/tercatat "Belum Ada" oleh instansi pengampu sehingga kesiapan indikator ini belum dapat dinilai dari dokumen rekap.
Ketersediaan dan Peran SDM	Ada Indikasi Awal	Petugas pendataan teridentifikasi menjalankan sistem, namun dokumen SK/penugasan formal belum tercantum.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran pengembangan platform digital belum tercantum dalam rekap SKPD.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Platform digital geospasial menjadi alat kerja utama dan sudah mulai dioperasikan meski di tahap awal.
Bimtek Inovasi	Belum Ada Bukti	Frekuensi bimtek petugas pendataan belum tercatat dalam rekap.
Integrasi dalam RKPD	Belum Ada Bukti	Keterangan program dalam RKPD belum teridentifikasi pada dokumen rekap yang tersedia.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Ada" pada rekap SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah); inovasi ini memiliki cakupan domain ekosistem paling luas (Kebijakan, Dukungan, Pembiayaan, Pasar) dengan skor komposit 3,50 (peringkat keempat).

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.36 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Cakupan UMKM terdata	Seluruh UMKM Kabupaten HSS	Belum tersedia dalam angka	Sistem masih tahap awal implementasi.
Tingkat kemutakhiran data	Diperbarui berkala	Belum tersedia	Perlu mekanisme pembaruan rutin yang terjadwal.

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Skor komposit evaluasi desain kebijakan (skala 0-5)	Skor ≥ 3,5	3,50 (peringkat 4 dari 12)	Cakupan domain ekosistem paling luas di antara inovasi berbasis data.
Integrasi dengan basis data UMKM lain (GIAT UMKM GO ON, PETA DASEL)	Terintegrasi penuh	Belum terintegrasi	Peluang penguatan tata kelola data lintas kelurahan/kecamatan.

4.3.4.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Sebagai sistem yang baru pada tahap awal, SADATU menghadapi risiko duplikasi data dengan pendataan tingkat kelurahan/kecamatan (GIAT UMKM GO ON, PETA DASEL) apabila penetapan sebagai basis data rujukan tunggal tidak segera dilakukan.

4.3.4.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan SADATU (Sistem Akselerasi Data Akurat Terpadu UMKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.37 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 37)

1. Masalah yang Diselesaikan	Data UMKM daerah tersebar di berbagai sumber tanpa basis data tunggal yang valid dan termutakhirkan, sehingga penyaluran bantuan dan program berisiko tidak tepat sasaran.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Seluruh pelaku UMKM Kabupaten HSS dan perangkat daerah pengguna data.
3. Titik Masuk	Pendataan profil pelaku usaha oleh petugas.
4. Langkah-Langkah Kunci	Pendataan profil dan legalitas → pembaruan data berkala → pemanfaatan data oleh perangkat daerah untuk sasaran bantuan.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Pelaku UMKM yang datanya masuk sistem berpotensi merasa lebih mudah dijangkau program bantuan karena profil usahanya sudah terdata, dibanding harus berulang kali mengisi formulir berbeda di setiap dinas; perangkat daerah pengguna data merasa terbantu memiliki satu rujukan data yang bisa diandalkan, meski manfaat ini baru terasa penuh setelah integrasi lintas sistem selesai.

6. Efek Terukur	Basis data UMKM terintegrasi mencakup profil, legalitas, dan potensi usaha (cakupan kuantitatif belum tersedia karena tahap awal implementasi).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Mempermudah promosi produk lokal, akses pembiayaan, dan perluasan pasar berbasis data yang akurat.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	SADATU menjadi satu-satunya sumber data resmi UMKM daerah yang terhubung dengan seluruh sistem UMKM lain, mendukung perencanaan ekonomi daerah berbasis bukti.
Asumsi Kunci	Petugas pendataan konsisten memperbarui data; perangkat daerah lain bersedia memakai SADATU alih-alih membangun basis data sendiri; penetapan kepala daerah atas status rujukan tunggal terwujud.
Pemangku Kepentingan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, seluruh perangkat daerah pengguna data UMKM, Kelurahan Kandangan Utara (GIAT UMKM GO ON), Kecamatan Daha Selatan (PETA DASEL).

4.3.4.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): menetapkan SADATU sebagai basis data rujukan tunggal UMKM daerah melalui keputusan kepala daerah.
- Jangka menengah (6–18 bulan): menyambungkan data dengan GIAT UMKM GO ON, PETA DASEL, dan direktori UMKM pada SI PANDU WISATA V2.0, serta mempublikasikan cakupan dan kemutakhiran data secara berkala.
- Keterhubungan model: menjadi tulang punggung data bagi seluruh inovasi UMKM lain dalam model penguatan ekosistem kewirausahaan.

4.3.5 Giat UMKM Go On

Tabel A.38 Profil Inovasi GIAT UMKM GO ON

1	**Nama Inovasi**	GIAT UMKM GO ON (Galeri Informasi dan Aktivitas Terpadu UMKM Kandangan Utara Go *Online*)
2	**Identitas Instansi Inovator**	Pemerintah Kelurahan Kandangan Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Terdatanya pelaku UMKM secara digital dan terklasifikasi menurut jenis usaha, skala produksi, dan kebutuhan pengembangan. 2. Meningkatnya kemampuan pelaku usaha melalui pelatihan manajemen keuangan, pengemasan produk, pemasaran digital, dan perizinan. 3. Terbukanya akses permodalan melalui mitra perbankan dan bantuan instansi pemerintah. 4. Meningkatnya penggunaan media sosial dan *marketplace* sehingga jangkauan pasar meluas sampai ke luar daerah.
4	**Keunggulan Inovasi**	Satu-satunya inovasi tingkat kelurahan yang menyebut kemitraan lembaga keuangan secara jelas dalam rancangan programnya, sehingga menjadi rujukan penguatan domain Pembiayaan. Skor komposit 3,35 (peringkat kelima).
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Layanan terpadu tingkat kelurahan berbasis pendataan dan digitalisasi
6	**Cara Penggunaan Produk**	1. Kelurahan mendata seluruh pelaku UMKM di wilayahnya. 2. Pelaku usaha memperoleh pembinaan dan pendampingan rutin. 3. Kelurahan menghubungkan pelaku usaha dengan mitra perbankan dan program bantuan. 4. Pelaku usaha diarahkan memakai media sosial dan *marketplace* untuk pemasaran.
7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi pelayanan publik tingkat kelurahan Asta Cita: AC 3 - kewirausahaan, beririsan AC 6 Sasaran: pelaku UMKM Kelurahan Kandangan Utara Pendekatan: pendataan, pembinaan, dan digitalisasi pemasaran Output: UMKM terdata digital dan aktif memakai kanal pemasaran daring Indikator keberhasilan: jumlah UMKM terdata, terlatih, dan memperoleh permodalan
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.
9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Jumlah pelaku UMKM yang didata masih tertulis sebagai penanda sementara pada dokumen inovasi. Program juga belum memiliki payung kebijakan tingkat kabupaten sehingga keberlanjutannya bergantung pada kepemimpinan kelurahan.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Penetapan payung kebijakan tingkat kabupaten agar model ini dapat direplikasi, pengisian data kuantitatif capaian, serta penggabungan layanan dengan PACARKU menjadi satu pintu layanan ekonomi warga.

Gambar A.11 Ilustrasi GIAT UMKM GO ON

4.3.5.1 Identitas Inovasi

Tabel A.39 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	GIAT UMKM GO ON (Galeri Informasi dan Aktivitas Terpadu UMKM Kandangan Utara Go *Online*)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Pemerintah Kelurahan Kandangan Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	AC 3 - kewirausahaan, beririsan AC 6

4.3.5.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Mendata pelaku UMKM secara digital, meningkatkan kemampuan usaha lewat pelatihan, dan membuka akses permodalan melalui kemitraan lembaga keuangan.

Sasaran Penerima Manfaat: Pelaku UMKM Kelurahan Kandangan Utara.

4.3.5.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Pendataan pelaku UMKM tingkat kelurahan.
- Materi pembinaan manajemen keuangan, pengemasan, dan pemasaran digital.
- Kemitraan dengan lembaga perbankan.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.40 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	**Peran Utama**
Pemerintah Kelurahan Kandangan Utara	Mendata UMKM, menyelenggarakan pembinaan, dan menghubungkan dengan mitra perbankan.
Pelaku UMKM	Mengikuti pendataan dan pembinaan, memasarkan produk lewat media sosial/*marketplace*.
Mitra perbankan	Menyediakan akses permodalan bagi UMKM yang direkomendasikan kelurahan.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Kelurahan mendata seluruh pelaku UMKM di wilayahnya.

- Langkah 2: Pelaku usaha memperoleh pembinaan dan pendampingan rutin.
- Langkah 3: Kelurahan menghubungkan pelaku usaha dengan mitra perbankan dan program bantuan.
- Langkah 4: Pelaku usaha diarahkan memakai media sosial dan *marketplace* untuk pemasaran.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Program memperoleh payung kebijakan tingkat kabupaten agar dapat direplikasi ke kelurahan/desa lain.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Pembinaan dan digitalisasi pemasaran berjalan di tingkat kelurahan; satu-satunya inovasi tingkat kelurahan yang menyebut kemitraan lembaga keuangan secara jelas, namun belum ada sistem digital khusus dan payung kebijakan kabupaten.

e. Keluaran (Output)

UMKM terdata secara digital dan aktif memakai kanal pemasaran daring (jumlah pasti belum dipublikasikan).

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

UMKM Kelurahan Kandangan Utara memiliki data terklasifikasi dan mulai memasarkan produk secara digital (jangka pendek); replikasi model layanan terpadu tingkat kelurahan ke wilayah lain (jangka menengah-panjang, bergantung pada payung kebijakan kabupaten).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Jumlah pelaku UMKM yang didata masih tertulis sebagai penanda sementara pada dokumen inovasi. Program juga belum memiliki payung kebijakan tingkat kabupaten sehingga keberlanjutannya bergantung pada kepemimpinan kelurahan.

4.3.5.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.41 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Status Data Dukung belum diisi pada rekap SKPD untuk kelurahan ini.
Ketersediaan dan Peran SDM	Belum Ada Bukti	Jumlah dan peran petugas pendata/pembina UMKM tingkat kelurahan belum didokumentasikan.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran kelurahan untuk program ini belum tercantum.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Pendataan digital dan pemanfaatan media sosial/*marketplace* teridentifikasi sebagai alat kerja utama.
Bimtek Inovasi	Belum Ada Bukti	Frekuensi bimtek/pembinaan bagi pelaku UMKM belum tercatat.
Integrasi dalam RKPD	Belum Ada Bukti	Keterangan program dalam RKP Kelurahan/RKPD belum teridentifikasi pada dokumen rekap yang tersedia.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): Kolom status Data Dukung pada rekap SKPD (Kelurahan Kandangan Utara) belum diisi/kosong, sehingga kesiapan indikator IGA belum dapat dinilai.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.42 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah UMKM terdata digital	Seluruh UMKM kelurahan	Belum tersedia dalam angka pasti	Data masih bersifat penanda sementara.
UMKM aktif memakai kanal pemasaran daring	Meningkat tiap semester	Belum tersedia	Perlu pencatatan rutin oleh kelurahan.
UMKM dengan akses permodalan lewat mitra perbankan	Meningkat dari *baseline*	Belum tersedia	Menjadi keunggulan unik yang perlu didata lebih rinci.

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Payung kebijakan tingkat kabupaten	Tersedia dan berlaku	Belum tersedia	Prasyarat replikasi ke kelurahan/desa lain.

4.3.5.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Sebagai inovasi tingkat kelurahan tanpa payung kebijakan kabupaten, keberlanjutan GIAT UMKM GO ON sangat bergantung pada kepemimpinan lokal; risiko program terhenti meningkat bila terjadi pergantian kepemimpinan kelurahan.

4.3.5.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan GIAT UMKM GO ON (Galeri Informasi dan Aktivitas Terpadu UMKM Kandangan Utara Go *Online*) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.43 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 43)

1. Masalah yang Diselesaikan	Pelaku UMKM tingkat kelurahan belum terdata secara digital dan belum memiliki akses pemasaran daring maupun permodalan yang terhubung.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Pelaku UMKM Kelurahan Kandangan Utara.
3. Titik Masuk	Pendataan pelaku UMKM oleh pemerintah kelurahan.
4. Langkah-Langkah Kunci	Pendataan digital → pembinaan rutin → penghubungan dengan mitra perbankan → pengarahan ke media sosial/*marketplace*.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Pelaku UMKM merasa lebih dekat dengan layanan pemerintah karena berada di tingkat kelurahan, tidak perlu jauh-jauh ke kantor dinas kabupaten; pelaku usaha yang berhasil terhubung dengan mitra perbankan merasakan langsung manfaat konkret berupa akses modal yang sebelumnya sulit dijangkau.
6. Efek Terukur	UMKM terdata digital dan aktif memakai kanal pemasaran daring (jumlah pasti belum dipublikasikan dalam dokumen rekap).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Terbukanya akses permodalan lewat mitra perbankan dan meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam manajemen keuangan, pengemasan, dan pemasaran digital.

8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Model layanan UMKM terpadu tingkat kelurahan yang direplikasi ke seluruh kelurahan/desa di Kabupaten HSS, didukung payung kebijakan kabupaten.
Asumsi Kunci	Kepemimpinan kelurahan berkelanjutan mendukung program; mitra perbankan tetap bersedia menerima rujukan; pelaku usaha mau beradaptasi dengan pemasaran digital.
Pemangku Kepentingan	Pemerintah Kelurahan Kandangan Utara, pelaku UMKM, mitra perbankan, Dinas Tenaga Kerja Koperasi UKM (untuk payung kebijakan replikasi).

4.3.5.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mengisi data kuantitatif capaian jumlah UMKM terdata dan mengajukan usul payung kebijakan tingkat kabupaten.
- Jangka menengah (6–18 bulan): menggabungkan layanan dengan PACARKU (platform kerja Kelurahan Kandangan Utara) menjadi satu pintu layanan ekonomi warga, serta menyambungkan data dengan SADATU.
- Keterhubungan model: menjadi model rintisan replikasi layanan UMKM terpadu tingkat kelurahan/desa se-Kabupaten HSS.

4.3.6 Terasa Berkah

Tabel A.44 Profil Inovasi TERASA BERKAH

1	**Nama Inovasi**	TERASA BERKAH (Tera/Tera Ulang di Pasar Berkesempatan Bawa Hadiah)
2	**Identitas Instansi Inovator**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui UPTD Metrologi Legal
3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Bagi pelaku usaha: layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) datang langsung ke pasar sehingga pedagang tidak perlu ke kantor layanan. 2. Bagi konsumen: berkurangnya potensi kecurangan transaksi dan meningkatnya kepercayaan terhadap alat ukur pedagang. 3. Bagi pemerintah daerah: meningkatnya kepatuhan tera tepat waktu dan tumbuhnya budaya sadar ukur di kalangan pelaku usaha kecil.
4	**Keunggulan Inovasi**	Mengubah layanan tera dari menunggu di kantor menjadi jemput bola ke pasar, ditambah undian berhadiah sebagai pendorong kepatuhan. Melekat pada mandat UPTD Metrologi Legal sehingga dasar kelembagaannya kuat. Skor komposit 3,20.
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Pendekatan jemput bola dengan insentif undian berhadiah

6	**Cara Penggunaan Produk**	1. UPTD Metrologi Legal menyusun jadwal layanan keliling ke pasar-pasar tradisional. 2. Petugas membawa alat ukur resmi dan perangkat pendukung ke lokasi pasar. 3. Pedagang menyerahkan UTTP untuk ditera atau ditera ulang di tempat. 4. Pedagang yang menera tepat waktu memperoleh kesempatan mengikuti undian berhadiah. 5. Sosialisasi dilakukan melalui media lokal dan interaksi langsung di pasar.
7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi pelayanan publik Asta Cita: AC 3 - perlindungan pelaku usaha dan konsumen Sasaran: pedagang pasar tradisional pemilik UTTP Pendekatan: layanan *mobile* dan sistem jemput bola Output: meningkatnya jumlah UTTP yang ditera tepat waktu Indikator keberhasilan: partisipasi pedagang dan penurunan pelanggaran tera
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.
9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Laporan pemantauan menyebutkan adanya peningkatan partisipasi dan penurunan pelanggaran, namun belum disertai angka capaian yang dipublikasikan.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Publikasi data capaian tera dan tera ulang secara berkala, serta perluasan cakupan layanan ke seluruh pasar di sebelas kecamatan.

Gambar A.12 Ilustrasi TERASA BERKAH

4.3.6.1 Identitas Inovasi

Tabel A.45 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	TERASA BERKAH (Tera/Tera Ulang di Pasar Berkesempatan Bawa Hadiah)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.

SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui UPTD Metrologi Legal
Kategori Asta Cita	AC 3 - perlindungan pelaku usaha dan konsumen

4.3.6.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Menyediakan layanan tera dan tera ulang UTTP secara jemput bola ke pasar, disertai insentif undian berhadiah untuk mendorong kepatuhan pedagang.

Sasaran Penerima Manfaat: Pedagang pasar tradisional pemilik alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP).

4.3.6.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Jadwal layanan keliling UPTD Metrologi Legal ke pasar-pasar tradisional.
- Alat ukur resmi dan perangkat pendukung tera.
- Program undian berhadiah bagi pedagang yang tera tepat waktu.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.46 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
UPTD Metrologi Legal	Menyusun jadwal, membawa alat ukur resmi, dan melaksanakan tera/tera ulang di lokasi pasar.
Pedagang pasar	Menyerahkan UTTP untuk ditera dan mengikuti undian berhadiah.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: UPTD Metrologi Legal menyusun jadwal layanan keliling ke pasar-pasar tradisional.
- Langkah 2: Petugas membawa alat ukur resmi dan perangkat pendukung ke lokasi pasar.
- Langkah 3: Pedagang menyerahkan UTTP untuk ditera atau ditera ulang di tempat.
- Langkah 4: Pedagang yang menera tepat waktu memperoleh kesempatan mengikuti undian berhadiah.
- Langkah 5: Sosialisasi dilakukan melalui media lokal dan interaksi langsung di pasar.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Layanan jemput bola dengan alat ukur resmi menjadi alat kerja utama; program undian berhadiah menjadi mekanisme insentif non-digital yang efektif mendorong partisipasi.

e. Keluaran (Output)

Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera tepat waktu dan menurunnya pelanggaran tera (data kuantitatif pasti belum dipublikasikan).

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Kepercayaan konsumen terhadap alat ukur pedagang meningkat (jangka pendek); seluruh pasar di sebelas kecamatan terlayani tera secara rutin dan berkurangnya kecurangan transaksi (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Laporan pemantauan menyebutkan adanya peningkatan partisipasi dan penurunan pelanggaran, namun belum disertai angka capaian yang dipublikasikan.

4.3.6.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.47 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Rekap SKPD mencatat status "Data Dukung Belum Lengkap" untuk inovasi ini; sebagian dokumen kemungkinan tersedia namun belum lengkap per indikator.
Ketersediaan dan Peran SDM	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Petugas UPTD Metrologi Legal teridentifikasi sebagai pelaksana rutin, rincian jumlah dan peran per personil belum lengkap.
Dukungan Anggaran	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Anggaran operasional layanan keliling dan hadiah undian kemungkinan tersedia namun belum lengkap didokumentasikan.

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Alat ukur resmi dan sistem jemput bola menjadi alat kerja utama yang sudah terbukti berjalan.
Bimtek Inovasi	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Frekuensi bimtek petugas metrologi kemungkinan tersedia namun belum lengkap didokumentasikan.
Integrasi dalam RKPD	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Keterkaitan dengan RKPD kemungkinan tersedia namun belum lengkap didokumentasikan.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Lengkap" pada rekap SKPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan).

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.48 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah UTTP ditera tepat waktu	Meningkat dari *baseline*	Disebut meningkat, angka belum tersedia	Perlu publikasi data capaian berkala.
Tingkat pelanggaran tera	Menurun dari *baseline*	Disebut menurun, angka belum tersedia	Indikator utama keberhasilan perlindungan konsumen.
Cakupan pasar terlayani	Seluruh pasar di 11 kecamatan	Belum dipetakan seluruhnya	Peluang perluasan cakupan layanan.
Skor komposit evaluasi desain kebijakan (skala 0-5)	Skor ≥ 3,0	3,20	Melekat pada mandat UPTD Metrologi Legal sehingga dasar kelembagaan kuat.

4.3.6.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Ketiadaan angka pasti pada capaian yang disebut meningkat (partisipasi tera, penurunan pelanggaran) menyulitkan verifikasi independen atas klaim keberhasilan program, meski status data dukung IGA sudah pada tahap "Belum Lengkap" (lebih baik dari status "Belum Ada").

4.3.6.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan TERASA BERKAH (Tera/Tera Ulang di Pasar Berkesempatan Bawa Hadiah) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY

Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.49 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 49)

1. Masalah yang Diselesaikan	Pedagang pasar tradisional kesulitan menera UTTP karena harus datang ke kantor layanan, berisiko menimbulkan kecurangan transaksi akibat alat ukur tidak terkalibrasi.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Pedagang pasar tradisional pemilik UTTP.
3. Titik Masuk	Kedatangan petugas UPTD Metrologi Legal ke lokasi pasar sesuai jadwal keliling.
4. Langkah-Langkah Kunci	Penyerahan UTTP di tempat → proses tera/tera ulang → partisipasi undian berhadiah bagi yang tepat waktu.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Pedagang merasa terbantu karena tidak perlu meninggalkan lapak dan menempuh perjalanan ke kantor layanan; kesempatan undian berhadiah membuat pedagang merasa proses tera bukan beban administratif semata, melainkan momen yang ditunggu; konsumen pun berpotensi merasa lebih percaya pada takaran yang dipakai pedagang.
6. Efek Terukur	Peningkatan partisipasi tera dan penurunan pelanggaran (disebutkan dalam laporan pemantauan, namun angka pasti belum dipublikasikan).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Berkurangnya potensi kecurangan transaksi dan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap alat ukur pedagang di seluruh pasar tradisional.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Seluruh pasar tradisional di sebelas kecamatan Kabupaten HSS terlayani tera secara rutin, menjadikan transaksi pasar yang adil dan terpercaya sebagai norma, bukan pengecualian.
Asumsi Kunci	Pedagang bersedia menyerahkan UTTP saat petugas datang; jadwal layanan keliling konsisten dan diketahui pedagang; insentif undian tetap menarik partisipasi dari waktu ke waktu.
Pemangku Kepentingan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (UPTD Metrologi Legal), pedagang pasar tradisional, pengelola pasar, konsumen.

4.3.6.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mempublikasikan data capaian tera dan tera ulang secara berkala (jumlah UTTP ditera, tingkat pelanggaran) untuk melengkapi status data dukung IGA.
- Jangka menengah (6–18 bulan): memperluas cakupan layanan ke seluruh pasar di sebelas kecamatan secara terjadwal dan terpetakan.
- Keterhubungan model: melengkapi ekosistem perlindungan pelaku usaha dan konsumen bersama Kampung Kuliner dalam ranah perdagangan pasar tradisional.

4.3.7 Kampung Kuliner

Tabel A.50 Profil Inovasi Kampung Kuliner

1	**Nama Inovasi**	Kampung Kuliner
2	**Identitas Instansi Inovator**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Bagi pedagang: tersedianya kawasan berjualan tetap dengan fasilitas tenda, meja, dan kursi serta arus pengunjung yang ramai. 2. Bagi masyarakat: tersedianya ruang kuliner tradisional, modern, dan kekinian dengan harga terjangkau. 3. Bagi daerah: menguatnya identitas kuliner lokal dan bergeraknya ekonomi rakyat pada akhir pekan. 4. Capaian: jumlah pedagang bertambah dari sekitar 40 orang pada awal pelaksanaan menjadi 33 pedagang eks-HSS Expo, 12 pedagang karasmin, dan penambahan pedagang tetap MTQ dalam tujuh minggu pelaksanaan.
4	**Keunggulan Inovasi**	Diresmikan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan pada September 2023 dan menjadi satu-satunya inovasi yang menyediakan ruang pasar fisik bagi pelaku usaha kuliner. Skor komposit 3,05.
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Penyediaan kawasan ekonomi malam berbasis komunitas pedagang
6	**Cara Penggunaan Produk**	1. Dinas menetapkan lokasi dan jadwal penyelenggaraan, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu sore hingga malam di halaman MTQ dan seputaran Lapangan Lambung Mangkurat. 2. Pedagang terdaftar menempati lapak dengan fasilitas yang disediakan dinas. 3. Kegiatan dilengkapi musik langsung serta lapak pakaian dan mainan anak sebagai daya tarik tambahan. 4. Dinas memantau jumlah pedagang dan animo pengunjung setiap pekan.

7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi daerah lainnya (pengembangan kawasan ekonomi) Asta Cita: AC 3 - kewirausahaan, beririsan AC 2 - ekonomi kreatif Sasaran: pedagang kuliner dan masyarakat umum Pendekatan: penyediaan ruang usaha bersama Output: kawasan kuliner aktif tiga hari dalam sepekan Indikator keberhasilan: jumlah pedagang, jumlah pengunjung, dan omzet pedagang
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.
9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Fasilitas yang tersedia belum mencukupi untuk menampung ribuan pengunjung setiap pekan. Data omzet pedagang juga belum tercatat secara resmi meskipun disebutkan meningkat.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Perluasan pembiayaan modal usaha bagi pedagang melalui kemitraan perbankan yang sudah terjalin, pencatatan omzet secara berkala, serta promosi digital kawasan.

Gambar A.13 Ilustrasi Kampung Kuliner

4.3.7.1 Identitas Inovasi

Tabel A.51 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	Kampung Kuliner
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Diresmikan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan pada September 2023.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	AC 3 - kewirausahaan, beririsan AC 2 - ekonomi kreatif

4.3.7.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Menyediakan kawasan berjualan tetap dengan fasilitas bagi pedagang kuliner, sekaligus ruang publik kuliner tradisional, modern, dan kekinian yang terjangkau bagi masyarakat.

Sasaran Penerima Manfaat: Pedagang kuliner dan masyarakat umum pengunjung kawasan kuliner.

4.3.7.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Lokasi tetap: halaman MTQ dan seputaran Lapangan Lambung Mangkurat.
- Fasilitas tenda, meja, dan kursi bagi pedagang terdaftar.
- Jadwal penyelenggaraan Jumat, Sabtu, Minggu sore hingga malam.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.52 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Menetapkan lokasi, jadwal, dan fasilitas, serta memantau jumlah pedagang dan pengunjung.
Pedagang kuliner terdaftar	Menempati lapak dan berjualan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Masyarakat umum	Berkunjung dan berbelanja kuliner tradisional, modern, dan kekinian.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Dinas menetapkan lokasi dan jadwal penyelenggaraan (Jumat, Sabtu, Minggu sore hingga malam).
- Langkah 2: Pedagang terdaftar menempati lapak dengan fasilitas yang disediakan dinas.
- Langkah 3: Kegiatan dilengkapi musik langsung serta lapak pakaian dan mainan anak sebagai daya tarik tambahan.
- Langkah 4: Dinas memantau jumlah pedagang dan animo pengunjung setiap pekan.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Pencatatan omzet pedagang secara berkala dan perluasan pembiayaan modal usaha melalui kemitraan perbankan.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Kawasan fisik dengan fasilitas dasar (tenda, meja, kursi) menjadi alat kerja utama; belum ada sistem pencatatan omzet digital maupun promosi digital kawasan secara terstruktur.

e. Keluaran (Output)

Kawasan kuliner aktif tiga hari dalam sepekan dengan animo pengunjung yang tercatat ramai, meski belum dalam angka pasti.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Pedagang memiliki ruang berjualan tetap dengan arus pengunjung yang konsisten (jangka pendek); kawasan menjadi identitas kuliner lokal yang menggerakkan ekonomi malam kabupaten secara berkelanjutan (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Fasilitas yang tersedia belum mencukupi untuk menampung ribuan pengunjung setiap pekan. Data omzet pedagang juga belum tercatat secara resmi meskipun disebutkan meningkat.

4.3.7.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.53 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Rekap SKPD mencatat status "Data Dukung Belum Lengkap" untuk inovasi ini; sebagian dokumen kemungkinan tersedia namun belum lengkap per indikator.
Ketersediaan dan Peran SDM	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Petugas dinas pengelola kawasan teridentifikasi aktif, rincian jumlah dan peran belum lengkap didokumentasikan.
Dukungan Anggaran	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Anggaran fasilitas kawasan (tenda, meja, kursi) kemungkinan tersedia namun belum lengkap didokumentasikan.

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Fasilitas fisik kawasan dan jadwal tetap menjadi alat kerja utama yang sudah beroperasi sejak 2023.
Bimtek Inovasi	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Frekuensi bimtek pengelolaan kawasan kemungkinan tersedia namun belum lengkap didokumentasikan.
Integrasi dalam RKPD	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Keterkaitan dengan RKPD kemungkinan tersedia namun belum lengkap didokumentasikan.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Lengkap" pada rekap SKPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan).

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.54 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah pedagang terdaftar	Meningkat dari *baseline*	Belum tersedia dalam angka	Perlu pencatatan rutin oleh dinas.
Jumlah pengunjung mingguan	Meningkat dari *baseline*	Disebut ramai, angka belum tersedia	Fasilitas belum mencukupi untuk volume pengunjung saat ini.
Omzet pedagang	Meningkat dari *baseline*	Disebut meningkat, angka belum tersedia	Indikator dampak ekonomi langsung yang perlu dicatat.
Skor komposit evaluasi desain kebijakan (skala 0-5)	Skor ≥ 3,0	3,05	Satu-satunya inovasi yang menyediakan ruang pasar fisik bagi pelaku usaha kuliner.

4.3.7.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Kesenjangan antara animo pengunjung yang tinggi (disebut ribuan setiap pekan) dengan fasilitas yang belum mencukupi berisiko menurunkan kualitas pengalaman pengunjung dan pedagang jika tidak segera diperluas.

4.3.7.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan Kampung Kuliner disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.55 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 55)

1. Masalah yang Diselesaikan	Pedagang kuliner tidak memiliki ruang berjualan tetap yang layak, sementara masyarakat membutuhkan ruang publik kuliner yang terjangkau dan representatif.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Pedagang kuliner dan masyarakat umum Kabupaten HSS.
3. Titik Masuk	Pendaftaran pedagang untuk menempati lapak di kawasan yang ditetapkan dinas.
4. Langkah-Langkah Kunci	Penempatan lapak dengan fasilitas dasar → penyelenggaraan tiga hari sepekan → kegiatan pelengkap (musik, lapak tambahan) → pemantauan animo mingguan.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Pedagang merasakan langsung kepastian tempat berjualan dan arus pengunjung yang ramai tanpa perlu mencari lokasi sendiri; pengunjung merasakan suasana ekonomi malam yang hidup dengan pilihan kuliner beragam dalam satu kawasan, ditambah hiburan musik langsung yang membuat kunjungan terasa lebih dari sekadar berbelanja.
6. Efek Terukur	Kawasan kuliner aktif tiga hari dalam sepekan dengan animo pengunjung yang ramai (data kuantitatif pasti belum dipublikasikan).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Menguatnya identitas kuliner lokal dan bergeraknya perekonomian malam kabupaten yang sebelumnya belum memiliki ruang publik serupa.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Kampung Kuliner menjadi destinasi ekonomi malam permanen Kabupaten HSS dengan fasilitas memadai, data omzet yang terpantau, dan promosi digital yang menjangkau wisatawan luar daerah.
Asumsi Kunci	Dinas konsisten menyediakan dan merawat fasilitas kawasan; pedagang mematuhi jadwal dan aturan penempatan lapak; keamanan dan kenyamanan pengunjung terjaga meski volume terus meningkat.
Pemangku Kepentingan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pedagang kuliner terdaftar, masyarakat pengunjung, perbankan mitra (untuk pembiayaan modal usaha pedagang).

4.3.7.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mencatat omzet pedagang secara berkala dan melengkapi status data dukung IGA yang saat ini belum lengkap.
- Jangka menengah (6–18 bulan): memperluas fasilitas kawasan agar mencukupi volume pengunjung mingguan, serta membuka pembiayaan modal usaha bagi pedagang melalui kemitraan perbankan yang sudah terjalin.
- Keterhubungan model: melengkapi ekosistem perdagangan pasar bersama TERASA BERKAH dan menjadi etalase produk kuliner UMKM binaan Inkubator Dopat.

4.3.8 Mau SOP IGA

Tabel A.56 Profil Inovasi MAU SOP IGA

1	**Nama Inovasi**	MAU SOP IGA (Membuat Albumin Unggulan dan Spesial Olahan Pengekstraksian Ikan Gabus)
2	**Identitas Instansi Inovator**	Pemerintah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Bidang ekonomi: meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, membuka peluang usaha baru, dan menambah pendapatan masyarakat. 2. Bidang sosial: meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memperkuat kerja sama antarkelompok. 3. Bidang kesehatan: menyediakan alternatif pangan bergizi tinggi dan mendukung pemenuhan kebutuhan albumin.
4	**Keunggulan Inovasi**	Satu-satunya inovasi yang mengerjakan hilirisasi komoditas lokal secara langsung, yaitu mengubah ikan gabus dari komoditas konsumsi segar menjadi ekstrak albumin bernilai jual jauh lebih tinggi. Layak ditetapkan sebagai inovasi perintis Asta Cita 5. Skor komposit 3,00.
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Model pemberdayaan masyarakat berbasis standar operasional prosedur produksi
6	**Cara Penggunaan Produk**	1. Kecamatan menyusun standar operasional prosedur pengekstraksian albumin ikan gabus. 2. Kelompok masyarakat mengikuti pelatihan teknik pengolahan sesuai standar. 3. Kelompok memperoleh pendampingan selama proses produksi. 4. Kecamatan melakukan pemantauan mutu dan keberlanjutan produksi.
7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi daerah lainnya (hilirisasi komoditas) Asta Cita: AC 5 - hilirisasi dan nilai tambah, beririsan AC 2 Sasaran: kelompok masyarakat pengolah hasil perikanan Kecamatan Daha Selatan Pendekatan: standardisasi, pelatihan, pendampingan, dan pemantauan Output: produk ekstrak albumin ikan gabus Indikator keberhasilan: jumlah kelompok produsen dan volume produksi
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.

9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Data kuantitatif capaian produksi, jumlah kelompok yang aktif, dan nilai penjualan belum tersedia. Skala program juga masih terbatas pada tingkat kecamatan.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Pencatatan capaian produksi secara berkala, pendampingan mutu dan perizinan produk oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, serta perluasan akses pasar produk albumin ke fasilitas kesehatan dan apotek daerah.

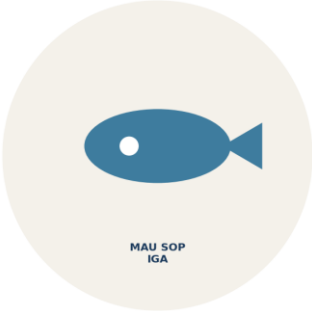

Gambar A.14 Ilustrasi MAU SOP IGA

4.3.8.1 Identitas Inovasi

Tabel A.57 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	MAU SOP IGA (Membuat Albumin Unggulan dan Spesial Olahan Pengekstraksian Ikan Gabus)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Pemerintah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	AC 5 - hilirisasi dan nilai tambah, beririsan AC 2

4.3.8.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Mengubah ikan gabus dari komoditas konsumsi segar menjadi ekstrak albumin bernilai jual lebih tinggi, melalui standardisasi, pelatihan, dan pendampingan produksi.

Sasaran Penerima Manfaat: Kelompok masyarakat pengolah hasil perikanan Kecamatan Daha Selatan.

4.3.8.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Standar operasional prosedur pengekstraksian albumin ikan gabus.
- Kelompok masyarakat pengolah hasil perikanan.

- Pendampingan produksi dari kecamatan.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.58 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Pemerintah Kecamatan Daha Selatan	Menyusun SOP, melatih, dan memantau mutu serta keberlanjutan produksi.
Kelompok masyarakat pengolah	Mengikuti pelatihan dan menjalankan produksi sesuai standar.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Kecamatan menyusun standar operasional prosedur pengekstraksian albumin ikan gabus.
- Langkah 2: Kelompok masyarakat mengikuti pelatihan teknik pengolahan sesuai standar.
- Langkah 3: Kelompok memperoleh pendampingan selama proses produksi.
- Langkah 4: Kecamatan melakukan pemantauan mutu dan keberlanjutan produksi.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Pendampingan mutu dan perizinan produk oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, serta perluasan akses pasar ke fasilitas kesehatan dan apotek daerah.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

SOP produksi tertulis menjadi alat kerja utama yang membedakan program ini dari pengolahan tradisional; belum ada sistem pencatatan produksi digital maupun perizinan produk formal (P-IRT/BPOM).

e. Keluaran (Output)

Produk ekstrak albumin ikan gabus hasil olahan kelompok masyarakat Kecamatan Daha Selatan.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Nilai tambah komoditas ikan gabus meningkat dan kelompok memperoleh pendapatan tambahan (jangka pendek); produk albumin menjadi komoditas hilirisasi unggulan daerah dengan akses pasar formal ke fasilitas kesehatan dan apotek (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Data kuantitatif capaian produksi, jumlah kelompok yang aktif, dan nilai penjualan belum tersedia. Skala program juga masih terbatas pada tingkat kecamatan.

4.3.8.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.59 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Rekap SKPD mencatat status "Data Dukung Belum Lengkap" untuk inovasi ini; sebagian dokumen kemungkinan tersedia namun belum lengkap per indikator.
Ketersediaan dan Peran SDM	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Kelompok masyarakat pengolah teridentifikasi sebagai pelaksana, rincian jumlah kelompok belum lengkap didokumentasikan.
Dukungan Anggaran	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Anggaran pelatihan dan pendampingan kemungkinan tersedia namun belum lengkap didokumentasikan.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	SOP produksi tertulis menjadi alat kerja utama yang membedakan program dari pengolahan konvensional.
Bimtek Inovasi	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Frekuensi pelatihan teknik pengolahan kemungkinan tersedia namun belum lengkap didokumentasikan.
Integrasi dalam RKPD	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Keterkaitan dengan RKPD/Rencana Kerja Kecamatan kemungkinan tersedia namun belum lengkap didokumentasikan.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Lengkap" pada rekap SKPD (Kecamatan Daha Selatan).

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.60 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	**Target**	**Realisasi**	**Keterangan**
Jumlah kelompok produsen aktif	Meningkat dari *baseline*	Belum tersedia dalam angka	Prasyarat dasar sebelum evaluasi skala program.
Volume produksi albumin	Meningkat dari *baseline*	Belum tersedia	Indikator inti keberhasilan hilirisasi.
Nilai penjualan produk	Meningkat dari *baseline*	Belum tersedia	Menunjukkan dampak ekonomi langsung bagi kelompok.
Perizinan produk (P-IRT/sertifikasi)	Seluruh produk berizin	Belum tersedia	Prasyarat perluasan ke pasar formal (fasilitas kesehatan, apotek).

4.3.8.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Sebagai satu-satunya inovasi hilirisasi komoditas lokal secara langsung, MAU SOP IGA berpotensi menjadi model perintis Asta Cita 5, namun keterbatasan skala (tingkat kecamatan) dan ketiadaan data produksi menjadi tantangan sebelum direplikasi lebih luas.

4.3.8.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan MAU SOP IGA (Membuat Albumin Unggulan dan Spesial Olahan Pengekstraksian Ikan Gabus) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.61 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 61)

1. Masalah yang Diselesaikan	Ikan gabus sebagai komoditas perikanan lokal masih dijual dalam bentuk segar dengan nilai tambah rendah, sementara berpotensi diolah menjadi produk bernilai jual jauh lebih tinggi.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Kelompok masyarakat pengolah hasil perikanan Kecamatan Daha Selatan.
3. Titik Masuk	Penyusunan standar operasional prosedur pengekstraksian albumin oleh kecamatan.
4. Langkah-Langkah Kunci	Pelatihan teknik pengolahan sesuai SOP → pendampingan produksi → pemantauan mutu dan keberlanjutan.

5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Kelompok masyarakat merasakan langsung nilai tambah ekonomi dari komoditas yang sebelumnya hanya dijual segar dengan harga rendah; anggota kelompok merasa lebih terampil dan percaya diri setelah menguasai teknik pengolahan sesuai standar, bukan sekadar cara tradisional turun-temurun.
6. Efek Terukur	Produk ekstrak albumin ikan gabus dihasilkan oleh kelompok masyarakat (data volume dan nilai penjualan belum tersedia dalam dokumen rekap).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Peningkatan pengetahuan masyarakat, penguatan kerja sama antarkelompok, dan tersedianya alternatif pangan bergizi tinggi yang mendukung ketahanan pangan daerah.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Produk albumin ikan gabus Kecamatan Daha Selatan menjadi komoditas hilirisasi unggulan daerah dengan akses pasar formal hingga ke fasilitas kesehatan dan apotek, direplikasi ke kecamatan lain dengan potensi perikanan serupa.
Asumsi Kunci	Kelompok masyarakat konsisten menjalankan produksi sesuai SOP; pendampingan mutu dan perizinan dari Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan terwujud; permintaan pasar terhadap produk albumin terus tumbuh.
Pemangku Kepentingan	Pemerintah Kecamatan Daha Selatan, kelompok masyarakat pengolah, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (pendampingan mutu dan perizinan), fasilitas kesehatan dan apotek daerah (calon mitra pasar).

4.3.8.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mencatat capaian produksi secara berkala (jumlah kelompok aktif, volume, nilai penjualan) untuk melengkapi status data dukung IGA.
- Jangka menengah (6–18 bulan): memperoleh pendampingan mutu dan perizinan produk (P-IRT) dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, serta merintis akses pasar ke fasilitas kesehatan dan apotek daerah.
- Keterhubungan model: menjadi model perintis hilirisasi komoditas lokal (Asta Cita 5) yang dapat direplikasi ke kecamatan lain dengan potensi perikanan serupa.

4.3.9 Silapis

Tabel A.62 Profil Inovasi SILAPIS

1	**Nama Inovasi**	SILAPIS (Sistem Informasi Pelaporan Keuangan dan Inkubator Bisnis)
2	**Identitas Instansi Inovator**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Memudahkan pelaku usaha menyusun laporan keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai standar akuntansi. 2. Menyediakan sarana penilaian kinerja usaha sehingga pembinaan, inkubasi, dan konsultasi menjadi lebih terarah dan terukur. 3. Mempermudah akses pembiayaan karena pelaku usaha memiliki laporan keuangan yang kredibel.
4	**Keunggulan Inovasi**	Satu-satunya inovasi yang menyatukan pelaporan keuangan usaha dengan fungsi inkubasi bisnis dalam satu sistem, sehingga menjadi jembatan antara pembinaan dan akses permodalan. Skor komposit 2,75.
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Sistem informasi terpadu pelaporan keuangan dan inkubasi usaha
6	**Cara Penggunaan Produk**	1. Pelaku usaha mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan melalui sistem. 2. Sistem menghasilkan laporan keuangan terstandar. 3. Pendamping menilai kinerja usaha berdasarkan laporan tersebut. 4. Hasil penilaian menjadi dasar pembinaan, inkubasi, dan pengajuan pembiayaan.
7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi tata kelola pemerintahan daerah Asta Cita: AC 3 - inkubasi bisnis dan tata kelola keuangan usaha Sasaran: pelaku usaha dan lembaga pengelola usaha daerah Pendekatan: digitalisasi pelaporan keuangan dan pendampingan Output: laporan keuangan usaha terstandar Indikator keberhasilan: jumlah pengguna sistem dan usaha yang lolos penilaian pembiayaan
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.
9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Pada penyusunan awal kajian inovasi ini gugur karena uraian isinya belum tersedia. Sampai saat ini belum ada penetapan formal mengenai perangkat daerah pengguna, dan data capaian kuantitatif belum tersedia.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Penetapan pengguna lintas perangkat daerah, serta penyambungan fungsi inkubasi SILAPIS dengan Inkubator Dopat agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.

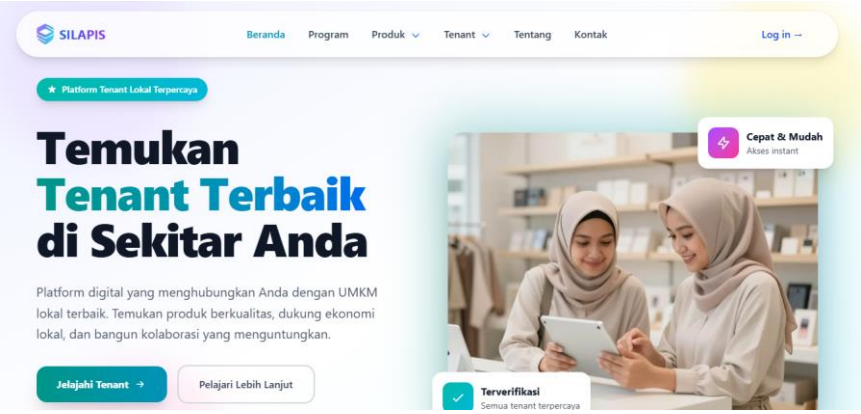

Gambar A.15 Ilustrasi SILAPIS

4.3.9.1 Identitas Inovasi

Tabel A.63 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	SILAPIS (Sistem Informasi Pelaporan Keuangan dan Inkubator Bisnis)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	AC 3 - inkubasi bisnis dan tata kelola keuangan usaha

4.3.9.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Memudahkan pelaku usaha menyusun laporan keuangan yang tertib dan sesuai standar akuntansi, sekaligus menjadi sarana penilaian kinerja usaha untuk pembinaan dan akses pembiayaan.

Sasaran Penerima Manfaat: Pelaku usaha dan lembaga pengelola usaha daerah yang membutuhkan pelaporan keuangan terstandar.

4.3.9.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Sistem informasi pelaporan keuangan digital.
- Data transaksi usaha dari pelaku usaha pengguna.
- Pendamping penilai kinerja usaha.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.64 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Pelaku usaha	Mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan melalui sistem.
Pendamping/penilai	Menilai kinerja usaha berdasarkan laporan yang dihasilkan sistem.
Bapperida	Mengelola dan mengembangkan sistem SILAPIS.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Pelaku usaha mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan melalui sistem.
- Langkah 2: Sistem menghasilkan laporan keuangan terstandar.
- Langkah 3: Pendamping menilai kinerja usaha berdasarkan laporan tersebut.
- Langkah 4: Hasil penilaian menjadi dasar pembinaan, inkubasi, dan pengajuan pembiayaan.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Penetapan pengguna lintas perangkat daerah secara formal dan penyambungan fungsi inkubasi dengan Inkubator Dopat.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Sistem digital pelaporan keuangan menjadi alat kerja inti; pada penyusunan awal kajian ini, inovasi sempat gugur seleksi karena uraian isinya belum tersedia, menunjukkan dokumentasi awal yang masih lemah meski kini berstatus data dukung lengkap.

e. Keluaran (Output)

Laporan keuangan usaha terstandar bagi pengguna sistem.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Pelaku usaha memiliki pembukuan yang tertib dan dapat diverifikasi (jangka pendek); usaha yang lolos penilaian kinerja memperoleh akses pembiayaan formal (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Belum ada penetapan formal mengenai perangkat daerah pengguna, dan data capaian kuantitatif (jumlah pengguna sistem, usaha yang lolos penilaian pembiayaan) belum tersedia.

4.3.9.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.65 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Tim kajian memakai status agregat pada rekap SKPD; rincian dokumen per indikator berada pada instansi pengampu dan belum diverifikasi lapangan secara independen.
Ketersediaan dan Peran SDM	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Pendamping/penilai kinerja usaha teridentifikasi; peran spesifik per personil belum dirinci dalam laporan ini.
Dukungan Anggaran	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Anggaran pengembangan sistem belum dirinci dalam dokumen kajian.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Sistem digital pelaporan keuangan adalah alat kerja inti dan sudah beroperasi.
Bimtek Inovasi	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Frekuensi bimtek penggunaan sistem bagi pelaku usaha belum dirinci dalam dokumen kajian.
Integrasi dalam RKPD	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Program tercatat sebagai kegiatan Bapperida; halaman spesifik RKPD belum dikutip dalam laporan ini.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): “Data Dukung Sudah Lengkap” pada rekap SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah), sejajar dengan LIWAR HSS dan E-SAKIP dari SKPD yang sama.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.66 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	**Target**	**Realisasi**	**Keterangan**
Jumlah pengguna sistem	Meningkat dari *baseline*	Belum tersedia	Data dukung administratif lengkap, namun data pengguna belum dipublikasikan.
Usaha yang lolos penilaian pembiayaan	Meningkat dari *baseline*	Belum tersedia	Indikator inti keberhasilan fungsi inkubasi.
Skor komposit evaluasi desain kebijakan (skala 0-5)	Skor ≥ 2,5	2,75	Sempat gugur pada seleksi awal kajian karena uraian isi belum tersedia.
Penetapan perangkat daerah pengguna	Ditetapkan secara formal	Belum ditetapkan	Prasyarat kejelasan tata kelola lintas OPD.

4.3.9.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Riwayat inovasi ini sempat gugur pada tahap penyaringan awal kajian karena uraian isinya belum tersedia, menandakan perlunya penguatan dokumentasi substansi program meski status data dukung administratif IGA sudah lengkap.

4.3.9.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan SILAPIS (Sistem Informasi Pelaporan Keuangan dan Inkubator Bisnis) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.67 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 67)

1. Masalah yang Diselesaikan	Pelaku usaha kesulitan menyusun laporan keuangan yang tertib dan sesuai standar akuntansi, sehingga sulit mengakses pembiayaan formal karena tidak memiliki bukti kinerja usaha yang terverifikasi.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Pelaku usaha dan lembaga pengelola usaha daerah.
3. Titik Masuk	Pencatatan transaksi usaha melalui sistem SILAPIS.
4. Langkah-Langkah Kunci	Pencatatan transaksi → penyusunan laporan keuangan terstandar → penilaian kinerja usaha → dasar pembinaan dan pengajuan pembiayaan.

5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Pelaku usaha merasa lebih tertib dan percaya diri mengelola keuangan usahanya karena laporan tersusun otomatis sesuai standar, tidak perlu menyusun pembukuan manual yang rawan salah; pelaku usaha yang lolos penilaian kinerja merasakan manfaat konkret berupa jalan lebih mudah menuju pembiayaan.
6. Efek Terukur	Laporan keuangan usaha terstandar dihasilkan bagi pengguna sistem (jumlah pengguna dan usaha yang lolos penilaian pembiayaan belum tersedia dalam angka).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Mempermudah akses pembiayaan karena pelaku usaha memiliki laporan keuangan yang kredibel, sekaligus menyediakan sarana penilaian kinerja usaha yang terarah bagi pembinaan pemerintah daerah.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Ekosistem pelaporan keuangan usaha yang terstandar di seluruh Kabupaten HSS, menjadi jembatan permanen antara pembinaan usaha dan akses permodalan formal.
Asumsi Kunci	Pelaku usaha konsisten mencatat transaksi melalui sistem; perangkat daerah pengguna ditetapkan secara formal; fungsi inkubasi SILAPIS tidak tumpang tindih dengan Inkubator Dopat.
Pemangku Kepentingan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, pelaku usaha pengguna, lembaga pembiayaan, Dinas Tenaga Kerja Koperasi UKM (koordinasi dengan Inkubator Dopat).

4.3.9.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): menetapkan pengguna lintas perangkat daerah secara formal dan melengkapi uraian substansi program agar tidak lagi berisiko gugur pada penilaian mendatang.
- Jangka menengah (6–18 bulan): menyambungkan fungsi inkubasi SILAPIS dengan Inkubator Dopat agar tidak terjadi tumpang tindih layanan, serta mempublikasikan data jumlah pengguna sistem.
- Keterhubungan model: menjadi tulang punggung pelaporan keuangan bagi tenant Inkubator Dopat dan usaha binaan Klinik UMKM yang membutuhkan pembiayaan formal.

4.3.10 Kubar

Tabel A.68 Profil Inovasi KUBAR

1	**Nama Inovasi**	KUBAR (Klinik UMKM Daha Barat)
2	**Identitas Instansi Inovator**	Pemerintah Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Pelaku usaha memperoleh bantuan pengurusan perizinan usaha. 2. Pelaku usaha memperoleh pendampingan pengelolaan keuangan dan peningkatan mutu produk. 3. Pelaku usaha memperoleh informasi pemasaran dan akses permodalan. 4. Perekonomian masyarakat Kecamatan Daha Barat meningkat melalui usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing.
4	**Keunggulan Inovasi**	Mendekatkan layanan pendampingan UMKM sampai ke tingkat kecamatan, sehingga pelaku usaha tidak perlu menempuh jarak jauh ke ibu kota kabupaten. Skor komposit 2,55.
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Layanan konsultasi dan pembinaan UMKM tingkat kecamatan
6	**Cara Penggunaan Produk**	1. Pelaku usaha mendatangi Klinik UMKM Daha Barat di kantor kecamatan. 2. Petugas mengidentifikasi kebutuhan usaha. 3. Pelaku usaha memperoleh konsultasi perizinan, keuangan, mutu produk, pemasaran, dan permodalan. 4. Kecamatan menindaklanjuti kebutuhan yang memerlukan dukungan dinas teknis.
7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi pelayanan publik tingkat kecamatan Asta Cita: AC 3 - kewirausahaan, beririsan AC 6 Sasaran: pelaku UMKM Kecamatan Daha Barat Pendekatan: layanan konsultasi dan pembinaan Output: pelaku usaha terbina dan terbantu perizinannya Indikator keberhasilan: jumlah UMKM yang didampingi dan naik kelas
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.
9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Jumlah UMKM yang telah didampingi belum dipublikasikan dalam angka. Layanan juga belum terhubung dengan pelaporan tingkat kabupaten sehingga capaiannya tidak terbaca pada kinerja daerah.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Integrasi pelaporan dengan Klinik UMKM tingkat kabupaten dan basis data SADATU, serta replikasi model ini ke kecamatan lain yang belum memiliki layanan serupa.

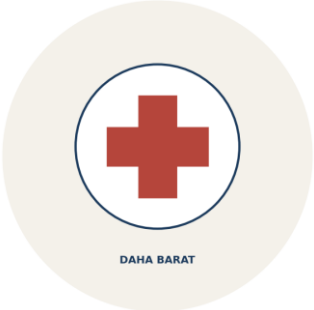

Gambar A.16 Ilustrasi KUBAR

4.3.10.1 Identitas Inovasi

Tabel A.69 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	KUBAR (Klinik UMKM Daha Barat)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Pemerintah Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	AC 3 - kewirausahaan, beririsan AC 6

4.3.10.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Mendekatkan layanan pendampingan UMKM sampai ke tingkat kecamatan, mencakup bantuan perizinan, keuangan, mutu produk, pemasaran, dan permodalan.

Sasaran Penerima Manfaat: Pelaku UMKM Kecamatan Daha Barat.

4.3.10.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Loket layanan Klinik UMKM di kantor Kecamatan Daha Barat.
- Petugas identifikasi kebutuhan usaha.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.70 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	**Peran Utama**
Pemerintah Kecamatan Daha Barat	Menyediakan layanan konsultasi dan menindaklanjuti kebutuhan ke dinas teknis.

Aktor	Peran Utama
Pelaku UMKM Kecamatan Daha Barat	Mendatangi klinik untuk memperoleh konsultasi dan fasilitasi.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Pelaku usaha mendatangi Klinik UMKM Daha Barat di kantor kecamatan.
- Langkah 2: Petugas mengidentifikasi kebutuhan usaha.
- Langkah 3: Pelaku usaha memperoleh konsultasi perizinan, keuangan, mutu produk, pemasaran, dan permodalan.
- Langkah 4: Kecamatan menindaklanjuti kebutuhan yang memerlukan dukungan dinas teknis.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Integrasi pelaporan dengan Klinik UMKM tingkat kabupaten dan basis data SADATU.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Layanan konsultasi tatap muka tingkat kecamatan menjadi alat kerja utama; belum terhubung secara pelaporan dengan Klinik UMKM tingkat kabupaten maupun SADATU.

e. Keluaran (Output)

Pelaku usaha terbina dan terbantu perizinannya di tingkat kecamatan (jumlah pasti belum dipublikasikan).

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Pelaku UMKM Kecamatan Daha Barat memperoleh layanan tanpa perlu menempuh jarak jauh ke ibu kota kabupaten (jangka pendek); replikasi model layanan serupa ke kecamatan lain yang belum memilikinya (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Jumlah UMKM yang telah didampingi belum dipublikasikan dalam angka. Layanan juga belum terhubung dengan pelaporan tingkat kabupaten sehingga capaiannya tidak terbaca pada kinerja daerah.

4.3.10.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.71 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Kolom status pada rekap SKPD belum diisi/tercatat "Belum Ada" oleh instansi pengampu sehingga kesiapan indikator ini belum dapat dinilai dari dokumen rekap.
Ketersediaan dan Peran SDM	Belum Ada Bukti	Jumlah dan peran petugas layanan kecamatan belum didokumentasikan dalam rekap.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran layanan klinik tingkat kecamatan belum tercantum.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Layanan konsultasi tatap muka menjadi alat kerja utama yang sudah berjalan di kantor kecamatan.
Bimtek Inovasi	Belum Ada Bukti	Frekuensi bimtek petugas layanan belum tercatat dalam rekap.
Integrasi dalam RKPD	Belum Ada Bukti	Keterangan program dalam RKPD/Rencana Kerja Kecamatan belum teridentifikasi pada dokumen rekap yang tersedia.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Ada" pada rekap SKPD (Kecamatan Daha Barat), berbeda dengan SIAP KADARAT dari kecamatan yang sama yang berstatus "Data Dukung Sudah Lengkap".

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.72 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah UMKM yang didampingi	Meningkat dari *baseline*	Belum tersedia dalam angka	Perlu pencatatan rutin oleh kecamatan.
UMKM yang naik kelas/terbantu perizinan	Meningkat dari *baseline*	Belum tersedia	Indikator inti keberhasilan layanan.

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Integrasi pelaporan dengan Klinik UMKM kabupaten	Terintegrasi penuh	Belum terintegrasi	Kesenjangan utama yang membuat capaian tidak terbaca di tingkat kabupaten.

4.3.10.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Sebagai layanan tingkat kecamatan yang belum terhubung pelaporan dengan tingkat kabupaten, kontribusi nyata KUBAR terhadap kinerja UMKM daerah secara keseluruhan berisiko tidak terlihat meski layanan sudah berjalan di lapangan.

4.3.10.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan KUBAR (Klinik UMKM Daha Barat) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.73 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 73)

1. Masalah yang Diselesaikan	Pelaku UMKM di Kecamatan Daha Barat harus menempuh jarak jauh ke ibu kota kabupaten untuk memperoleh layanan pendampingan usaha.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Pelaku UMKM Kecamatan Daha Barat.
3. Titik Masuk	Kedatangan ke Klinik UMKM Daha Barat di kantor kecamatan.
4. Langkah-Langkah Kunci	Identifikasi kebutuhan usaha → konsultasi perizinan/keuangan/mutu/pemasaran/permodalan → tindak lanjut ke dinas teknis bila diperlukan.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Pelaku usaha merasa layanan lebih dekat dan mudah dijangkau tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kabupaten, menghemat waktu dan biaya transportasi; namun karena skala layanan masih kecamatan, sebagian pelaku usaha mungkin masih merasa layanan yang tersedia terbatas dibanding Klinik UMKM tingkat kabupaten.
6. Efek Terukur	Pelaku usaha terbina dan terbantu perizinannya di tingkat kecamatan (jumlah pasti belum dipublikasikan dalam dokumen rekap).

7. Manfaat yang Lebih Luas	Perekonomian masyarakat Kecamatan Daha Barat meningkat melalui usaha yang lebih terkelola dan mendapat dukungan perizinan, keuangan, dan pemasaran.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Model layanan UMKM tingkat kecamatan yang terintegrasi penuh dengan Klinik UMKM kabupaten dan SADATU, direplikasi ke seluruh kecamatan di Kabupaten HSS.
Asumsi Kunci	Kecamatan konsisten menyediakan layanan; dinas teknis responsif menindaklanjuti kebutuhan yang dirujuk; pelaku usaha mengetahui keberadaan layanan ini.
Pemangku Kepentingan	Pemerintah Kecamatan Daha Barat, pelaku UMKM setempat, Dinas Tenaga Kerja Koperasi UKM (Klinik UMKM kabupaten), SADATU (basis data).

4.3.10.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mencatat jumlah UMKM yang didampingi dan melengkapi status data dukung IGA yang saat ini belum ada.
- Jangka menengah (6–18 bulan): mengintegrasikan pelaporan dengan Klinik UMKM tingkat kabupaten dan basis data SADATU agar capaian terbaca pada kinerja daerah.
- Keterhubungan model: menjadi model replikasi layanan UMKM tingkat kecamatan bagi kecamatan lain yang belum memiliki layanan serupa.

4.3.11 Peta Dasel

Tabel A.74 Profil Inovasi PETA DASEL

1	**Nama Inovasi**	PETA DASEL (Pemetaan Potensi Ekonomi Desa Daha Selatan)
2	**Identitas Instansi Inovator**	Pemerintah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Tersedianya gambaran visual dan data nyata mengenai sebaran komoditas unggulan dan usaha warga di seluruh desa se-Kecamatan Daha Selatan. 2. Memudahkan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa menyusun kebijakan anggaran serta program pemberdayaan ekonomi. 3. Membantu BUMDes dan pelaku usaha desa mengenali peluang kemitraan, permodalan, dan perluasan pemasaran. 4. Menjadi bahan promosi bagi calon investor yang ingin melihat potensi ekonomi desa.
4	**Keunggulan Inovasi**	Satu-satunya inovasi yang memetakan potensi ekonomi sampai tingkat desa secara geospasial, mencakup perikanan air tawar, kerajinan dan industri logam, pertanian lahan rawa, serta UMKM lokal. Skor komposit 2,50.
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Pemetaan digital geospasial dan pendataan terpadu potensi ekonomi desa

6	**Cara Penggunaan Produk**	1. Kecamatan bersama pemerintah desa mendata komoditas unggulan dan usaha warga. 2. Data dipetakan ke dalam sistem digital berbasis lokasi. 3. Hasil pemetaan dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan desa dan kecamatan. 4. Data disajikan kepada BUMDes, pelaku usaha, dan calon investor.
7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi tata kelola pemerintahan daerah Asta Cita: AC 6 - membangun dari desa, beririsan AC 3 Sasaran: seluruh desa di Kecamatan Daha Selatan Pendekatan: pemetaan geospasial dan pendataan terpadu Output: basis data potensi ekonomi desa Indikator keberhasilan: cakupan desa terpetakan dan pemanfaatan data dalam perencanaan
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.
9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Basis data masih pada tahap awal sehingga capaian kuantitatif belum tersedia. Belum ada penetapan kelembagaan yang bertanggung jawab memperbarui data secara berkala.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Penyeragaman format data potensi ekonomi desa agar dapat digabungkan dengan SADATU, penetapan pengelola data di tingkat kecamatan, serta replikasi ke kecamatan lain.

Gambar A.17 Ilustrasi PETA DASEL

4.3.11.1 Identitas Inovasi

Tabel A.75 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	PETA DASEL (Pemetaan Potensi Ekonomi Desa Daha Selatan)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Pemerintah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	AC 6 - membangun dari desa, beririsan AC 3

4.3.11.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Menyediakan gambaran visual dan data nyata sebaran komoditas unggulan dan usaha warga di seluruh desa, sebagai dasar penyusunan kebijakan anggaran dan program pemberdayaan ekonomi.

Sasaran Penerima Manfaat: Seluruh desa di Kecamatan Daha Selatan, termasuk BUMDes dan pelaku usaha desa.

4.3.11.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Data komoditas unggulan dan usaha warga tiap desa.
- Sistem digital pemetaan berbasis lokasi (geospasial).

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.76 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Kecamatan dan pemerintah desa	Mendata komoditas unggulan dan usaha warga secara bersama-sama.
BUMDes dan pelaku usaha desa	Memanfaatkan hasil pemetaan untuk perluasan pasar.
Calon investor	Menerima informasi potensi ekonomi desa dari hasil pemetaan.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Kecamatan bersama pemerintah desa mendata komoditas unggulan dan usaha warga.
- Langkah 2: Data dipetakan ke dalam sistem digital berbasis lokasi.
- Langkah 3: Hasil pemetaan dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan desa dan kecamatan.
- Langkah 4: Data disajikan kepada BUMDes, pelaku usaha, dan calon investor.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Penyeragaman format data agar dapat digabungkan dengan SADATU tingkat kabupaten.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Sistem pemetaan geospasial menjadi alat kerja utama dan satu-satunya inovasi yang memetakan potensi ekonomi sampai tingkat desa (perikanan air tawar, kerajinan dan industri logam, pertanian lahan rawa, UMKM lokal); belum ada penetapan kelembagaan pengelola data berkala.

e. Keluaran (Output)

Basis data potensi ekonomi desa mencakup komoditas unggulan dan sebaran usaha warga se-Kecamatan Daha Selatan.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Perencanaan pembangunan desa dan kecamatan yang lebih berbasis data (jangka pendek); investasi dan program pemberdayaan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran, serta replikasi model ke kecamatan lain (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Basis data masih pada tahap awal sehingga capaian kuantitatif (cakupan desa terpetakan) belum tersedia. Belum ada penetapan kelembagaan yang bertanggung jawab memperbarui data secara berkala.

4.3.11.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.77 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Tim kajian memakai status agregat pada rekap SKPD; rincian dokumen per indikator berada pada instansi pengampu dan belum diverifikasi lapangan secara independen.
Ketersediaan dan Peran SDM	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Petugas kecamatan dan desa teridentifikasi sebagai pelaksana pendataan; peran spesifik belum dirinci dalam laporan ini.
Dukungan Anggaran	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Anggaran pengembangan sistem pemetaan belum dirinci dalam dokumen kajian.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Sistem pemetaan geospasial adalah alat kerja inti dan satu-satunya yang memetakan hingga tingkat desa.

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Bimtek Inovasi	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Frekuensi bimtek petugas pendataan belum dirinci dalam dokumen kajian.
Integrasi dalam RKPD	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Program tercatat sebagai kegiatan Kecamatan Daha Selatan; halaman spesifik RKPD belum dikutip dalam laporan ini.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Sudah Lengkap" pada rekap SKPD (Kecamatan Daha Selatan), berbeda dengan MAU SOP IGA dari kecamatan yang sama yang berstatus "Belum Lengkap".

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.78 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Cakupan desa terpetakan	Seluruh desa di Kecamatan Daha Selatan	Belum tersedia dalam angka	Basis data masih tahap awal implementasi.
Pemanfaatan data dalam perencanaan	Dipakai rutin dalam RKP Desa/Kecamatan	Belum terukur	Perlu dokumentasi pemanfaatan data secara berkala.
Skor komposit evaluasi desain kebijakan (skala 0-5)	Skor ≥ 2,5	2,50	Satu-satunya inovasi yang memetakan potensi ekonomi sampai tingkat desa secara geospasial.
Integrasi dengan SADATU	Terintegrasi penuh	Belum terintegrasi	Peluang penggabungan format data tingkat kabupaten.

4.3.11.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Ketiadaan kelembagaan resmi pengelola pembaruan data berisiko membuat pemetaan menjadi usang seiring waktu, mengurangi nilai gunanya bagi perencanaan pembangunan desa yang membutuhkan data terkini.

4.3.11.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan PETA DASEL (Pemetaan Potensi Ekonomi Desa Daha Selatan) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.79 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 79)

1. Masalah yang Diselesaikan	Pemerintah daerah, kecamatan, dan desa belum memiliki gambaran visual dan data nyata mengenai sebaran komoditas unggulan dan usaha warga untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Seluruh desa di Kecamatan Daha Selatan, BUMDes, dan pelaku usaha desa.
3. Titik Masuk	Pendataan bersama komoditas unggulan dan usaha warga oleh kecamatan dan pemerintah desa.
4. Langkah-Langkah Kunci	Pendataan bersama → pemetaan digital berbasis lokasi → pemanfaatan untuk perencanaan pembangunan → penyajian kepada BUMDes/pelaku usaha/investor.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Perangkat desa dan kecamatan merasa lebih percaya diri menyusun program karena memiliki data visual yang jelas tentang potensi wilayahnya, bukan hanya perkiraan; BUMDes dan pelaku usaha desa merasa lebih mudah menjelaskan potensi usahanya kepada calon mitra atau investor karena tersedia data yang terpetakan secara resmi.
6. Efek Terukur	Basis data potensi ekonomi desa tersedia mencakup perikanan air tawar, kerajinan dan industri logam, pertanian lahan rawa, dan UMKM lokal (cakupan desa terpetakan dalam angka belum tersedia).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Memudahkan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa menyusun kebijakan anggaran serta program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Seluruh desa di Kabupaten HSS memiliki basis data potensi ekonomi yang terpetakan dan termutakhirkan, terintegrasi dengan SADATU sebagai satu ekosistem data ekonomi daerah.
Asumsi Kunci	Pemerintah desa aktif berpartisipasi dalam pendataan; kecamatan menetapkan pengelola data yang bertanggung jawab memperbarui secara berkala; format data dapat diseragamkan dengan SADATU.
Pemangku Kepentingan	Pemerintah Kecamatan Daha Selatan, pemerintah desa, BUMDes, pelaku usaha desa, calon investor, Bapperida (SADATU).

4.3.11.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): menetapkan kelembagaan/petugas yang bertanggung jawab memperbarui data secara berkala di tingkat kecamatan.
- Jangka menengah (6–18 bulan): menyeragamkan format data potensi ekonomi desa agar dapat digabungkan dengan SADATU, serta merintis replikasi ke kecamatan lain.
- Keterhubungan model: menjadi model rintisan pemetaan ekonomi tingkat desa yang melengkapi SADATU sebagai basis data UMKM tingkat kabupaten.

4.3.12 Kurela Sehati

Tabel A.80 Profil Inovasi KURELA SEHATI

1	**Nama Inovasi**	KURELA SEHATI (Kumpul Bareng Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif)
2	**Identitas Instansi Inovator**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3	**Manfaat/Keuntungan Inovasi**	1. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif menuangkan ide, pengalaman, dan pengetahuan untuk meningkatkan kreativitas. 2. Menjadi wadah pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan webinar untuk meningkatkan mutu produk. 3. Meningkatkan jejaring dan kerja sama antarpelaku ekonomi kreatif. 4. Meningkatkan akses pasar dan omzet penjualan, baik luring maupun melalui platform digital. 5. Mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual pelaku usaha.
4	**Keunggulan Inovasi**	Satu-satunya wadah kolaborasi lintas subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten HSS, mencakup kuliner, kerajinan, desain, dan aplikasi. Menjadi inovasi terkuat pada domain Budaya. Skor komposit 2,30.
5	**Konstruksi Pengembangan Inovasi**	Pembentukan komunitas dan wadah kolaborasi pelaku ekonomi kreatif
6	**Cara Penggunaan Produk**	1. Dinas mengidentifikasi pelaku usaha ekonomi kreatif di berbagai subsektor. 2. Pelaku usaha dihimpun dalam pertemuan rutin untuk berdiskusi dan bertukar gagasan. 3. Komunitas memfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan webinar. 4. Dinas mendorong perluasan pasar dan pendaftaran hak kekayaan intelektual anggota.
7	**Spesifikasi Teknis**	Jenis inovasi: inovasi daerah lainnya (pengembangan ekonomi kreatif) Asta Cita: AC 2 - ekonomi kreatif, beririsan AC 3 Sasaran: pelaku usaha ekonomi kreatif Kabupaten HSS Pendekatan: pembentukan komunitas dan fasilitasi kolaborasi Output: komunitas ekonomi kreatif aktif Indikator keberhasilan: jumlah anggota, kolaborasi, produk baru, dan HKI terdaftar
8	**Biaya Pembuatan**	Tidak tersedia dalam dokumen rekapitulasi inovasi daerah.

9	**Kendala/Permasalahan Selama Produk Digunakan**	Masih pada tahap pembentukan wadah dan belum berbadan hukum. Alokasi program dan anggaran masih terbatas. Kontribusi PDRB pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten HSS tahun 2024 baru 3,72%, di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,02%.
10	**Masukan Terhadap Produk**	Pelembagaan formal komunitas melalui keputusan kepala daerah, advokasi anggaran ekonomi kreatif, serta pencatatan data anggota, agenda kerja, dan capaian kolaborasi agar dampaknya dapat diukur.

Gambar A.18 Ilustrasi KURELA SEHATI

4.3.12.1 Identitas Inovasi

Tabel A.81 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	KURELA SEHATI (Kumpul Bareng Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	AC 2 - ekonomi kreatif, beririsan AC 3

4.3.12.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif menuangkan ide dan pengetahuan, menjadi wadah pelatihan dan bimbingan teknis, serta memperluas jejaring dan akses kekayaan intelektual.

Sasaran Penerima Manfaat: Pelaku usaha ekonomi kreatif Kabupaten HSS lintas subsektor (kuliner, kerajinan, desain, aplikasi).

4.3.12.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Identifikasi pelaku usaha ekonomi kreatif lintas subsektor.
- Forum pertemuan rutin komunitas.
- Materi pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan webinar.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel A.82 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Mengidentifikasi pelaku usaha dan memfasilitasi pertemuan serta pelatihan.
Pelaku usaha ekonomi kreatif	Berpartisipasi dalam komunitas, pelatihan, dan kolaborasi.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Dinas mengidentifikasi pelaku usaha ekonomi kreatif di berbagai subsektor.
- Langkah 2: Pelaku usaha dihimpun dalam pertemuan rutin untuk berdiskusi dan bertukar gagasan.
- Langkah 3: Komunitas memfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan webinar.
- Langkah 4: Dinas mendorong perluasan pasar dan pendaftaran hak kekayaan intelektual anggota.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Pelembagaan formal komunitas melalui keputusan kepala daerah.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Forum pertemuan rutin dan pelatihan lintas subsektor menjadi mekanisme utama; program masih berupa wadah informal, belum berbadan hukum, dan belum memiliki sistem pencatatan anggota/kegiatan yang terstruktur.

e. Keluaran (Output)

Komunitas ekonomi kreatif aktif menghimpun pelaku usaha lintas subsektor (jumlah anggota pasti belum dipublikasikan).

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Pelaku ekonomi kreatif memperoleh jejaring dan peningkatan mutu produk (jangka pendek); kontribusi PDRB pariwisata dan ekonomi kreatif daerah meningkat melampaui capaian saat ini (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Masih pada tahap pembentukan wadah dan belum berbadan hukum. Alokasi program dan anggaran masih terbatas. Kontribusi PDRB pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten HSS tahun 2024 baru 3,72%, di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,02%.

4.3.12.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel A.83 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Kolom status pada rekap SKPD belum diisi/tercatat "Belum Ada" oleh instansi pengampu sehingga kesiapan indikator ini belum dapat dinilai dari dokumen rekap.
Ketersediaan dan Peran SDM	Belum Ada Bukti	Jumlah dan peran petugas fasilitator komunitas belum didokumentasikan dalam rekap.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran ekonomi kreatif masih terbatas dan belum tercantum rinci dalam rekap.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Forum pertemuan rutin dan pelatihan lintas subsektor menjadi alat kerja utama yang sudah berjalan.
Bimtek Inovasi	Belum Ada Bukti	Frekuensi bimtek/webinar bagi pelaku ekonomi kreatif belum tercatat secara rinci.
Integrasi dalam RKPD	Belum Ada Bukti	Keterangan program dalam RKPD belum teridentifikasi pada dokumen rekap yang tersedia.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Ada" pada rekap SKPD (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata), sama seperti SI PANDU WISATA V2.0, SIMBIOSIS, SIMPAI, dan HSS TRIP dari dinas yang sama.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel A.84 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	**Target**	**Realisasi**	**Keterangan**
Jumlah anggota komunitas	Meningkat dari *baseline*	Belum tersedia dalam angka	Perlu pencatatan keanggotaan formal.
Kolaborasi dan produk baru dihasilkan	Meningkat tiap tahun	Belum tersedia	Indikator dampak kreatif dari kolaborasi komunitas.
HKI terdaftar oleh anggota	Meningkat dari *baseline*	Belum tersedia	Menjadi ukuran perlindungan kekayaan intelektual pelaku kreatif.
Kontribusi PDRB pariwisata dan ekonomi kreatif	Setara/melampaui capaian Provinsi (5,02%)	3,72% (2024)	Masih di bawah capaian provinsi, ruang pertumbuhan signifikan.

4.3.12.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Sebagai satu-satunya wadah kolaborasi lintas subsektor ekonomi kreatif di kabupaten, KURELA SEHATI berpotensi besar mengangkat kontribusi PDRB ekonomi kreatif yang masih tertinggal dari provinsi, namun status kelembagaan yang belum formal dan data dukung IGA yang kosong membatasi dukungan anggaran dan kebijakan yang bisa diberikan.

4.3.12.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan KURELA SEHATI (Kumpul Bareng Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel A.85 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 85)

1. Masalah yang Diselesaikan	Pelaku usaha ekonomi kreatif lintas subsektor (kuliner, kerajinan, desain, aplikasi) di Kabupaten HSS belum memiliki wadah kolaborasi formal untuk meningkatkan mutu dan memperluas jejaring.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Pelaku usaha ekonomi kreatif Kabupaten HSS lintas subsektor.
3. Titik Masuk	Identifikasi pelaku usaha ekonomi kreatif oleh dinas.

4. Langkah-Langkah Kunci	Pertemuan rutin komunitas → pelatihan dan bimbingan teknis → perluasan pasar dan pendaftaran HKI.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Pelaku ekonomi kreatif merasa tidak lagi bekerja sendiri karena memiliki forum untuk bertukar gagasan dan belajar dari sesama pelaku usaha lintas subsektor; anggota yang mengikuti pelatihan dan webinar merasa mutu produknya meningkat dan lebih percaya diri memperluas pasar.
6. Efek Terukur	Komunitas ekonomi kreatif aktif menghimpun pelaku usaha lintas subsektor (jumlah anggota, kolaborasi, dan HKI terdaftar belum tersedia dalam angka).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Meningkatnya jejaring dan kerja sama antarpelaku ekonomi kreatif, serta akses ke pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan webinar yang sebelumnya sulit dijangkau secara individu.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Kontribusi PDRB pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten HSS meningkat melampaui capaian Provinsi Kalimantan Selatan, ditopang komunitas ekonomi kreatif yang berbadan hukum dan memiliki program kerja terukur.
Asumsi Kunci	Pelaku usaha ekonomi kreatif bersedia terlibat aktif dalam komunitas; pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai; pelembagaan formal melalui keputusan kepala daerah terwujud.
Pemangku Kepentingan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, pelaku usaha ekonomi kreatif, lembaga HKI, mitra pelatihan/webinar.

4.3.12.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mencatat data anggota, agenda kerja, dan capaian kolaborasi komunitas secara sistematis agar dampaknya dapat diukur.
- Jangka menengah (6–18 bulan): melembagakan komunitas secara formal melalui keputusan kepala daerah dan mengadvokasi anggaran ekonomi kreatif yang lebih memadai.
- Keterhubungan model: menjadi motor penguatan domain Budaya dalam ekosistem kewirausahaan UMKM, melengkapi Inkubator Dopat dan Kampung Kuliner dari sisi kreativitas dan jejaring.

4.4 Hasil Monitoring dan Evaluasi Desain Kebijakan

4.4.1 Pemetaan Inovasi ke Enam Domain Ekosistem Kewirausahaan

Berdasarkan indikator evaluasi pada Tabel 3. 5, kedua belas inovasi prioritas dipetakan ke dalam enam domain ekosistem kewirausahaan dengan skala Tidak Ada (0), Lemah (1), Sedang (2), dan Kuat (3). Pemetaan ini menghasilkan matriks cakupan domain sebagaimana disajikan pada Gambar 4. 15.

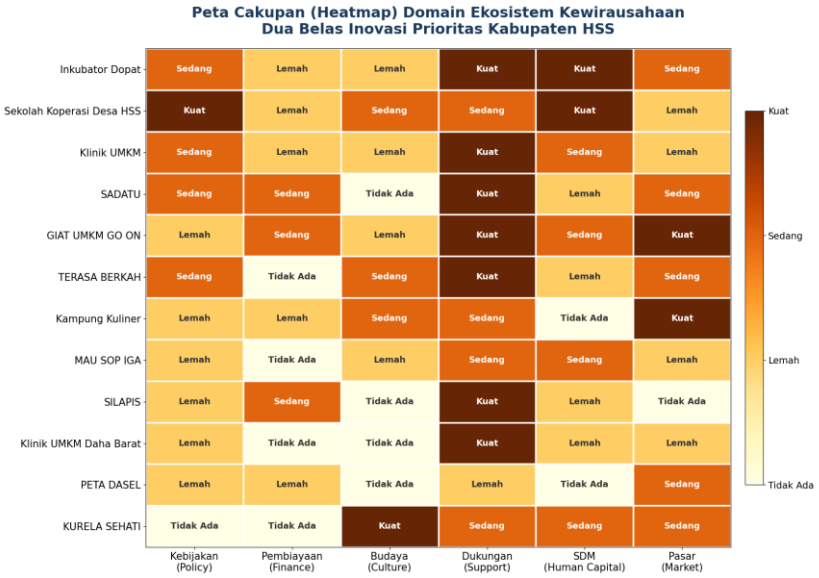

Gambar A.19 Peta Cakupan (Heatmap) Domain Ekosistem Kewirausahaan Dua

Peta cakupan ini menunjukkan pola yang cukup jelas: domain Dukungan (Support) secara konsisten mendapat skor tertinggi pada hampir seluruh inovasi, mencerminkan bahwa desain kebijakan inovasi ekonomi HSS didominasi oleh pendekatan pendampingan dan fasilitasi langsung. Sebaliknya, domain Kebijakan (Policy) dalam pengertian insentif fiskal atau aturan keberpihakan, serta domain Pembiayaan (Finance) dalam pengertian skema permodalan terstruktur, secara umum bernilai lemah hingga tidak ada pada mayoritas inovasi yang dikaji.

Pemetaan enam domain menunjukkan Kabupaten HSS sudah punya modal awal berupa banyak titik layanan. Inkubator Dopat mengisi fungsi inkubasi dan pengembangan produk lokal. Klinik UMKM dan Klinik UMKM Daha Barat mengisi fungsi konsultasi dan pengurusan legalitas. GIAT UMKM GO ON dan SADATU mengisi pendataan dan digitalisasi. Kampung Kuliner menyediakan ruang pasar. MAU SOP IGA mendorong pengolahan komoditas menjadi produk bernilai lebih tinggi. Sekolah Koperasi Desa HSS memperkuat kelembagaan koperasi desa. KURELA SEHATI membangun jejaring ekonomi kreatif. Masalah utamanya bukan tidak adanya program, melainkan belum adanya mekanisme yang

memastikan seorang pelaku usaha bisa berpindah dari satu layanan ke layanan berikutnya sesuai tahap perkembangan usahanya.

Distribusi skor domain juga memperlihatkan ketergantungan pada pendekatan fasilitasi. Ketika domain dukungan memperoleh nilai tinggi, program relatif mudah menghasilkan keluaran berupa jumlah peserta, jumlah konsultasi, jumlah pelatihan, atau penyediaan sarana. Namun, tanpa kebijakan, pembiayaan, dan pasar yang memadai, keluaran tersebut berisiko berhenti pada aktivitas administratif. Dalam perspektif RPJMD dan RKPD, kondisi ini dapat menyebabkan target program perangkat daerah tercapai, sementara kontribusinya terhadap indikator hasil pembangunan daerah tetap terbatas.

Pemetaan ini perlu dibaca sebagai diagnosis struktur kebijakan, bukan sebagai penilaian bahwa suatu inovasi tidak bermanfaat. Inovasi dengan cakupan domain sempit dapat tetap efektif untuk tujuan khusus, tetapi membutuhkan keterhubungan dengan program lain agar dampaknya lebih luas. Oleh sebab itu, rekomendasi kajian tidak diarahkan untuk memaksa setiap inovasi mencakup seluruh domain, melainkan membangun pembagian fungsi, rujukan layanan, pertukaran data, dan indikator bersama sehingga kelemahan satu inovasi dapat ditutup oleh kekuatan inovasi lainnya.

4.4.2 Analisis Domain Kebijakan (Policy)

Domain kebijakan pada kedua belas inovasi umumnya bersifat administratif - berupa penetapan OPD/kelurahan sebagai penanggung jawab program - namun jarang disertai payung regulasi khusus (Perbup/Perda) yang secara jelas memberi insentif bagi pelaku UMKM. Klinik UMKM memiliki skor domain kebijakan relatif lebih baik karena keterkaitannya dengan proses formalisasi usaha (perizinan, naik kelas), namun regulasi spesifik terkait insentif fiskal bagi UMKM naik kelas tidak ditemukan dalam dokumen inovasi. KURELA SEHATI, sebaliknya, masih berada pada tahap pembentukan wadah tanpa payung kelembagaan formal, mencerminkan lemahnya domain kebijakan pada inovasi ini.

Dari sudut pandang dokumen perencanaan, domain kebijakan seharusnya menjadi pengikat antara tujuan pembangunan, alat program, kewenangan perangkat daerah, dan alokasi sumber daya. RPJPD memberikan arah transformasi jangka panjang; RPJMD menetapkan orientasi lima tahunan; RKPD menerjemahkan prioritas menjadi agenda tahunan; sedangkan inovasi merupakan alat pelaksana yang memberi bentuk konkret pada kebijakan. Apabila inovasi hanya memiliki surat penugasan atau penetapan penanggung jawab tanpa standar layanan, sasaran, indikator, mekanisme rujukan, dan penganggaran berkelanjutan, maka kedudukannya masih rentan terhadap pergantian pejabat, perubahan prioritas, atau keterbatasan fiskal.

Kelemahan aturan keberpihakan terlihat pada belum jelasnya insentif yang diterima UMKM setelah memenuhi tahapan tertentu. Klinik UMKM telah menunjukkan capaian formalisasi 1.354 usaha atau 113,87 persen dari target, tetapi dokumen inovasi belum menggambarkan manfaat lanjutan yang secara otomatis diperoleh usaha formal, seperti prioritas pembinaan lanjutan, akses pengadaan pemerintah, kemudahan promosi, pengurangan beban retribusi tertentu, atau penghubung ke pembiayaan. Tanpa manfaat lanjutan, legalisasi berisiko dipahami sebagai pemenuhan administrasi dan belum menjadi pintu masuk menuju peningkatan skala usaha.

Dalam kerangka RPJMN 2025-2029 dan transformasi ekonomi daerah, regulasi juga perlu memfasilitasi koordinasi lintas sektor. Pengembangan produk pangan, misalnya, memerlukan keterlibatan dinas koperasi, perdagangan, kesehatan, perizinan, perikanan atau pertanian, pengadaan barang/jasa, serta pemerintah kecamatan dan desa. Ketika mandat tersebut tidak dituangkan dalam mekanisme koordinasi yang jelas, pelaku usaha harus berpindah sendiri dari satu unit layanan ke unit lainnya. Hal ini meningkatkan biaya transaksi dan memperbesar risiko pelaku usaha berhenti pada tahap pendampingan awal.

Penguatan domain kebijakan tidak selalu harus dimulai melalui peraturan daerah baru. Pemerintah daerah dapat menggunakan kombinasi keputusan kepala daerah, peraturan bupati, pedoman teknis, standar operasional prosedur, perjanjian kerja sama, keputusan tim koordinasi, dan integrasi target dalam dokumen kinerja perangkat daerah. Yang terpenting adalah adanya kepastian mengenai sasaran, hak dan kewajiban penerima manfaat, alur layanan, indikator, sumber pembiayaan, mekanisme pertukaran data, serta evaluasi berkala.

4.4.3 Analisis Domain Pembiayaan (Finance)

Domain pembiayaan adalah yang paling lemah dari seluruh rancangan kebijakan yang dikaji. Hanya GIAT UMKM GO ON, SADATU, dan SILAPIS yang menyebut kemitraan atau akses ke lembaga keuangan sebagai bagian dari rancangan programnya. Kampung Kuliner memang menyebut keterlibatan BRI dan Bank Kalsel, tetapi sebatas penyediaan tenda, meja, dan kursi, bukan modal bagi pedagang. Inkubator Dopat punya data kinerja keuangan tenant yang lengkap, tetapi tidak menjelaskan skema pembiayaan apa yang disediakan bagi tenant binaannya. Empat inovasi lain, yaitu TERASA BERKAH, MAU SOP IGA, Klinik UMKM Daha Barat, dan KURELA SEHATI, sama sekali tidak menyinggung soal pembiayaan dalam rancangannya.

Kelemahan domain pembiayaan merupakan temuan paling kritis karena pembiayaan menentukan kemampuan pelaku usaha mengubah pengetahuan dan rencana bisnis menjadi ekspansi nyata. Pelatihan pengemasan, sertifikasi, atau pemasaran digital tidak akan menghasilkan pertumbuhan optimal apabila pelaku

usaha tidak memiliki modal kerja untuk meningkatkan kapasitas produksi, membeli bahan baku, memperbaiki peralatan, memenuhi pesanan, atau menjaga arus kas. Dalam konteks indikator keberhasilan daerah, hambatan pembiayaan membatasi potensi peningkatan omzet, produktivitas, nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja.

Data Inkubator Dopat memperlihatkan bahwa 39 tenant telah menghasilkan omzet tahunan sekitar Rp5,09 miliar dan menyerap 75 tenaga kerja. Data tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang nyata dan menjadi dasar yang lebih kuat untuk membangun skema pembiayaan berbasis kinerja. Namun, desain inovasinya belum menjelaskan jalur pembiayaan yang membedakan kebutuhan tenant pemula, tenant bertumbuh, dan tenant yang siap berekspansi. Tanpa segmentasi, lembaga keuangan sulit menilai kebutuhan dan risiko secara tepat, sedangkan tenant tidak memperoleh panduan mengenai jenis pembiayaan yang sesuai.

Kemitraan dengan perbankan yang disebut pada GIAT UMKM GO ON dan Kampung Kuliner merupakan modal kelembagaan, tetapi perlu ditingkatkan dari dukungan kegiatan menjadi mekanisme pembiayaan yang terstruktur. Mekanisme tersebut dapat mencakup asesmen kesiapan usaha, perbaikan pencatatan keuangan, penyusunan profil kredit, pencocokan dengan produk pembiayaan, pendampingan pengajuan, dan pemantauan pascapencairan. Pemerintah daerah tidak harus menjadi pemberi pinjaman, tetapi dapat berfungsi sebagai agregator data, penjamin kualitas pendampingan, dan penghubung antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan.

Agar selaras dengan RKPD, penguatan pembiayaan perlu diterjemahkan ke dalam indikator tahunan yang lebih spesifik daripada jumlah sosialisasi atau jumlah peserta. Indikator yang lebih bermakna meliputi jumlah UMKM yang dinilai layak pembiayaan, nilai pembiayaan yang disalurkan, persentase pengajuan yang disetujui, tingkat kelancaran pembayaran, kenaikan omzet setelah pembiayaan, serta jumlah usaha yang bertahan dan menambah tenaga kerja. Indikator tersebut memungkinkan pemerintah daerah menilai apakah kemitraan pembiayaan benar-benar meningkatkan kapasitas ekonomi pelaku usaha.

4.4.4 Analisis Domain Budaya (Culture)

KURELA SEHATI menonjol sebagai satu-satunya inovasi dengan skor domain budaya kuat, karena secara jelas dirancang sebagai wadah kolaborasi dan pertukaran ide antar pelaku ekonomi kreatif - elemen inti pembentuk budaya kewirausahaan menurut Isenberg (2010). Kampung Kuliner turut berkontribusi pada domain ini melalui penciptaan ruang ekonomi malam berbasis komunitas pedagang yang menumbuhkan interaksi sosial dan semangat usaha bersama.

Inovasi lainnya cenderung bersifat administratif-teknis dan kurang secara jelas membangun aspek budaya kewirausahaan.

Budaya kewirausahaan berfungsi membentuk keberanian mencoba, kemampuan belajar dari kegagalan, kemauan berkolaborasi, dan kebanggaan terhadap produk lokal. Karena itu, domain budaya tidak cukup diukur dari terselenggaranya kegiatan komunitas. Budaya yang kuat tercermin ketika pelaku usaha saling bertukar pengetahuan, membangun standar mutu bersama, melakukan promosi kolektif, menghasilkan inovasi produk, dan menciptakan figur teladan yang dapat mendorong generasi baru untuk berwirausaha.

KURELA SEHATI memiliki posisi strategis karena berpotensi menghubungkan subsektor kuliner, kriya, desain, dan aplikasi. Posisi tersebut sejalan dengan kebutuhan transformasi ekonomi jangka panjang yang tidak hanya bersandar pada komoditas mentah, tetapi mendorong kreativitas dan nilai tambah. Namun, manfaat komunitas akan sulit diukur apabila belum tersedia data anggota, agenda kerja tahunan, jumlah kolaborasi, produk baru, hak kekayaan intelektual, kontrak pasar, dan peningkatan pendapatan anggota.

Kampung Kuliner juga berkontribusi terhadap budaya kewirausahaan melalui pembentukan ruang interaksi antara pedagang, konsumen, komunitas, dan penyelenggara. Agar kontribusi ini lebih kuat, kegiatan dapat dikembangkan menjadi laboratorium usaha lokal yang menyediakan kurasi produk, kalender tematik, kompetisi inovasi menu, pengelolaan kebersihan dan mutu, serta promosi bersama. Dengan cara tersebut, ruang jual beli tidak hanya menghasilkan transaksi jangka pendek, tetapi juga memperkuat identitas ekonomi lokal dan pembelajaran antar pelaku usaha.

4.4.5 Analisis Domain Dukungan (Support)

Domain dukungan merupakan domain dengan cakupan paling merata dan terkuat di antara kedua belas inovasi, tercermin dari layanan pendampingan (Klinik UMKM, Klinik UMKM Daha Barat), inkubasi bisnis (Inkubator Dopat), fasilitasi sarana (Kampung Kuliner), dan pendataan-pembinaan (GIAT UMKM GO ON). Dominasi domain ini konsisten dengan pola umum kebijakan UMKM di Indonesia yang cenderung berorientasi pada program pembinaan teknis, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan bila tidak diimbangi penguatan domain lain seperti pembiayaan dan kebijakan keberpihakan.

Kekuatan domain dukungan menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan unit pelaksana memiliki kapasitas untuk membangun hubungan langsung dengan pelaku usaha. Klinik, inkubator, pendamping, fasilitator, dan sarana pemasaran merupakan infrastruktur lunak yang penting. Keberadaan layanan tersebut juga mendukung visi Mengayomi dalam RPJMD karena pemerintah hadir untuk membantu pelaku usaha mengatasi hambatan administratif dan teknis.

Meski demikian, dukungan yang tersebar pada beberapa inovasi belum membentuk sistem manajemen kasus. Belum terlihat adanya satu profil perkembangan UMKM yang dapat digunakan bersama untuk mengetahui kebutuhan, layanan yang telah diterima, masalah yang belum selesai, dan tahap berikutnya. Akibatnya, pendampingan berpotensi berulang pada materi dasar, sementara persoalan lanjutan seperti pembiayaan, kontrak dagang, standar produksi, atau pengadaan pemerintah tidak tertangani secara konsisten.

Untuk meningkatkan efektivitas, layanan dukungan perlu dibedakan berdasarkan tahap usaha. Pelaku usaha rintisan membutuhkan validasi produk, legalitas dasar, dan pencatatan sederhana. Usaha yang mulai bertumbuh membutuhkan peningkatan kapasitas produksi, mutu, pembiayaan, dan pemasaran. Usaha yang siap naik kelas membutuhkan standardisasi, manajemen tenaga kerja, kontrak pemasok, akses pengadaan, dan pasar luar daerah. Segmentasi ini memungkinkan anggaran dan tenaga pendamping digunakan secara lebih tepat sasaran.

Dalam RKPD, indikator layanan dukungan sebaiknya tidak berhenti pada jumlah peserta yang hadir. Indikator perlu mencakup persentase masalah usaha yang terselesaikan, persentase pelaku usaha yang melanjutkan ke tahap layanan berikutnya, lama waktu penyelesaian legalitas, tingkat kepuasan pengguna, serta keberlanjutan usaha setelah enam, dua belas, dan dua puluh empat bulan. Pengukuran longitudinal tersebut akan menunjukkan kualitas layanan secara lebih objektif.

4.4.6 Analisis Domain Sumber Daya Manusia (Human Capital)

MAU SOP IGA memiliki skor domain SDM tertinggi karena desainnya secara jelas berpusat pada pelatihan teknis ekstraksi albumin ikan gabus bagi masyarakat. Inkubator Dopat dan GIAT UMKM GO ON turut menunjukkan skor sedang-kuat melalui pelatihan produksi dan pendampingan pengelolaan usaha. Sebaliknya, Kampung Kuliner dan KURELA SEHATI belum menonjolkan komponen pelatihan SDM secara jelas dalam desainnya, meskipun KURELA SEHATI menyebutkan rencana fasilitasi bimtek/webinar sebagai bagian dari programnya.

Temuan pada domain sumber daya manusia memperlihatkan bahwa pelatihan telah hadir, tetapi belum seluruhnya dirancang berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan tahap usaha. Pelatihan teknis pada MAU SOP IGA merupakan contoh yang relatif kuat karena materi terhubung langsung dengan proses produksi dan SOP. Namun, penguatan SDM kewirausahaan juga memerlukan kompetensi manajerial, pencatatan keuangan, penetapan harga, pengendalian mutu, negosiasi, pengelolaan tenaga kerja, pemasaran digital, dan pemenuhan kontrak.

Inkubator Dopat dan Klinik UMKM memiliki peluang untuk membangun kurikulum bertingkat. Kurikulum dasar dapat mencakup legalitas, model bisnis, dan pencatatan; tingkat menengah mencakup produktivitas, pembiayaan, *branding*, dan pemasaran; sedangkan tingkat lanjut mencakup standardisasi, ekspansi, kemitraan, dan tata kelola perusahaan. Kelulusan pada setiap tingkat perlu didasarkan pada bukti perubahan usaha, bukan hanya kehadiran dalam pelatihan.

Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 juga terlihat pada kebutuhan peningkatan produktivitas dan penciptaan pekerjaan formal. Oleh karena itu, pengembangan SDM tidak hanya ditujukan kepada pemilik usaha, tetapi juga tenaga kerja UMKM. Pelatihan operator produksi, keamanan pangan, layanan pelanggan, logistik, dan penggunaan teknologi akan membantu usaha meningkatkan kualitas sekaligus menciptakan pekerjaan yang lebih produktif.

Indikator keberhasilan domain SDM perlu mencakup hasil belajar dan penerapan. Pengukuran dapat dilakukan melalui asesmen sebelum dan sesudah pelatihan, jumlah praktik usaha yang diterapkan, peningkatan produktivitas per pekerja, penurunan tingkat produk gagal, ketepatan pencatatan keuangan, serta kemampuan memenuhi standar pasar. Dengan indikator tersebut, pelatihan dapat diposisikan sebagai investasi produktivitas, bukan sekadar aktivitas rutin.

4.4.7 Analisis Domain Pasar (Market)

Kampung Kuliner dan GIAT UMKM GO ON menunjukkan skor domain pasar terkuat - Kampung Kuliner melalui penciptaan ruang interaksi langsung dengan ribuan pengunjung mingguan, dan GIAT UMKM GO ON melalui dorongan digitalisasi pemasaran via media sosial dan *marketplace*. Inkubator Dopat dan Klinik UMKM memiliki skor pasar sedang-lemah karena desainnya lebih berfokus pada sisi produksi dan pendampingan internal usaha, belum secara jelas merancang strategi perluasan akses pasar bagi tenant/UMKM binaan.

Akses pasar merupakan titik yang menentukan apakah peningkatan kapasitas produksi menghasilkan pendapatan. Kampung Kuliner telah membangun pasar fisik, sedangkan GIAT UMKM GO ON mendorong pemanfaatan kanal digital. Kedua model tersebut saling melengkapi, tetapi belum terlihat sebagai strategi pasar daerah yang terintegrasi. Pasar fisik memberikan pengalaman produk dan interaksi langsung, sementara pasar digital memperluas jangkauan serta memungkinkan transaksi di luar waktu dan wilayah kegiatan.

Kelemahan utama domain pasar adalah terbatasnya data konversi. Jumlah pengunjung, jumlah pedagang, jumlah unggahan, atau jumlah akun *marketplace* belum cukup untuk menunjukkan hasil ekonomi. Indikator yang dibutuhkan meliputi nilai transaksi, frekuensi pembelian ulang, pertumbuhan pelanggan, porsi penjualan luar daerah, jumlah kontrak dengan reseller atau institusi, serta biaya pemasaran dibandingkan pendapatan yang dihasilkan.

Pemerintah daerah juga memiliki instrumen pasar melalui belanja barang/jasa dan kegiatan promosi daerah. UMKM yang telah memenuhi persyaratan legalitas dan mutu dapat diarahkan masuk ke katalog elektronik, pengadaan langsung, penyedia konsumsi kegiatan, suvenir daerah, dan rantai pasok BUMD atau sektor pariwisata. Jalur ini perlu disusun secara transparan agar formalisasi usaha memperoleh manfaat pasar yang konkret dan tidak berhenti pada penerbitan dokumen.

Untuk produk khas seperti dodol, ketupat Kandangan, albumin ikan gabus, kuliner, dan produk ekonomi kreatif, perluasan pasar juga membutuhkan penguatan identitas, mutu, daya simpan, desain kemasan, logistik, serta kepastian kapasitas produksi. Karena itu, domain pasar harus dihubungkan dengan domain SDM, pembiayaan, dan dukungan. Promosi yang berhasil tanpa kesiapan produksi dapat menimbulkan kegagalan memenuhi pesanan dan menurunkan kepercayaan konsumen.

4.4.8 Analisis Kesenjangan Antar Domain

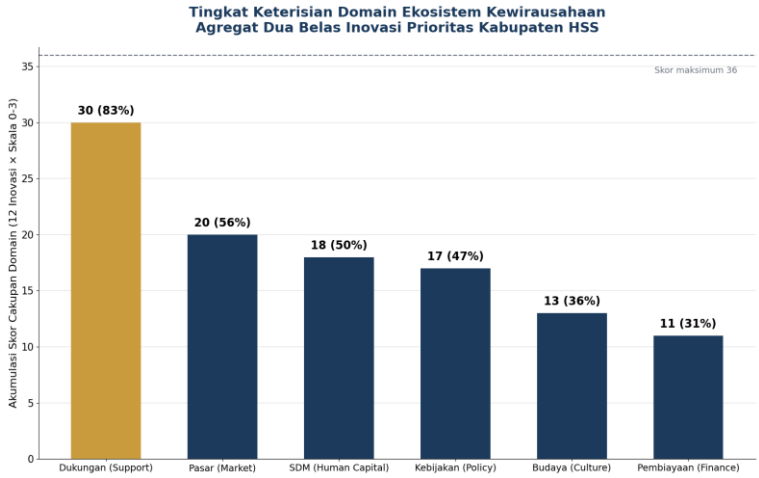

Gambar A.20 Tingkat Keterisian Domain Ekosistem Kewirausahaan

Gambar 4. 16 menggabungkan skor cakupan domain di seluruh dua belas

Tabel A.86 Ringkasan Kekuatan dan Kelemahan per Domain

Domain	Status Cakupan	Inovasi Pendukung Utama	Catatan
Dukungan (Support)	Kuat (30/36)	Inkubator Dopat, Klinik UMKM, Klinik UMKM Daha Barat, SADATU, SILAPIS	Domain paling merata dan terkuat di seluruh inovasi
Pasar (Market)	Sedang-Kuat (20/36)	Kampung Kuliner, GIAT UMKM GO ON, SADATU, KURELA SEHATI, PETA DASEL	Menguat, namun masih terkonsentrasi pada sebagian inovasi

Domain	Status Cakupan	Inovasi Pendukung Utama	Catatan
SDM (Human Capital)	Sedang (18/36)	Sekolah Koperasi Desa HSS, Inkubator Dopat, MAU SOP IGA, GIAT UMKM GO ON	Menguat setelah masuknya Sekolah Koperasi Desa HSS
Kebijakan (Policy)	Lemah-Sedang (17/36)	Sekolah Koperasi Desa HSS, TERASA BERKAH, Klinik UMKM, SADATU	Menguat oleh mandat PSN Kopdes Merah Putih dan UPTD Metrologi Legal, namun belum ada payung aturan keberpihakan khusus UMKM
Budaya (Culture)	Lemah-Sedang (13/36)	KURELA SEHATI, Kampung Kuliner, TERASA BERKAH, Sekolah Koperasi Desa HSS	Terbatas pada empat inovasi
Pembiayaan (Finance)	Lemah (11/36)	GIAT UMKM GO ON, SADATU, SILAPIS (sebagian)	Domain paling minim cakupan

Temuan ini konsisten dengan hipotesis awal kajian pada sub-bab 2.4, bahwa desain kebijakan UMKM di level kabupaten cenderung berorientasi pada domain Dukungan dan SDM, sementara domain Pembiayaan dan Kebijakan keberpihakan relatif tertinggal. Kesenjangan ini berdampak pada terbatasnya daya ungkit (leverage) kebijakan dalam mendorong UMKM naik kelas secara signifikan, karena meskipun pelaku usaha telah menerima pendampingan teknis yang memadai, keterbatasan akses pembiayaan dapat menjadi hambatan struktural bagi pertumbuhan usaha lebih lanjut.

Kesenjangan antardomain menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada hubungan yang terputus di antara tahapan pengembangan usaha. Dukungan dan pelatihan telah tersedia, tetapi jalur menuju pembiayaan belum kuat. Formalisasi telah berjalan, tetapi manfaat pasar dan insentif setelah formal belum dirumuskan secara jelas. Ruang pasar telah tersedia, tetapi pencatatan transaksi dan pengembangan pemasok belum memadai. Komunitas telah dibentuk, tetapi kelembagaan dan indikator hasilnya belum matang.

Dalam perspektif perencanaan, kondisi tersebut dapat disebut sebagai kesenjangan keterpaduan vertikal dan horizontal. Kesenjangan vertikal terjadi ketika tujuan RPJPD, RPJMD, dan RKPD belum diterjemahkan secara konsisten sampai pada indikator inovasi. Kesenjangan horizontal terjadi ketika program antarperangkat daerah belum berbagi sasaran, data, dan alur layanan. Kedua kesenjangan ini mengurangi daya ungkit anggaran karena setiap perangkat daerah dapat mencapai keluarannya sendiri tanpa menghasilkan perubahan kolektif yang memadai pada indikator pembangunan daerah.

Kesenjangan pembiayaan dan kebijakan juga menjelaskan mengapa inovasi yang memiliki dukungan kuat belum selalu memperoleh skor komposit tinggi.

Kualitas desain membutuhkan keseimbangan antara kejelasan mandat, kelengkapan domain, ketersediaan data, dan keberlanjutan kelembagaan. Inovasi yang aktif secara operasional tetapi tidak memiliki indikator hasil akan sulit dipertahankan ketika anggaran diprioritaskan berdasarkan kinerja.

Dampak lainnya adalah perlunya indikator lintas program. Sebagai contoh, satu indikator bersama dapat mengukur jumlah UMKM yang melalui rangkaian pendataan, formalisasi, pelatihan, pembiayaan, dan perluasan pasar. Indikator tersebut lebih bermakna daripada menjumlahkan peserta pada masing-masing kegiatan karena menunjukkan kemajuan usaha secara utuh. Bapperida dapat berperan sebagai pengelola indikator bersama, sedangkan perangkat daerah tetap mengelola keluaran sektoral sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, prioritas penguatan bukan menambah sebanyak mungkin inovasi baru, melainkan memastikan inovasi eksisting terhubung dan dapat diukur. Inovasi baru diperlukan hanya untuk menutup fungsi yang benar-benar belum tersedia, terutama pembiayaan keberpihakan dan integrasi data. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam RKPD karena mengoptimalkan aset kebijakan yang sudah ada sebelum membentuk program tambahan.

4.4.9 Analisis SWOT Gabungan

Berdasarkan keseluruhan temuan pemetaan domain dan skor komposit evaluasi desain kebijakan, kajian ini merumuskan analisis SWOT gabungan sebagaimana disajikan pada Gambar 4. 17.

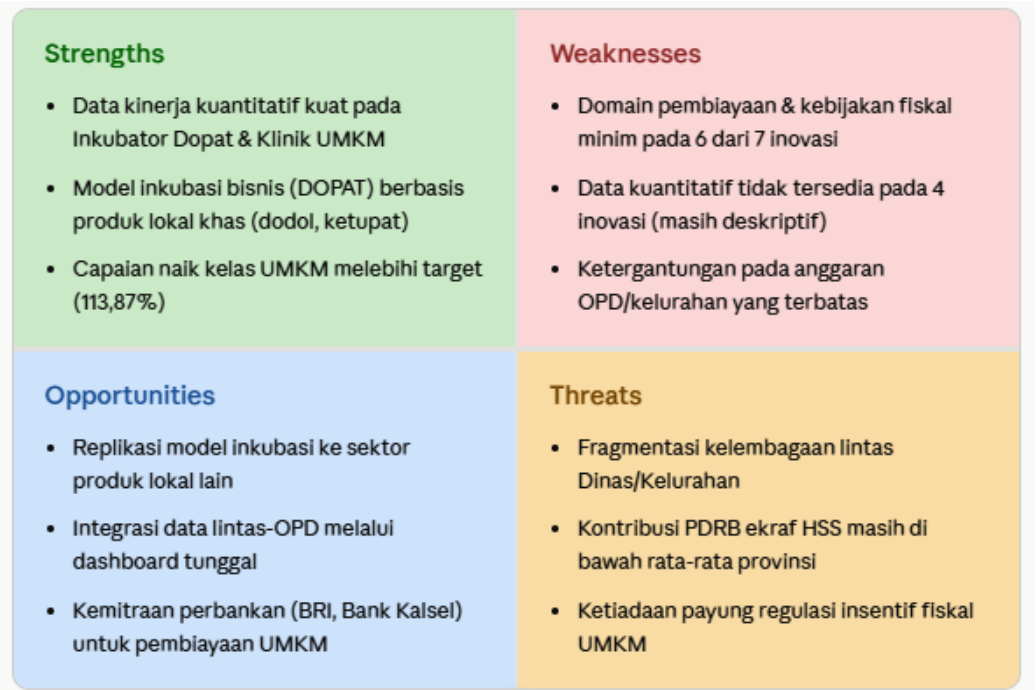

Gambar A.21 Analisis SWOT Gabungan Desain Kebijakan Ekosistem

Analisis SWOT ini menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan pada Subbab 4.7, khususnya dalam mengarahkan penguatan pada domain-domain yang teridentifikasi lemah (Weaknesses) sekaligus memanfaatkan peluang (Opportunities) yang tersedia, seperti replikasi model inkubasi dan kemitraan perbankan yang telah terjalin sebagian pada Kampung Kuliner dan GIAT UMKM GO ON.

Analisis SWOT memperlihatkan bahwa kekuatan utama HSS terletak pada keberadaan program yang beragam, produk lokal yang memiliki identitas, jaringan pendampingan, dan beberapa bukti capaian kuantitatif. Kekuatan tersebut memberi dasar untuk membangun sistem pengembangan UMKM yang lebih maju tanpa memulai dari nol. Inkubator Dopat dan Klinik UMKM dapat menjadi simpul utama karena telah memiliki data dan kelembagaan yang relatif matang.

Kelemahan utama berupa pembiayaan, aturan keberpihakan, keterukuran dampak, dan fragmentasi data bersifat sistemik. Artinya, kelemahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbaiki satu inovasi. Diperlukan keputusan lintas perangkat daerah mengenai standar indikator, basis data, mekanisme rujukan, dan pembagian peran. Tanpa intervensi sistemik, perbaikan pada satu program akan tetap menghasilkan dampak terbatas.

Peluang kebijakan berasal dari penyelarasan dokumen perencanaan periode baru. RPJPD 2025-2045, RPJMD 2025-2029, RKPD 2026, dan RPJMN 2025-2029 memberikan momentum untuk memasukkan penguatan UMKM ke dalam kerangka transformasi ekonomi, digitalisasi, penciptaan pekerjaan produktif, pemerataan wilayah, dan tata kelola berbasis hasil. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan melalui penetapan indikator lintas perangkat daerah dan penganggaran bertahap.

Ancaman yang perlu diantisipasi mencakup perubahan prioritas, keterbatasan fiskal, ketergantungan pada figur penggerak, persaingan produk dari luar daerah, ketidakstabilan harga bahan baku, dan rendahnya kesiapan sebagian pelaku usaha menggunakan teknologi. Ancaman ini memperkuat kebutuhan untuk melembagakan inovasi dan membangun sistem data. Program yang hanya bergantung pada individu atau kegiatan tahunan akan lebih mudah berhenti ketika terjadi perubahan organisasi atau anggaran.

4.4.10 Sintesis Temuan terhadap Indikator Kinerja/Keberhasilan Daerah

Keterkaitan antara inovasi UMKM dan indikator keberhasilan daerah perlu disusun melalui rantai hasil yang realistis. Pada tingkat keluaran, inovasi menghasilkan pelaku usaha terdata, peserta terlatih, izin terbit, produk tersertifikasi, fasilitas tersedia, dan kegiatan promosi terlaksana. Pada tingkat hasil, keluaran tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas, omzet, laba, akses pembiayaan, jangkauan pasar, keberlanjutan usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Pada tingkat dampak, akumulasi hasil berbagai program dapat berkontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan.

Inkubator Dopat memberikan bukti paling kuat untuk menghubungkan keluaran inovasi dengan hasil ekonomi. Capaian 39 tenant, omzet sekitar Rp5,09 miliar per tahun, keuntungan sekitar Rp2,41 miliar, serta penyerapan 75 tenaga kerja menunjukkan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi lokal dan penciptaan pekerjaan. Namun, agar dapat dikaitkan secara lebih kuat dengan indikator daerah, data tersebut perlu dilengkapi dengan data awal sebelum inkubasi, tren beberapa tahun, jumlah tenant yang bertahan, pertumbuhan produktivitas, porsi penjualan luar daerah, dan perubahan pendapatan pekerja.

Klinik UMKM menunjukkan capaian formalisasi yang tinggi, yaitu 1.354 usaha atau 113,87 persen dari target. Capaian ini relevan terhadap indikator peningkatan usaha formal dan kualitas tata kelola usaha. Akan tetapi, formalisasi seharusnya diperlakukan sebagai indikator antara. Ukuran keberhasilan berikutnya adalah apakah usaha formal memperoleh pembiayaan, mengikuti pengadaan, meningkatkan omzet, mempekerjakan tenaga kerja secara lebih teratur, dan bertahan dalam jangka menengah.

GIAT UMKM GO ON memiliki relevansi terhadap indikator digitalisasi usaha, kualitas basis data, serta inklusi pembiayaan. Narasi inovasi telah menyebut pendataan digital, pelatihan berkelanjutan, pemasaran daring, dan kemitraan perbankan. Kelemahannya adalah belum tersedianya angka mengenai jumlah UMKM terdata aktif, persentase yang menggunakan kanal digital secara produktif, nilai transaksi digital, jumlah usaha yang mengakses pembiayaan, dan pertumbuhan usaha setelah intervensi. Tanpa angka tersebut, kontribusi terhadap elemen Teknologis dalam visi SEMANGAT belum dapat dinilai secara memadai.

Kampung Kuliner relevan terhadap indikator perputaran ekonomi lokal, pendapatan pedagang, aktivitas ekonomi malam, dan daya tarik kawasan. Data jumlah pedagang memberi gambaran skala kegiatan, tetapi belum mengukur nilai transaksi, pengeluaran pengunjung, pertumbuhan pendapatan pedagang, keberlanjutan partisipasi, maupun dampak terhadap retribusi dan pendapatan asli daerah. Pencatatan transaksi sampel dan survei berkala pedagang akan meningkatkan kualitas bukti kebijakan.

MAU SOP IGA memiliki jalur kontribusi terhadap nilai tambah sektor perikanan, diversifikasi produk, pendapatan rumah tangga, dan hilirisasi komoditas lokal. Kekuatan inovasi terletak pada SOP dan pelatihan teknis. Kelemahannya adalah belum tersedianya data volume produksi, biaya, harga jual, jumlah produsen aktif, kualitas produk, kontrak pasar, serta peningkatan pendapatan penerima manfaat. Data tersebut diperlukan agar inovasi dapat dikaitkan dengan transformasi ekonomi jangka panjang dalam RPJPD.

KURELA SEHATI memiliki relevansi terhadap indikator perkembangan ekonomi kreatif. Kontribusi PDRB pariwisata dan ekonomi kreatif HSS tahun 2024 yang tercatat 3,72 persen, lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,02 persen, menunjukkan adanya ruang penguatan. Namun, komunitas perlu memiliki indikator yang berada dalam kendalinya, seperti jumlah anggota aktif, kolaborasi produk, hak kekayaan intelektual, nilai penjualan, jumlah kegiatan kurasi, dan akses pasar. Perubahan kontribusi PDRB merupakan indikator makro yang tidak dapat dibebankan kepada satu komunitas.

Secara keseluruhan, 12 inovasi ini paling langsung menyumbang pada angka jumlah UMKM naik kelas, kenaikan omzet UMKM binaan, penyerapan tenaga kerja, jumlah usaha yang berbadan hukum, penggunaan teknologi digital, akses modal, nilai transaksi pasar lokal, dan nilai tambah produk unggulan. Angka-angka besar seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pendapatan per kapita, dan kemandirian fiskal tetap penting sebagai arah, tetapi tidak bisa dibaca sendirian karena dipengaruhi banyak faktor lain. Karena itu, *dashboard* SIMONEV UMKM sebaiknya memuat indikator program dan indikator daerah secara berjenjang, lengkap dengan data awal, target tahunan, realisasi, sumber data, dan perangkat daerah penanggung jawab.

4.5 Evaluasi Keselarasan Desain Kebijakan

4.5.1 Keselarasan dengan RPJMD 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025. Dokumen tersebut mengusung visi "Membangun Desa, Menata Kota, untuk Mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (SEMANGAT)". Subbab ini mengkaji sejauh mana desain kebijakan kedua belas inovasi prioritas memiliki jalur kontribusi terhadap elemen-elemen visi tersebut, terutama Sejahtera, Mandiri, Mengayomi, dan Teknologis.

Tabel A.87 Pemetaan Keselarasan dengan Elemen Visi RPJMD 2025-2029

Elemen Visi SEMANGAT	Relevansi terhadap Ekosistem Kewirausahaan UMKM	Inovasi Pendukung
Sejahtera	Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha melalui naik kelas UMKM	Klinik UMKM, Inkubator Dopat, GIAT UMKM GO ON
Mandiri	Kemandirian ekonomi lokal berbasis produk dan pelaku usaha daerah	Inkubator Dopat, MAU SOP IGA, Kampung Kuliner
Agamis	Tidak secara langsung tercermin dalam desain kedua belas inovasi ekonomi yang dikaji	-

Elemen Visi SEMANGAT	Relevansi terhadap Ekosistem Kewirausahaan UMKM	Inovasi Pendukung
Mengayomi	Pendampingan dan perlindungan pelaku usaha mikro melalui layanan klinik UMKM	Klinik UMKM, Klinik UMKM Daha Barat
Teknologis	Digitalisasi pemasaran dan pendataan UMKM berbasis platform digital	GIAT UMKM GO ON

Pemetaan ini menunjukkan bahwa desain kedua belas inovasi secara umum selaras dengan elemen Sejahtera, Mandiri, dan Mengayomi dari visi SEMANGAT, namun elemen Teknologis baru tercermin kuat pada satu inovasi (GIAT UMKM GO ON), sementara elemen Agamis tidak memiliki keterkaitan langsung dengan desain kebijakan ekonomi yang dikaji - hal yang secara konseptual dapat dipahami mengingat elemen tersebut lebih relevan pada perspektif nilai keagamaan dan sosial-budaya, bukan pada domain ekonomi dan kewirausahaan.

Keselarasan dengan elemen Sejahtera terlihat pada orientasi peningkatan pendapatan, kesempatan usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Inkubator Dopat memberikan bukti kuantitatif paling nyata, sedangkan Kampung Kuliner dan MAU SOP IGA membuka ruang penciptaan nilai tambah. Akan tetapi, keselarasan substantif ini belum seluruhnya disertai indikator yang memungkinkan pemerintah daerah mengukur perubahan kesejahteraan penerima manfaat dari waktu ke waktu.

Elemen Mandiri tercermin pada upaya penguatan kapasitas produksi, formalisasi, inovasi produk, dan pemasaran. Klinik UMKM, Inkubator Dopat, dan GIAT UMKM GO ON memiliki posisi penting dalam membangun kemandirian usaha. Namun, kemandirian tidak hanya berarti kemampuan menjalankan usaha, tetapi juga kemampuan mengakses modal, mempertahankan arus kas, memenuhi permintaan pasar, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan kegiatan pemerintah.

Elemen Mengayomi terlihat melalui layanan gratis, pendampingan, fasilitasi sarana, dan keberadaan unit layanan yang dekat dengan masyarakat. Keselarasan ini akan lebih kuat apabila standar pelayanan, jangka waktu penyelesaian, mekanisme pengaduan, serta kepuasan pengguna dicatat secara berkala. Dengan demikian, fungsi pengayoman dapat dinilai bukan hanya dari tersedianya program, tetapi dari mutu layanan yang diterima pelaku usaha.

Elemen Teknologis paling jelas terlihat pada GIAT UMKM GO ON melalui pendataan digital dan pemasaran daring. Inovasi lain masih dapat memperkuat elemen ini melalui sistem informasi tenant, pencatatan transaksi digital, pembelajaran daring, katalog produk, pembayaran nontunai, dan *dashboard* kinerja. Digitalisasi perlu diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan keterukuran, bukan sekadar penggunaan media sosial.

4.5.2 Keselarasan dengan RKPD 2026, RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Indikator Kinerja Daerah

Penilaian keselarasan antardokumen dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi yang berbeda pada setiap tingkat perencanaan. RPJMN 2025-2029 memberikan kerangka strategi nasional, kebijakan umum, program lintas sektor, kebijakan kewilayahan, regulasi, dan pendanaan indikatif. RPJPD HSS 2025-2045 memberikan arah transformasi daerah selama dua puluh tahun. RPJMD HSS 2025-2029 menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas lima tahunan. RKPD 2026 mengoperasionalkan arah tersebut ke dalam program dan kegiatan tahunan. Karena itu, keselarasan tidak dinilai dari kesamaan istilah, tetapi dari kesinambungan logis antara arah pembangunan dan mekanisme inovasi.

Terhadap RPJPD HSS 2025-2045, kedua belas inovasi relevan terutama dengan agenda transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola. Transformasi ekonomi didukung melalui peningkatan nilai tambah produk lokal, formalisasi, pengembangan kapasitas usaha, penciptaan pasar, dan ekonomi kreatif. Transformasi tata kelola didukung melalui pendataan digital, layanan konsultasi, SOP, serta kebutuhan integrasi monitoring. Namun, kontribusi jangka panjang masih dibatasi oleh lemahnya pembiayaan, belum seragamnya indikator, dan belum kuatnya keterhubungan lintas perangkat daerah.

RPJPD juga menuntut pembangunan yang berlangsung secara bertahap dan konsisten selama dua puluh tahun. Implikasinya, inovasi perlu dirancang agar tidak bergantung pada kegiatan satu tahun atau figur tertentu. Inkubator, klinik, komunitas, dan kawasan pasar harus memiliki kelembagaan, sumber pembiayaan, standar layanan, basis data, serta mekanisme evaluasi yang memungkinkan program bertahan dan berkembang melalui beberapa periode RPJMD.

Terhadap RPJMN 2025-2029, relevansi utama terletak pada peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan yang lebih baik, transformasi digital, serta penguatan pembangunan wilayah. Inkubator Dopat dan MAU SOP IGA berhubungan dengan produktivitas dan nilai tambah; Klinik UMKM berhubungan dengan formalisasi; GIAT UMKM GO ON berhubungan dengan digitalisasi; Kampung Kuliner dan KURELA SEHATI berhubungan dengan ekonomi lokal dan kreatif. Meskipun demikian, hubungan tersebut masih berupa kontribusi potensial karena sebagian inovasi belum memiliki data hasil yang cukup.

Target pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi memperkuat kebutuhan agar pemerintah daerah tidak hanya menambah kegiatan, tetapi meningkatkan produktivitas sektor riil. Dalam konteks HSS, penguatan UMKM perlu terhubung dengan sektor unggulan dan rantai nilai lokal, termasuk pangan, perikanan, kuliner, kerajinan, dan ekonomi kreatif. Setiap intervensi harus menjawab bagian rantai nilai yang spesifik, seperti bahan baku, teknologi produksi, mutu, modal kerja, logistik, pemasaran, atau kontrak penjualan.

Terhadap RKPD 2026, temuan kajian memiliki dampak operasional. Kesenjangan pembiayaan perlu diterjemahkan menjadi kegiatan asesmen kelayakan, fasilitasi pembiayaan, dan kemitraan perbankan dengan target yang terukur. Kesenjangan data perlu diterjemahkan menjadi pembangunan basis data dan *dashboard*. Kesenjangan pasar perlu diterjemahkan menjadi kurasi, promosi, pengadaan pemerintah, serta perluasan kanal penjualan. Kesenjangan regulasi perlu diterjemahkan menjadi penyusunan pedoman, keputusan tim, standar layanan, atau peraturan bupati sesuai kebutuhan.

Agar rekomendasi tidak berhenti sebagai narasi, setiap agenda dalam RKPD perlu memuat keterkaitan antara indikator, target, anggaran, penanggung jawab, lokasi, dan penerima manfaat. Misalnya, target jumlah UMKM yang difasilitasi pembiayaan harus diikuti definisi yang jelas mengenai status pengajuan dan pencairan. Target UMKM digital harus membedakan antara memiliki akun dan menghasilkan transaksi. Target UMKM naik kelas harus didasarkan pada kriteria formalitas, omzet, tenaga kerja, aset, pasar, atau produktivitas yang disepakati.

Pada hubungan dengan indikator kinerja daerah, dua belas inovasi paling relevan sebagai alat pendukung, bukan satu-satunya penentu. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita membutuhkan investasi dan produktivitas lintas sektor; kemiskinan dipengaruhi oleh pendapatan, perlindungan sosial, dan akses layanan; pengangguran dipengaruhi oleh penciptaan kerja dan kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, kontribusi inovasi perlu dilacak melalui indikator antara yang lebih dekat dengan mekanisme program, seperti omzet, tenaga kerja, formalitas, pembiayaan, dan akses pasar.

Konsistensi indikator antardokumen menjadi syarat penting. Indikator inovasi seharusnya menjadi bagian dari indikator program perangkat daerah, kemudian berkontribusi pada sasaran RPJMD dan RKPD. Apabila definisi, satuan, sumber data, atau periode pengukuran berbeda, capaian tidak dapat diagregasikan. Bapperida perlu menetapkan metadata indikator yang mencakup definisi operasional, rumus, sumber, frekuensi pembaruan, penanggung jawab, data awal, dan target.

Secara keseluruhan, desain inovasi telah memiliki keselarasan arah dengan dokumen perencanaan, tetapi belum seluruhnya mencapai keselarasan instrumen dan indikator. Keselarasan arah terlihat dari fokus pada kesejahteraan, kemandirian usaha, digitalisasi, produk lokal, dan layanan publik. Kesenjangan instrumen terlihat pada pembiayaan dan aturan keberpihakan. Kesenjangan indikator terlihat pada belum lengkapnya data hasil. Dengan demikian, agenda utama bukan merumuskan tujuan baru, melainkan memperkuat mekanisme pelaksanaan dan pengukuran agar kontribusi terhadap RKPD, RPJMD, RPJPD, dan RPJMN dapat ditunjukkan secara akuntabel.

4.5.3 Konsistensi Regulasi dan Kelembagaan

Evaluasi konsistensi regulasi mengkaji sejauh mana masing-masing inovasi memiliki landasan hukum/kelembagaan formal yang jelas dalam pelaksanaannya, sebagai salah satu indikator kualitas desain kebijakan.

Tabel A.88 Status Landasan Regulasi/Kelembagaan Dua Belas Inovasi

Inovasi	Landasan Kelembagaan	Status
Inkubator Dopat	Program resmi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan data kinerja tenant terdokumentasi	Cukup Kuat
Sekolah Koperasi Desa HSS	Turunan Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan capaian legalitas 148 KDKMP	Kuat
Klinik UMKM	Layanan resmi OPD dengan target kinerja terukur (naik kelas UMKM)	Cukup Kuat
SADATU	Platform resmi OPD teknis, belum ditemukan payung regulasi khusus tata kelola data UMKM	Sedang
GIAT UMKM GO ON	Program tingkat kelurahan, belum ditemukan payung regulasi tingkat kabupaten	Sedang
TERASA BERKAH	Melekat pada mandat UPTD Metrologi Legal dan regulasi tera/tera ulang UTTP	Cukup Kuat
Kampung Kuliner	Diresmikan langsung oleh Bupati HSS (September 2023), dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Cukup Kuat
MAU SOP IGA	SOP teknis tersedia, dikelola pada tingkat kecamatan dengan skala program masih terbatas	Sedang
SILAPIS	Dikembangkan Bapperida sebagai sistem informasi, belum ada penetapan formal pengguna lintas-OPD	Sedang
Klinik UMKM Daha Barat	Layanan tingkat kecamatan, belum terintegrasi dengan kebijakan kabupaten	Lemah
PETA DASEL	Inisiatif tingkat kecamatan, belum ada penetapan kelembagaan pengelola basis data	Lemah
KURELA SEHATI	Masih tahap pembentukan wadah, belum berbadan hukum/kelembagaan formal	Lemah

Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi dengan skor komposit evaluasi desain kebijakan tertinggi (Inkubator Dopat, Klinik UMKM) juga memiliki landasan kelembagaan yang relatif lebih kuat, mengonfirmasi konsistensi antara metodologi skoring pada Bab III dengan kajian kelembagaan pada subbab ini.

Landasan kelembagaan perlu dinilai dari tiga aspek: legitimasi, kapasitas, dan kontinuitas. Legitimasi berkaitan dengan kejelasan mandat dan kewenangan. Kapasitas berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan sistem

kerja. Kontinuitas berkaitan dengan kemampuan program bertahan melewati perubahan tahun anggaran dan pergantian pejabat. Inovasi yang kuat membutuhkan ketiga aspek tersebut secara bersamaan.

Inkubator Dopat dan Klinik UMKM relatif lebih matang karena memiliki unit pengampu, fungsi layanan yang jelas, serta data capaian yang lebih baik. GIAT UMKM GO ON menunjukkan inovasi lokal yang responsif, tetapi membutuhkan payung replikasi dan integrasi data tingkat kabupaten. Klinik UMKM Daha Barat memperluas akses wilayah, tetapi memerlukan standardisasi layanan dengan Klinik UMKM kabupaten agar penerima manfaat memperoleh kualitas layanan yang setara.

Kampung Kuliner memiliki kelembagaan operasional melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tetapi pengelolaan kawasan perlu didukung aturan mengenai seleksi pedagang, jadwal, kebersihan, keamanan, pungutan, pemeliharaan fasilitas, dan pencatatan transaksi. MAU SOP IGA memiliki kejelasan proses teknis, tetapi kelembagaan bisnis dan pasar perlu diperkuat. KURELA SEHATI paling membutuhkan penguatan formal karena komunitas memerlukan status, struktur, rencana kerja, dan mekanisme akuntabilitas.

Penguatan kelembagaan juga perlu tercermin dalam dokumen kinerja perangkat daerah. Target inovasi harus dimasukkan ke perjanjian kinerja, rencana kerja, serta evaluasi berkala. Dengan cara tersebut, inovasi tidak diperlakukan sebagai kegiatan tambahan, melainkan sebagai instrumen pencapaian sasaran perangkat daerah dan sasaran pembangunan daerah.

4.5.4 Kesenjangan Desain dan Implementasi

Kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaan di lapangan teridentifikasi terutama pada aspek keterbukaan data. Tujuh dari dua belas inovasi (GIAT UMKM GO ON, SADATU, TERASA BERKAH, MAU SOP IGA, SILAPIS, Klinik UMKM Daha Barat, dan PETA DASEL) belum memiliki data kuantitatif capaian program yang terdokumentasi secara resmi, meskipun penjelasan manfaat program telah dirumuskan secara rinci. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kebijakan pada tingkat perencanaan (dokumen inovasi) belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang terstruktur pada tingkat implementasi.

Tabel A.89 Kesenjangan Desain dan Implementasi

Aspek	Desain (Dokumen Inovasi)	Implementasi (Ketersediaan Data)	Kesenjangan
Target Kinerja	Dirumuskan secara kualitatif pada seluruh inovasi	Hanya 2 dari 7 inovasi memiliki data kuantitatif lengkap	Tinggi

Aspek	Desain (Dokumen Inovasi)	Implementasi (Ketersediaan Data)	Kesenjangan
Payung Regulasi	Diasumsikan sebagai program resmi OPD/Kelurahan	3 dari 7 inovasi belum memiliki payung regulasi jelas	Sedang
Skema Pembiayaan	Disebutkan sebagai manfaat potensial pada sebagian inovasi	Hanya 2 inovasi menyebut mitra perbankan secara jelas	Tinggi
Monitoring Berkelanjutan	Tidak dijelaskan mekanisme monev pada dokumen inovasi	Tidak ditemukan bukti pelaporan berkala terpublikasi	Tinggi

Kesenjangan desain dan implementasi tidak hanya berupa ketiadaan data, tetapi juga perbedaan antara manfaat yang dinyatakan dan bukti yang tersedia. Beberapa dokumen menyebut peningkatan pendapatan, perluasan pasar, atau pembukaan kesempatan usaha, tetapi tidak menyajikan data awal, target, periode, dan realisasi. Narasi manfaat tersebut penting sebagai teori perubahan, namun belum cukup sebagai bukti kinerja.

Kesenjangan lainnya terdapat pada konsistensi penerima manfaat. Dokumen belum selalu menjelaskan apakah peserta yang didata sama dengan peserta yang dilatih, memperoleh legalitas, menerima pembiayaan, dan mengakses pasar. Tanpa identitas penerima manfaat yang konsisten, pemerintah daerah tidak dapat membangun analisis perjalanan usaha atau menghindari duplikasi dukungan.

Dari perspektif RKPD, kesenjangan ini dapat mengurangi kualitas pengendalian. Evaluasi triwulanan membutuhkan indikator yang dapat diperbarui secara berkala. Apabila data baru dihimpun pada akhir kegiatan atau hanya berupa dokumentasi, keterlambatan dan masalah pelaksanaan tidak dapat segera dikoreksi. *Dashboard* SIMONEV UMKM karena itu perlu mengintegrasikan pelaporan rutin, bukan hanya rekapitulasi tahunan.

Perbaikan implementasi harus dilakukan secara proporsional. Inovasi dengan data matang dapat diarahkan pada evaluasi hasil dan dampak, sedangkan inovasi yang masih baru perlu terlebih dahulu menyusun data awal, daftar penerima manfaat, dan standar pelaporan. Pendekatan bertahap akan mencegah beban administrasi yang berlebihan sekaligus meningkatkan kualitas bukti secara konsisten.

4.5.5 Skor Evaluasi Desain Kebijakan

Menggabungkan hasil skoring komposit (Bab III), pemetaan domain ekosistem kewirausahaan (Subbab 4.4), dan kajian keselarasan RPJMD serta kelembagaan pada subbab ini, kajian menyimpulkan bahwa desain kebijakan inovasi ekonomi Kabupaten HSS berada pada kategori “Cukup Baik dengan Kesenjangan Struktural pada Domain Pembiayaan dan Kebijakan Afirmatif”. Skor

rata-rata komposit kedua belas inovasi tercatat 3,19 dari skala 5 (kategori Cukup), dengan sebaran skor yang cukup lebar (2,30 hingga 4,25), menunjukkan variasi kualitas desain kebijakan yang signifikan antar-inovasi meskipun berada dalam satu perspektif dan sub-klaster tematik yang sama.

Variasi ini menunjukkan bahwa kualitas desain kebijakan lebih ditentukan oleh kematangan kelembagaan dan kejelasan mekanisme monitoring masing-masing OPD/kelurahan penyelenggara, dibandingkan oleh perbedaan level pemerintahan (kabupaten vs kelurahan/kecamatan) semata - sebagaimana tercermin dari GIAT UMKM GO ON (program kelurahan) yang justru memperoleh skor lebih tinggi dibanding Klinik UMKM Daha Barat (program kecamatan) karena cakupan domain ekosistem yang lebih luas.

Skor rata-rata 3,19 menunjukkan bahwa kebijakan telah memiliki fondasi, tetapi belum mencapai tingkat desain yang kuat dan seimbang. Nilai tersebut tidak boleh dibaca sebagai penilaian tunggal terhadap kinerja perangkat daerah. Skor merepresentasikan kualitas desain berdasarkan empat dimensi yang dipilih kajian, yaitu kejelasan, cakupan ekosistem, keterukuran, dan keberlanjutan. Perubahan data atau penguatan kelembagaan dapat mengubah skor pada evaluasi berikutnya.

Rentang skor 2,30 hingga 4,25 menandakan variasi kematangan yang cukup besar. Variasi tersebut menjadi dasar untuk menerapkan strategi berbeda. Inovasi dengan skor tinggi perlu diarahkan pada perluasan skala, evaluasi hasil, dan replikasi. Inovasi dengan skor menengah perlu memperbaiki indikator dan hubungan dengan domain lain. Inovasi dengan skor rendah perlu memprioritaskan kelembagaan, data awal, dan kejelasan program sebelum diperluas.

Apabila dikaitkan dengan dokumen perencanaan, peningkatan skor seharusnya menjadi bagian dari perbaikan tata kelola tahunan. RKPD dapat menetapkan target peningkatan kualitas data dan cakupan layanan, sedangkan RPJMD dapat memantau hasil lima tahunan. RPJPD memberikan orientasi agar inovasi berkembang menuju sistem ekonomi lokal yang produktif, digital, inklusif, dan berkelanjutan.

Kategori akhir kajian, yaitu cukup baik dengan kesenjangan struktural pada pembiayaan dan kebijakan keberpihakan, menegaskan bahwa agenda berikutnya harus berfokus pada daya ungkit. Menambah pelatihan tanpa pembiayaan dan pasar kemungkinan hanya menghasilkan tambahan keluaran. Sebaliknya, menghubungkan pendampingan dengan pembiayaan, pengadaan, dan pasar berpotensi menghasilkan peningkatan omzet, tenaga kerja, dan nilai tambah yang lebih langsung.

4.6 Model Penguatan Ekosistem Kewirausahaan UMKM

4.6.1 Model Penguatan Terintegrasi

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan domain pada Subbab 4.4, kajian ini merumuskan model penguatan ekosistem kewirausahaan terpadu yang menempatkan keenam domain Isenberg-Spigel sebagai kerangka orientasi program, dengan kedua belas inovasi prioritas diposisikan pada domain dominan masing-masing sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4. 18.

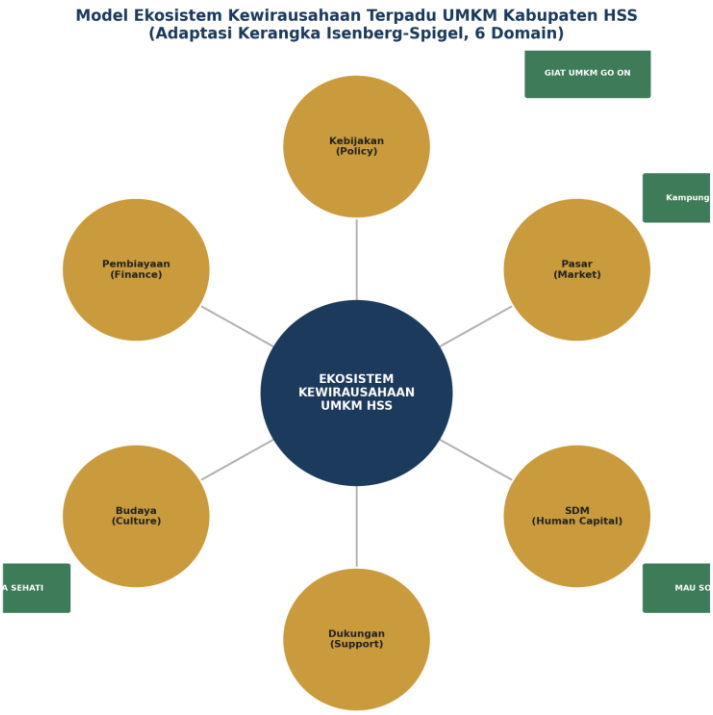

Gambar A.22 Model Ekosistem Kewirausahaan Terpadu UMKM Kabupaten HSS

Model ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem kewirausahaan UMKM Kabupaten HSS ke depan perlu diarahkan pada dua strategi utama: (1) memperkuat domain yang masih lemah (Pembiayaan dan Kebijakan) melalui inovasi baru atau perluasan mandat inovasi eksisting; dan (2) mengintegrasikan inovasi-inovasi yang saat ini berjalan secara terpisah lintas OPD/kelurahan ke dalam satu kerangka kelembagaan yang saling melengkapi antar domain, sesuai prinsip interdependensi Spigel (2017).

4.6.2 Model Alur Optimalisasi Inkubator Dopat

Gambar A.23 Model Alur Optimalisasi Inkubator Dopat

Model optimalisasi Inkubator Dopat mengusulkan penguatan pada tahap fasilitasi pembiayaan yang saat ini belum jelas dalam desain program, sekaligus mempertahankan kekuatan pada domain Dukungan dan SDM yang telah terbukti efektif melalui capaian kinerja 39 tenant.

- Memperluas rekrutmen tenant baru berbasis produk lokal unggulan lain di luar dodol dan ketupat;
- Menjalin kemitraan formal dengan lembaga perbankan/KUR untuk fasilitasi pembiayaan tenant;
- Mendokumentasikan dan mempublikasikan data kinerja tenant secara berkala sebagai bahan evaluasi kelembagaan;
- Mereplikasi model inkubasi DOPAT ke sentra produk lokal lain di Kabupaten HSS.

Penanggung Jawab: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.6.3 Model Alur Optimalisasi Klinik UMKM

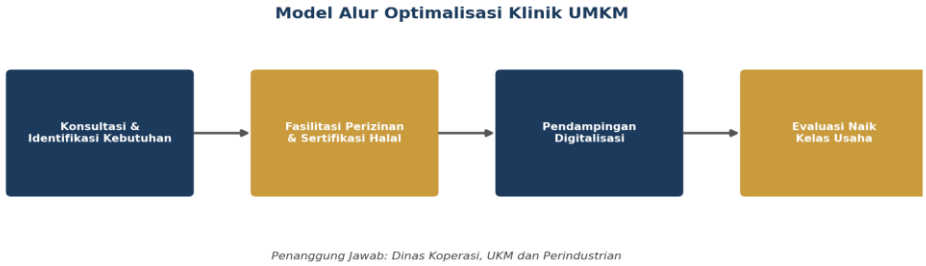

Gambar A.24 Model Alur Optimalisasi Klinik UMKM

Model optimalisasi Klinik UMKM mengusulkan penguatan domain kebijakan melalui pengusulan regulasi insentif bagi UMKM yang berhasil naik kelas, guna memperkuat daya ungkit program pendampingan yang telah berjalan efektif.

- Mempertahankan capaian pendampingan naik kelas UMKM yang telah melampaui target (113,87%);
- Mengusulkan regulasi daerah (Perbup) tentang insentif bagi UMKM naik kelas hasil pendampingan;
- Memperluas cakupan layanan sertifikasi halal dan digitalisasi bagi UMKM binaan;
- Mengintegrasikan data UMKM binaan dengan basis data GIAT UMKM GO ON dan Klinik UMKM Daha Barat.

Penanggung Jawab: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.6.4 Model Alur Optimalisasi Klinik UMKM Daha Barat

Gambar A.25 Model Alur Optimalisasi Klinik UMKM Daha Barat

Model optimalisasi Klinik UMKM Daha Barat mengusulkan penguatan integrasi kelembagaan dengan Klinik UMKM tingkat kabupaten serta penyediaan data kuantitatif capaian pendampingan yang saat ini belum tersedia.

- Mendokumentasikan jumlah dan profil UMKM yang telah didampingi secara berkala;
- Mengintegrasikan pelaporan dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian tingkat kabupaten;
- Memperkuat akses permodalan melalui replikasi kemitraan perbankan Inkubator Dopat;
- Mereplikasi model layanan serupa ke kecamatan lain yang belum memiliki klinik UMKM.

Penanggung Jawab: Pemerintah Kecamatan Daha Barat & Dinas Koperasi UKM

4.6.5 Model Alur Optimalisasi Kampung Kuliner

Gambar A.26 Model Alur Optimalisasi Kampung Kuliner

Model optimalisasi Kampung Kuliner mengusulkan penguatan domain pembiayaan melalui perluasan kemitraan perbankan dari sebatas penyediaan fasilitas fisik menjadi skema pembiayaan modal usaha bagi pedagang.

- Mendokumentasikan data omzet dan kunjungan secara sistematis sebagai dasar evaluasi program;
- Memperluas kemitraan BRI dan Bank Kalsel menjadi skema pembiayaan modal usaha pedagang;
- Meningkatkan promosi digital Kampung Kuliner sebagai destinasi ekonomi malam unggulan daerah;
- Menata kembali kapasitas fasilitas guna mengakomodasi lonjakan pengunjung mingguan.

Penanggung Jawab: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.6.6 Model Alur Optimalisasi KURELA SEHATI

Gambar A.27 Model Alur Optimalisasi KURELA SEHATI

Model optimalisasi KURELA SEHATI mengusulkan penguatan kelembagaan formal serta advokasi peningkatan alokasi anggaran ekonomi kreatif, mengingat inovasi ini memiliki keunggulan pada domain Budaya namun masih lemah pada domain Kebijakan dan Pembiayaan.

- Melembagakan KURELA SEHATI menjadi wadah/komunitas berbadan hukum resmi;
- Mengadvokasi peningkatan alokasi APBD Kabupaten untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- Menyusun program pembinaan konkret (pelatihan, magang, webinar) secara terjadwal bagi anggota komunitas;
- Memantau capaian kontribusi PDRB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif HSS terhadap rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun.

Penanggung Jawab: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

4.6.7 Model Alur Optimalisasi GIAT UMKM GO ON

Gambar A.28 Model Alur Optimalisasi GIAT UMKM GO ON

Model optimalisasi GIAT UMKM GO ON mengusulkan penguatan payung kelembagaan tingkat kabupaten agar praktik baik digitalisasi UMKM berbasis kelurahan ini dapat direplikasi secara lebih luas.

- Mendokumentasikan jumlah pasti UMKM yang telah didata dan dibina secara kuantitatif;
- Mengusulkan payung kebijakan kabupaten agar model GIAT UMKM GO ON dapat direplikasi ke kelurahan/desa lain;
- Memperkuat kemitraan perbankan yang telah terjalin menjadi skema pembiayaan yang lebih terstruktur;
- Melanjutkan dorongan digitalisasi pemasaran melalui pelatihan berkelanjutan media sosial dan *marketplace*.

Penanggung Jawab: Pemerintah Kelurahan Kandangan Utara

4.6.8 Model Alur Optimalisasi MAU SOP IGA

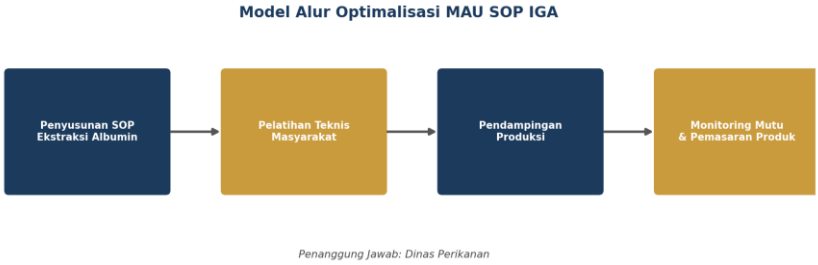

Gambar A.29 Model Alur Optimalisasi MAU SOP IGA

Model optimalisasi MAU SOP IGA mengusulkan perluasan skala produksi dan penguatan domain pasar, mengingat inovasi ini telah memiliki domain SDM dan kejelasan desain yang kuat melalui SOP teknis yang baku, namun belum mengoptimalkan domain pemasaran produk.

- Menyusun data kuantitatif capaian produksi dan pendapatan pelaku usaha ekstraksi albumin;
- Memperluas akses pasar produk albumin ikan gabus melalui kemitraan dengan Klinik UMKM dan GIAT UMKM GO ON;
- Mendorong sertifikasi produk dan standar mutu untuk memperluas pasar di luar Kabupaten HSS;
- Mereplikasi model SOP hilirisasi produk perikanan ke komoditas air tawar unggulan lain.

Penanggung Jawab: Pemerintah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.6.9 Skema Kelembagaan Lintas OPD

Implementasi model penguatan ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi memerlukan kejelasan pembagian peran antar-perangkat daerah. Tabel 4. 21 menyajikan skema kelembagaan yang diusulkan untuk mendukung koordinasi lintas-OPD dalam penguatan ekosistem kewirausahaan UMKM.

Tabel A.90 Skema Peran Kelembagaan Lintas OPD

Perangkat Daerah	Peran Utama dalam Model Penguatan Ekosistem
Bapperida	Integrator kebijakan, sinkronisasi RPJMD/RKPD, pengelola *dashboard* SIMONEV UMKM, serta pembina SILAPIS
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembina Inkubator Dopat, Klinik UMKM, SADATU, dan Sekolah Koperasi Desa HSS; koordinator replikasi model inkubasi dan wali data UMKM daerah

Perangkat Daerah	Peran Utama dalam Model Penguatan Ekosistem
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengelola Kampung Kuliner dan kawasan ekonomi rakyat, serta penyelenggara TERASA BERKAH melalui UPTD Metrologi Legal
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Pembina KURELA SEHATI dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif
Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Pendamping teknis hilirisasi produk perikanan dan pangan, termasuk dukungan mutu bagi MAU SOP IGA
Kecamatan Daha Selatan	Pelaksana MAU SOP IGA dan PETA DASEL sebagai basis data potensi ekonomi desa
Kecamatan Daha Barat	Pelaksana Klinik UMKM Daha Barat dan replikasinya ke wilayah lain
Kelurahan Kandangan Utara	Pelaksana GIAT UMKM GO ON tingkat kelurahan dan model rujukan replikasi
Lembaga Perbankan (BRI, Bank Kalsel)	Mitra pembiayaan dan fasilitasi sarana bagi UMKM dan pedagang binaan

4.7 Rekomendasi Kebijakan

4.7.1 Rekomendasi Teknis per Inovasi

Rekomendasi teknis per inovasi telah disajikan secara rinci pada model alur optimalisasi Subbab 4.6. Tabel 4. 22 merangkum inti rekomendasi tersebut sebagai basis kesimpulan operasional bagi masing-masing OPD/kelurahan penyelenggara.

Tabel A.91 Ringkasan Rekomendasi Teknis per Inovasi

Inovasi	Rekomendasi Inti
Inkubator Dopat	Perluasan kemitraan pembiayaan tenant dan replikasi ke produk lokal lain
Sekolah Koperasi Desa HSS	Pendampingan pascalegalitas menuju RAT seluruh KDKMP dan integrasi usaha koperasi dengan UMKM binaan
Klinik UMKM	Regulasi insentif UMKM naik kelas dan integrasi data lintas-kelurahan
SADATU	Penetapan sebagai basis data rujukan tunggal UMKM daerah dan saling terhubung dengan GIAT UMKM GO ON serta PETA DASEL
GIAT UMKM GO ON	Payung kebijakan kabupaten dan dokumentasi data kuantitatif
TERASA BERKAH	Publikasi data capaian tera/tera ulang dan perluasan cakupan pasar di seluruh kecamatan

Inovasi	Rekomendasi Inti
Kampung Kuliner	Perluasan pembiayaan modal usaha pedagang dan promosi digital
MAU SOP IGA	Dokumentasi capaian produksi dan perluasan akses pasar produk
SILAPIS	Penetapan pengguna lintas-OPD dan penyambungan fungsi inkubasi dengan Inkubator Dopat
Klinik UMKM Daha Barat	Integrasi pelaporan kabupaten dan replikasi ke kecamatan lain
PETA DASEL	Standardisasi metadata potensi ekonomi desa dan replikasi ke kecamatan lain
KURELA SEHATI	Pelembagaan formal dan advokasi anggaran ekonomi kreatif

4.7.2 Rekomendasi Kebijakan Daerah

Selain rekomendasi teknis per inovasi, kajian ini merumuskan tiga rekomendasi kebijakan strategis pada level Pemerintah Kabupaten HSS, sebagai respons atas kesenjangan domain yang teridentifikasi pada Subbab 4.4 dan 4.5:

4.7.2.1 Penguatan Domain Pembiayaan melalui Kemitraan Afirmatif

Pemerintah Kabupaten HSS, melalui Bapperida dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian, disarankan menginisiasi nota kesepahaman (MoU) keberpihakan dengan lembaga perbankan daerah (BRI, Bank Kalsel) dan lembaga keuangan mikro untuk menyediakan skema pembiayaan khusus bagi UMKM binaan program-program yang telah dikaji, alih-alih pendekatan kemitraan yang saat ini masih terbatas pada penyediaan fasilitas fisik.

4.7.2.2 Penyusunan Regulasi Insentif Fiskal UMKM

Pemerintah Kabupaten HSS disarankan menyusun Peraturan Bupati yang secara jelas memberikan insentif fiskal (misalnya keringanan retribusi usaha, kemudahan perizinan) bagi UMKM yang berhasil naik kelas melalui program pendampingan resmi, guna memperkuat domain kebijakan yang saat ini masih bersifat administratif tanpa insentif konkret.

4.7.2.3 Integrasi Data Kinerja UMKM Lintas OPD

Bapperida disarankan melakukan pembenahan klasifikasi Asta Cita pada dokumen rekapitulasi inovasi daerah, mencakup penyesuaian urutan penomoran kategori agar sesuai rumusan resmi RPJMN 2025-2029, reklasifikasi lima inovasi sebagaimana teridentifikasi pada Tabel 4. 3, serta penetapan MAU SOP IGA dan

Inkubator Dopat sebagai inovasi perintis Asta Cita 5 agar agenda hilirisasi produk lokal memiliki penanda program yang terbaca dalam pelaporan kinerja daerah.

Bapperida disarankan mengembangkan *dashboard* pemantauan tunggal (SIMONEV UMKM) yang mengintegrasikan data kinerja seluruh program pembinaan UMKM lintas-OPD dan kelurahan/kecamatan, guna mengatasi kesenjangan keterukuran dampak yang teridentifikasi pada tujuh dari dua belas inovasi prioritas.

4.7.3 Rekomendasi Inovasi Baru

Kajian ini mengidentifikasi dua kesenjangan struktural yang memerlukan pengembangan inovasi baru: (1) tidak adanya jenis pembiayaan keberpihakan yang secara khusus dirancang untuk UMKM binaan program daerah, dan (2) minimnya forum kolaborasi lintas-OPD yang secara berkala mengevaluasi cakupan domain ekosistem kewirausahaan pada seluruh program pembinaan UMKM Kabupaten HSS.

- Inovasi baru yang diusulkan: “SKEMA PEMBIAYAAN AFIRMATIF UMKM HSS” - skema kredit bersubsidi bunga bagi UMKM binaan Inkubator Dopat, Klinik UMKM, dan GIAT UMKM GO ON, bekerja sama dengan BRI dan Bank Kalsel.
- Inovasi baru yang diusulkan: “FORUM EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN HSS (FORKEUM)” - forum koordinasi lintas-OPD dan pelaku usaha yang secara berkala mengevaluasi cakupan domain ekosistem kewirausahaan pada seluruh program pembinaan UMKM Kabupaten HSS.

4.7.4 Peta Jalan Implementasi

Rekomendasi kebijakan pada subbab 4.7.2 dan 4.7.3 diusulkan untuk diimplementasikan melalui tiga fase sebagaimana disajikan pada Gambar 4. 26 dan Tabel 4. 23.

Gambar A.30 Peta Jalan Implementasi Tiga Fase

Tabel A.92 Peta Jalan Implementasi Tiga Fase

Fase	Fokus Utama	Output Utama
Fase I (Tahun 1)	Penguatan data dan kelembagaan	Dokumentasi data kuantitatif 4 inovasi yang belum lengkap; penyusunan draf regulasi insentif fiskal UMKM
Fase II (Tahun 2)	Integrasi dan replikasi model	*Dashboard* SIMONEV UMKM lintas-OPD; replikasi model Inkubator Dopat dan GIAT UMKM GO ON ke wilayah lain
Fase III (Tahun 3)	Skalasi dan kemitraan pembiayaan	Skema pembiayaan keberpihakan UMKM HSS berjalan penuh; FORKEUM terbentuk dan aktif

4.7.5 Skenario Keberlanjutan

Keberlanjutan rekomendasi kajian ini pada akhirnya bergantung pada sejauh mana Pemerintah Kabupaten HSS mengintegrasikan rekomendasi tersebut ke dalam dokumen perencanaan resmi dan alokasi anggaran. Untuk mengantisipasi variasi tingkat komitmen kebijakan tersebut, kajian ini menyusun tiga skenario keberlanjutan sebagaimana disajikan pada Tabel 4. 24.

Tabel A.93 Skenario Keberlanjutan Implementasi Rekomendasi

Skenario	Asumsi Utama	Dampak
Optimis	Seluruh rekomendasi Fase I & II diintegrasikan ke Renstra/RKPD dengan skema pembiayaan keberpihakan terealisasi penuh	Domain Pembiayaan dan Kebijakan meningkat signifikan; model Inkubator Dopat direplikasi ke sektor lain; FORKEUM aktif mengevaluasi ekosistem secara berkala
Moderat	Sebagian rekomendasi Fase I diimplementasikan; skema pembiayaan keberpihakan berjalan terbatas	Perbaikan keterukuran data tercapai, namun kesenjangan domain Pembiayaan belum banyak berubah
Pesimis	Rekomendasi tidak diintegrasikan ke dokumen perencanaan resmi; program berjalan tanpa koordinasi lintas-OPD	Fragmentasi kelembagaan berlanjut, kesenjangan domain melebar, dan inovasi tingkat kelurahan/kecamatan berisiko terhenti

Kajian ini merekomendasikan skenario Optimis sebagai target capaian, dengan skenario Moderat sebagai data awal realistis apabila skema pembiayaan keberpihakan tidak dapat segera direalisasikan mengingat keterbatasan fiskal daerah.

BAB 5
PENUTUP

EVALUASI DESAIN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
BERBASIS EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGUATAN
UMKM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB V
PENUTUP

5.1 Capaian Inovasi di Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan kajian dan pengolahan data rekap inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut delapan kategori Asta Cita, diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 5. 1. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kategori Asta Cita 7 tentang reformasi politik, hukum, dan birokrasi memiliki jumlah inovasi terbanyak, yaitu 100 inovasi, disusul Asta Cita 4 tentang pembangunan sumber daya manusia sebanyak 70 inovasi. Sebaliknya, Asta Cita 5 tentang hilirisasi dan industrialisasi belum memiliki satu pun inovasi terdaftar. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel A.94 Hasil Rekapitulasi Inovasi Daerah Tahun 2026 di Kabupaten

No	Kategori Asta Cita	Jumlah Inovasi
1	AC 1 - Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	2
2	AC 2 - Pertahanan keamanan, swasembada pangan/energi/air, ekonomi kreatif, hijau, biru	11
3	AC 3 - Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur	20
4	AC 4 - Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, gender	70
5	AC 5 - Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri	0
6	AC 6 - Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	8
7	AC 7 - Reformasi politik, hukum, birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba	100
8	AC 8 - Keharmonisan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi antarumat beragama	3
	TOTAL INOVASI	**214**

Sumber: Hasil analisis atas Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita, 2026

Pelaksanaan kajian menghasilkan capaian utama berupa pemetaan 22 inovasi kandidat berkaitan dengan ekonomi, penetapan dua belas inovasi prioritas, pemetaan kesesuaian seluruh inovasi terhadap delapan Asta Cita, skoring komposit empat dimensi evaluatif, pemetaan enam domain ekosistem kewirausahaan, analisis keselarasan dengan RPJMD, identifikasi kesenjangan desain dan implementasi, serta penyusunan model penguatan dan peta jalan kebijakan. Hasil gabungan menunjukkan skor rata-rata 3,19 dari skala 5 dengan kategori cukup, disertai kesenjangan struktural pada domain pembiayaan dan kebijakan keberpihakan.

5.2 Kesimpulan

- Dari 22 inovasi kandidat yang berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan nilai tambah Kabupaten HSS, dua belas inovasi (54,5%) dari sisi isinya relevan terhadap penguatan UMKM dan ekosistem kewirausahaan, dengan Inkubator Dopat menempati peringkat skor komposit evaluasi desain kebijakan tertinggi (4,25), disusul Sekolah Koperasi Desa HSS (4,15), dan KURELA SEHATI terendah (2,30).
- Desain kebijakan kedua belas inovasi secara konsisten kuat pada domain Dukungan (Support), tetapi mengalami kesenjangan struktural pada domain Pembiayaan (Finance) dan Kebijakan (Policy) dalam pengertian insentif fiskal keberpihakan bagi UMKM.
- Desain kebijakan yang dikaji secara umum selaras dengan elemen Sejahtera, Mandiri, dan Mengayomi dari visi RPJMD SEMANGAT 2025-2029, namun elemen Teknologis baru tercermin kuat pada satu inovasi dan memerlukan penguatan lebih luas.
- Terdapat kesenjangan signifikan antara desain kebijakan pada dokumen perencanaan dan implementasi di lapangan, terutama pada aspek keterukuran dampak - tujuh dari dua belas inovasi belum memiliki data kuantitatif capaian program yang terdokumentasi secara resmi.
- Pada dimensi kesesuaian Asta Cita, sepuluh inovasi berstatus sesuai, tujuh sesuai dengan irisan, dan lima perlu direklasifikasi. Kabupaten HSS dari sisi isinya telah mengerjakan enam dari delapan Asta Cita, namun Asta Cita 5 tentang hilirisasi tercatat kosong akibat salah penempatan kategori, dan portofolio inovasi daerah secara keseluruhan masih didominasi Asta Cita 7 sebanyak 46,7%.
- Kualitas desain kebijakan lebih ditentukan oleh kematangan kelembagaan dan kejelasan mekanisme monitoring OPD/kelurahan penyelenggara, bukan semata oleh level pemerintahan yang menaunginya.

Secara kebijakan, hasil kajian menunjukkan bahwa kedua belas inovasi telah searah dengan agenda kesejahteraan, kemandirian usaha, transformasi ekonomi, digitalisasi, dan tata kelola berbasis hasil dalam RPJMD, RPJPD, RKPD, dan RPJMN. Namun, keselarasan tersebut masih dominan pada tingkat tujuan. Penguatan diperlukan pada tingkat instrumen, indikator, basis data, pembiayaan, dan koordinasi agar kontribusi terhadap indikator keberhasilan daerah dapat dibuktikan secara konsisten.

5.3 Saran

- Bagi Pemerintah Kabupaten HSS: mengintegrasikan rekomendasi penguatan domain Pembiayaan dan Kebijakan ke dalam Renstra OPD dan RKPD tahun berjalan.
- Bagi Bapperida: mengembangkan *dashboard* SIMONEV UMKM sebagai instrumen pemantauan tunggal lintas-OPD dan kelurahan/kecamatan.
- Bagi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan OPD terkait: menjajaki kemitraan keberpihakan dengan lembaga perbankan daerah untuk skema pembiayaan UMKM binaan.
- Bagi peneliti selanjutnya: memperluas kajian dengan melibatkan wawancara langsung terhadap pelaku UMKM binaan guna memverifikasi data kuantitatif yang saat ini belum tersedia dalam dokumen resmi inovasi.

5.4 Keterbatasan Kajian

Kajian ini berbasis dokumen tanpa verifikasi lapangan, menggunakan skala kualitatif, dan hanya mendalami dua belas inovasi terpilih. Target numerik indikator daerah juga belum seluruhnya tersedia. Karena itu, hasil kajian diposisikan sebagai pemeriksaan rancangan dan kontribusi kebijakan, bukan pengukuran dampak sebab-akibat.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.

Isenberg, D. J. (2010). How to Start an Entrepreneurial Revolution. Harvard Business Review, 88(6), 40-50.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2026). Rekap Inovasi Daerah Per Kategori Asta Cita. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. [Dokumen rekapitulasi 214 inovasi daerah, menggantikan Rekapitulasi Inovasi Daerah Berdasarkan Lima Perspektif].

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Schneider, A., & Ingram, H. (1997). Policy Design for Democracy. University Press of Kansas.

Spigel, B. (2017). The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49-72.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Lengkap 22 Inovasi Kandidat Berorientasi Ekonomi, Efisiensi, dan Nilai Tambah

Tabel A.95 Lampiran 1. Daftar Lengkap 22 Inovasi Kandidat Berorientasi

No	Nama Inovasi	Kategori Asta Cita Asal
1	SiOPEN HSS	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
2	Gebrak Sehati	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
3	DETAK PJU+	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
4	TERASA BERKAH	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
5	Kampung Kuliner	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
6	Klinik UMKM	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
7	Inkubator Dopat	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
8	SADATU	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
9	SI PANDU WISATA V2.0	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
10	SIMBIOSIS	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
11	SIMPAI	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
12	HSS TRIP	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
13	KURELA SEHATI	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
14	SILAPIS	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
15	Klinik UMKM Daha Barat (KUBAR)	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
16	PETA DASEL	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur

No	Nama Inovasi	Kategori Asta Cita Asal
17	SI LOWIS	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
18	PACARKU	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
19	GIAT UMKM GO ON	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
20	SI TIMELINE RS BHHB	Lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur
21	MAU SOP IGA	Kemandirian pangan, energi, air, ekonomi kreatif/hijau/biru
22	Sekolah Koperasi Desa HSS	Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan

Lampiran 2. Daftar Singkatan

Tabel A.96 Lampiran 2. Daftar Singkatan (Singkatan)

Singkatan	Kepanjangan
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
HSS	Hulu Sungai Selatan
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Bapperida	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
SEMANGAT	Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis
KUR	Kredit Usaha Rakyat
SOP	Standar Operasional Prosedur

Lampiran 3. Catatan Pemutakhiran Data Rekapitulasi Inovasi

Lampiran ini merekam perubahan substantif pada laporan setelah dimutakhirkan mengikuti dokumen "Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita". Pemutakhiran mencakup perubahan basis pengelompokan dari lima perspektif analitis menjadi delapan kategori Asta Cita, pemutakhiran jumlah inovasi daerah

menjadi 214 inovasi sesuai rekapitulasi terkini, serta lengkapnya uraian isi pada sejumlah inovasi yang sebelumnya kosong.

Tabel A.97 Lampiran 3. Catatan Pemutakhiran Data Rekapitulasi Inovasi

Aspek	**Laporan Sebelumnya**	**Setelah Pemutakhiran**
Sumber data	Rekapitulasi Inovasi 5 Perspektif	Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita
Total inovasi daerah	214 inovasi	214 inovasi
Basis pengelompokan	5 perspektif analitis	8 kategori Asta Cita
Populasi kandidat	16 inovasi (Perspektif Ekonomi)	22 inovasi (20 Asta Cita 3 + 2 lintas kategori)
Inovasi prioritas	7 inovasi	12 inovasi
Inovasi prioritas baru	-	SADATU, Sekolah Koperasi Desa HSS, PETA DASEL, TERASA BERKAH, SILAPIS
Inovasi kandidat baru	-	SiOPEN HSS, Gebrak Sehati, DETAK PJU+, SI LOWIS, SI TIMELINE RS BHHB
Inovasi kandidat gugur	SIEVAK, PENTAMAKS, PERJAKA HSS SEMANGAT	Tidak lagi terdaftar pada kategori Asta Cita 3 pada rekapitulasi terbaru
Status SILAPIS	Gugur Tahap I (tanpa uraian isi)	Lolos sebagai inovasi prioritas (peringkat 9)
Status SIMBIOSIS	Tidak teridentifikasi	Teridentifikasi sebagai sistem pembinaan olahraga (di luar fokus kajian)
Porsi sub-klaster UMKM Inti	7 dari 16 (43,8%)	12 dari 22 (54,5%)

Aspek	Laporan Sebelumnya	Setelah Pemutakhiran
Skor rata-rata komposit	3,16	3,19
Nomenklatur OPD (Klinik UMKM, Inkubator Dopat)	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Nomenklatur OPD (Kampung Kuliner)	Dinas Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nomenklatur OPD (MAU SOP IGA)	Dinas Perikanan	Kecamatan Daha Selatan
Catatan kekosongan	-	Kategori Asta Cita 5 (hilirisasi dan industrialisasi) belum memiliki inovasi terdaftar
Urutan kategori Asta Cita	Mengikuti urutan pada dokumen rekapitulasi	Disesuaikan dengan rumusan resmi RPJMN 2025-2029 (kewirausahaan = AC 3, SDM = AC 4)
Kesesuaian klasifikasi	Belum dianalisis	10 Sesuai, 7 Sesuai dengan Irisan, 5 Perlu Reklasifikasi
Cakupan Asta Cita	Belum dianalisis	6 dari 8 Asta Cita tersentuh; AC 5 kosong pada pencatatan tetapi terisi pada praktik
Bab II	5 subbab	6 subbab (tambahan 2.5 Asta Cita sebagai Kerangka Prioritas Nasional)
Tujuan dan sasaran kajian	4 butir	5 butir (tambahan analisis kesesuaian Asta Cita)

Lampiran 4. Daftar Istilah dalam Bahasa Sehari-hari

Lampiran ini menjelaskan istilah teknis yang dipakai dalam laporan menggunakan bahasa sehari-hari, agar laporan mudah dibaca lintas bidang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel A.98 Lampiran 4. Daftar Istilah dalam Bahasa Sehari-hari (Istilah)

Istilah	Penjelasan Singkat
Asta Cita	Delapan misi Presiden periode 2025-2029 yang menjadi delapan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029.
Ekosistem kewirausahaan	Lingkungan pendukung tumbuhnya usaha. Terdiri atas enam bagian: kebijakan, pembiayaan, budaya, dukungan/pendampingan, sumber daya manusia, dan pasar.
Desain kebijakan	Rancangan sebuah program: apa sasarannya, alat apa yang dipakai, dan bagaimana keduanya terhubung.
Domain	Satu bagian atau satu sisi dari ekosistem kewirausahaan. Ada enam domain.
Skor komposit	Nilai gabungan dari empat hal yang dinilai (kejelasan rancangan, kelengkapan domain, keterukuran dampak, dan keberlanjutan kelembagaan), masing-masing dengan bobot berbeda.
Keterukuran dampak	Ada atau tidaknya data angka yang membuktikan hasil sebuah program.
Keberlanjutan kelembagaan	Kuat atau tidaknya dasar hukum dan kelembagaan sebuah program, sehingga tidak berhenti saat pejabatnya berganti.
Sub-klaster	Kelompok kecil di dalam kumpulan inovasi, dibuat berdasarkan kemiripan tema.

Istilah	Penjelasan Singkat
Reklasifikasi	Memindahkan sebuah inovasi ke kategori Asta Cita yang lebih sesuai dengan isinya.
Hilirisasi	Mengolah bahan mentah menjadi produk jadi supaya harganya lebih tinggi. Contoh: ikan gabus diolah menjadi ekstrak albumin.
Nilai tambah	Selisih kenaikan nilai suatu produk setelah diolah atau dikemas ulang.
UMKM naik kelas	UMKM yang berpindah dari usaha informal menjadi usaha resmi berbadan hukum, atau naik dari skala mikro ke kecil, dan seterusnya.
Formalisasi usaha	Proses mengurus legalitas usaha, seperti NIB, sertifikat halal, atau izin P-IRT.
Inkubasi bisnis	Pendampingan usaha pemula secara terjadwal sampai usahanya mampu berjalan sendiri.
Tenant	Pelaku usaha yang menjadi peserta binaan sebuah inkubator bisnis.
Basis data terpadu	Satu kumpulan data yang dipakai bersama banyak pihak, sehingga tidak ada lagi data ganda atau data yang berbeda-beda antarinstansi.
Domain Pembiayaan	Sisi permodalan: ada tidaknya kerja sama dengan bank atau lembaga keuangan dalam rancangan program.
Aturan keberpihakan	Peraturan yang secara khusus memberi kemudahan atau keuntungan bagi UMKM, misalnya keringanan retribusi atau prioritas dalam pengadaan.
SIMONEV	Sistem Monitoring dan Evaluasi, yaitu *dashboard* untuk memantau kinerja program secara berkala.

Istilah	Penjelasan Singkat
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
KDKMP	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program strategis nasional bidang koperasi desa.
UTTP	Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, yaitu alat-alat yang wajib ditera secara berkala.
Peta jalan	Rencana tahapan pelaksanaan dari tahun ke tahun.

PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

BAPPERIDA

HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bakti untuk Bangsa

HRP
HAFECS
Research &
Publication

LAPORAN KAJIAN 2026